

LAPORAN
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
PENGADILAN TINGGI AGAMA
PAPUA BARAT
TAHUN 2024



KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Puji dan syukur senantiasa kami panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan yang maha kuasa atas segala rahmat dan ridha-Nya sehingga Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat Tahun 2023 ini dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun dengan mengacu pada Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi.

Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat adalah pengadilan tingkat banding yang baru diresmikan beroperasinya oleh Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Desember 2022. Oleh karena itu LKjIP Tahun 2023 ini adalah laporan kinerja pertama yang disusun sebagai sebuah bentuk pertanggungjawaban Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat dalam pengelolaan Sistem Akuntabilitas Kinerja pada PTA Papua Barat Tahun 2023.

Sebagai bagian dari Mahkamah Agung RI, PTA Papua Barat selalu berupaya untuk memberikan sumbangsi positif terhadap pencapaian kinerja Mahkamah Agung RI dan kami berharap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat Tahun 2023 ini juga bisa memberikan sumbangsi terhadap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Mahkamah Agung secara Nasional.

Pada akhirnya atas segala kekurangan dan ketidaksempurnaan baik dari segi penyusunan Laporan maupun capaian pelaksanaan kinerja yang kami tuangkan dalam laporan ini, kami harapkan untuk mendapatkan saran dan kritik yang konstruktif untuk kami jadikan sebagai bahan evaluasi dalam rangka perbaikan kinerja PTA Papua Barat dimasa mendatang.

PTA Papua Barat adalah instansi yang terbuka untuk dikritik, komitmen dalam melakukan perbaikan, akuntabel dalam pelaporan dan istiqamah dalam menjaga integritas sesuai dengan motto kami "**KOMITMEN, AKUNTABEL, MODERN, ISTIQAMAH**".



Dr. Drs. H. Ahmad Fathoni, S.H., M.Hum.
KPTA Papua Barat



Manokwari,
Ketua PTA Papua Barat

AHMAD FATHONI

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

PENGADILAN TINGGI AGAMA PAPUA BARAT TAHUN ANGGARAN 2023

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat untuk tahun anggaran 2023 sesuai pedoman reviu atas Laporan Kinerja. Substansi Informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan data/informasi kinerja Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat sehingga dapat menghasilkan laporan kinerja yang berkualitas.

Berdasarkan hasil reviu, laporan kinerja ini telah disajikan secara akurat, andal, dan valid, serta tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan dalam laporan kinerja ini.



Manokwari, 26 Februari 2024
Ketua Tim Reviu

Dr. Drs. H. Abdul Ghofur, S.H., M.H.

DAFTAR ISI

	Hal.
Kata Pengantar	i
Pernyataan Telah Direviu	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
Daftar Grafik	vi
Daftar Lampiran	vii
Ringkasan Eksekutif	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi	3
C. Struktur Organisasi	5
D. Sistematika Penyajian Laporan	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	8
A. Rencana Strategis Tahun 2020-2024	8
B. Indikator Kinerja Utama (IKU)	13
C. Rencana Kinerja Tahun 2022	14
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2022	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	17
A. Capaian Kinerja PTA Papua Barat Tahun 2023	17
B. Realisasi Anggaran PTA Papua Barat Tahun 2023	34
BAB IV PENUTUP	42
A. Kesimpulan	42
B. Rekomendasi	43
LAMPIRAN-LAMPIRAN	45

DAFTAR TABEL

	Hal.
Tabel RE.1. Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1.....	Vi
Tabel RE.2. Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2.....	Vii
Tabel RE.3. Rincian Realisasi Anggaran Belanja Unit BUA Pada Pengadilan Tinggi..... Agama Papua Barat TA 2023	Vii
Tabel RE.4. Rincian Realisasi Anggaran Belanja Unit Diten Badilag Pada Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat TA 2023	vii
Tabel 2.1. Analisa Keterkaitan Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035..... Terhadap Renstra PTA Papua Barat 2020-2024	11
Tabel 2.2. Matriks Reviu Rencana Strategis Tahun 2020-2024.....	12
Tabel 2.3. Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat..... Tahun 2023	13
Tabel 2.4. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Pengadilan Tinggi Agama..... Papua Barat Tahun 2023	15
Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja Tahunan (PKT) Pengadilan Tinggi Agama..... Papua Barat Tahun 2023	16
Tabel 3.1. Pengukuran Capaian Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat... .. Tahun 2023	19
Tabel 3.2. Capaian Kinerja Sasaran Strategis.....	19
Tabel 3.3. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu.....	20
Tabel 3.4. Data Keadaan Perkara Yang Diputus Tahun 2023.....	20
Tabel 3.5. Perbandingan Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu... .. Tahun 2021 - 2023	23
Tabel 3.6. Data Perbandingan Target Dan Capaian Tahun 2023 Terhadap Target Jangka Menengah	24
Tabel 3.7. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi.....	24
Tabel 3.8. Perbandingan Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2021 - 2023	26
Tabel 3.9. Data Perbandingan Target Dan Capaian Tahun 2023 Terhadap Target Jangka Menengah	27

Tabel 3.10.	Persentase Indeks Persepsi Stakeholder Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan Tahun 2023	27
Tabel 3.11.	Nilai Rata-Rata Unsur Pelayanan Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat Tahun 2023	28
Tabel 3.12.	Kesimpulan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat Tahun 2023	29
Tabel 3.13.	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2.....	31
Tabel 3.14.	Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim Ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	31
Tabel 3.15.	Perbandingan Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim Ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	32
Tabel 3.16.	Data Perbandingan Target Dan Capaian Tahun 2023 Terhadap Target Jangka Menengah	33
Tabel 3.17.	Pagu Anggaran Belanja Unit BUA Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat TA 2023	35
Tabel 3.18.	Rincian Realisasi Anggaran Belanja Unit BUA Pada Pengadilan Tinggi..... Agama Papua Barat TA 2023	36
Tabel 3.19.	Rincian Realisasi Belanja Pegawai Pada Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat TA 2023	37
Tabel 3.20.	Rekapitulasi Realisasi Belanja Barang Pada Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat TA 2023	38
Tabel 3.21.	Rincian Pagu Dan Realisasi Belanja Modal Pada Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat TA 2023	39
Tabel 3.22.	Pagu Anggaran Belanja Unit Ditjen Badilag Pada Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat Tahun 2023	39
Tabel 3.23.	Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Unit Ditjen Badilag Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat Tahun 2023	40
Tabel 3.24.	Rincian Realisasi Anggaran Belanja Unit Ditjen Badilag Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat Tahun 2023	41
Tabel 4.1.	Pengukuran Capaian Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat Tahun 2023	42

DAFTAR GRAFIK

	Hal.
Grafik 3.1. Perbandingan Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2021-2023	23
Grafik 3.2. Perbandingan Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2021 - 2023	26
Grafik 3.3. Nilai Rata-Rata Unsur Pelayanan Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat Tahun 2023	28
Grafik 3.4. Perbandingan Capaian Indikator Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim Ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu Tahun 2021 -2023	33
Grafik 3.5. Komposisi Anggaran Dan Realisasi Anggaran Belanja Unit BUA Pada Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat Ta 2023	36
Grafik 3.5. Komposisi Anggaran Dan Realisasi Anggaran Belanja Unit Ditjen Badilag ... Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat Ta 2023	40

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Surat Pernyataan telah di reviu
- Lampiran 2. Struktur Organisasi
- Lampiran 3. Indikator Kinerja Utama
- Lampiran 4. Matrik renstra 2020-2024
- Lampiran 5. Matrik Kinerja dan Pendanaan
- Lampiran 6. RKT 2023
- Lampiran 7. PKT 2023
- Lampiran 8. Rencana Aksi Tahun 2023
- Lampiran 9. Laporan Kinerja Triwulan Tahun 2023
- Lampiran 10. Screenshot Aplikasi Komdanas
- Lampiran 11. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat
- Lampiran 12. Pohon Kinerja PTA Papua Barat
- Lampiran 13. RKAKL awal dan RKAKL revisi terakhir
- Lampiran 14. SOP Pengumpulan Data dan Penyusunan Laporan Evaluasi Triwulan.
- Lampiran 15. SK Tim Penyusun LKjIP Tahun 2023
- Lampiran 16. Reviu IKU 2023-0224

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat disusun dalam rangka mewujudkan pemerintah yang baik dan reformasi birokrasi, serta dalam rangka meniadakan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang mewajibkan seluruh instansi Pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat ini merupakan laporan terhadap pencapaian kinerja selama kurun waktu 1 tahun, yang dianalisa dengan rencana kerja yang mengacu kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat tahun 2023, dengan ditetapkan dua program yaitu Program Penegakan dan Pelayanan Hukum untuk menjalankan tugas dan fungsi Utama Mahkamah Agung sekaligus memenuhi agenda pembangunan hukum yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024 serta Program Dukungan Manajemen yang ditujukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Mahkamah Agung.

Sebagai gambaran umum capaian kinerja Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat Tahun 2023 digambarkan sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

TABEL RE.1
CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS 1

Sasaran program	Indikator	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	2	3	4	5
Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.	Persentase penyelesaian perkara tepat waktu	100	100	100
	Persentase perkara yg tidak mengajukan upaya hukum Kasasi.	50	-100	-50
	Indeks Persepsi Stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan.	85	89,55	105,35
Nilai Rata-rata Sasaran Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.				85,12

2. Sasaran Strategis 2 : Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

TABEL RE.2
CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS 2

Sasaran program	Indikator	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	2	3	4	5
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.	Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu.	100	100	100
Nilai Rata-rata Sasaran Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.				100

3. Capaian Realisasi Anggaran

Untuk mewujudkan 2 sasaran tersebut diatas, didukung dengan anggaran Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat tahun 2023 dengan realisasi sampai dengan 31 Desember Tahun 2023 dirinci sebagai berikut:

TABEL RE.3
PAGU ANGGARAN BELANJA UNIT BUA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PAPUA BARAT TA 2023

JENIS BELANJA	DATA PAGU UNIT BUA			
	PAGU AWAL	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	JUMLAH ANGGARAN
1	2	3	4	5
Belanja Pegawai	2.000.000.000,-	8,248,215,000,-	0,-	10,248,215,000,-
Belanja Barang	1.790.101.000,-	50.487.000,-	0,-	1.840.588.000,-
Belanja Modal	0,-	1,124,970,000,-	0,-	1,124,970,000,-
JUMLAH	3.790.101.000,-	9.423.672.000,-	0,-	13.213.773.000,-

TABEL RE.4
REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA UNIT DITJEN BADILAG
PENGADILAN TINGGI AGAMA PAPUA BARAT TAHUN 2023

U R A I A N	31 DESEMBER TA 2023		
	PAGU	REALISASI	%
Belanja Pegawai	0	0	0
Belanja Barang	83.179.000	82.612.000	99,32%
Belanja Modal	0	0	0
Total Belanja Bruto	83.179.000	82.612.000	99,32%
Pengembalian Belanja	0	0	0
Total Belanja Netto	83.179.000	82.612.000	99,32%

BAB I

PENDAHULUAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah atau LKjIP merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban yang wajib disajikan oleh setiap lembaga pemerintahan tak terkecuali Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat dalam kurun waktu satu tahun berjalan atas penyelenggaraan kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan pertanggungjawaban Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat kepada Mahkamah Agung selaku eselon I dan sebagai transparansi informasi kepada masyarakat serta sebagai bahan evaluasi/ feedback untuk perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

1. Latar Belakang

Reformasi sistem peradilan sebagai konsekuensi konstitusional atas pilihan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara yang dikelola dalam kerangka negara hukum, telah membawa perubahan yang mendasar bagi peran badan peradilan termasuk Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat yang merupakan bagian dari badan peradilan agama dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, dibidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan.

Mahkamah Agung sebagai pemegang kekuasaan kehakiman dan peradilan negara tertinggi yang mempunyai posisi dan peran strategis dengan membawahi 4 (empat) lingkungan peradilan telah banyak mengeluarkan kebijakan reformasi/ pembaruan guna mewujudkan badan peradilan sebagai lembaga yang professional, efektif, efisien, transparan serta akuntabel.

Komitmen reformasi sistem peradilan dimulai sejak terbitnya Cetak Biru (Blue Print) Mahkamah Agung tahun 2010-2035. Mahkamah Agung sejak saat itu telah berkomitmen menjadi lembaga negara yang sangat terbuka terhadap keterlibatan masyarakat sipil dalam proses pembaruan. Dengan keterbukaan itu, sangat banyak program pembaruan dilakukan. Biaya, pemikiran, dan tenaga dalam jumlah besar dicurahkan oleh elemen masyarakat sipil yang bahu membahu dengan champion pembaruan dari internal Mahkamah Agung. Kebijakan-kebijakan terobosan yang mendukung transparansi, akuntabilitas, dan modernisasi yang berhasil dibentuk, menunjukkan komitmen figur Pimpinan Mahkamah Agung yang menginginkan peradilan baru terus berkembang. *Hal ini berangkat dari kesadaran akan tanggung jawab konstitusional yang melekat pada institusi Mahkamah Agung, dimana Penegakan hukum dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara*

merupakan tugas yang berat, olehnya harus dilakukan dengan serius. Karena kebenaran dan keadilan adalah instrumen penting dalam kehidupan masyarakat yang maju dan modern. mengimplementasikan Cetak Biru (Blue Print) tersebut.

Sejalan dengan kebijakan Cetak Biru (Blue Print) Pembaruan Peradilan tahun 2010-2035 Mahkamah Agung tersebut diharapkan bisa menjadi sebuah pedoman/arah dan pendekatan yang akan ditempuh untuk mengembalikan citra Mahkamah Agung serta badan-badan peradilan di bawahnya sebagai lembaga yang terhormat dan dihormati. Karena itulah Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama selaku badan peradilan dibawah Mahkamah Agung memiliki komitmen penuh untuk mengimplementasikan Cetak Biru (Blue Print) tersebut. Komitmen ini diwujudkan dengan menetapkan program prioritas pembaruan dilingkungan peradilan agama yaitu:

1. Penyelesaian perkara yang tepat waktu melalui implementasi SIPP;
2. Pengelolaan website demi keterbukaan informasi publik;
3. Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) dan Pembangunan Zona Integritas menuju (WBK) dan (WBBM);
4. Justice for All yang terdiri dari Pembebasan Biaya Perkara, Sidang diluar Gedung Pengadilan dan Pos Layanan Hukum, serta program pengembangan inovasi di lingkungan peradilan agama.

Reformasi sistem peradilan tentunya juga menjadi patokan yang mendasar bagi peran Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, dibidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat merupakan lingkungan Peradilan di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tingkat banding yang diterima setelah putus di tingkat pertama.

Oleh karena itu, sebagai konsekuesi negara hukum dan Reformasi system peradilan yang telah dan akan terus berjalan, menghendaki pertanggungjawaban dari semua yang terlibat dalam penyelenggaraan Negara di bidang peradilan. Pertanggungjawaban tersebut lekat dengan istilah-istilah responsibility, transparency dan accountability, yang dalam penerapannya saat ini salah satunya melalui instrumen sistem pelaporan yang menjadi kewajiban seluruh instansi penyelenggara negara tak terkecuali Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat.

2. Kedudukan, Tugas Dan Fungsi

Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat adalah pengadilan tingkat banding yang baru dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2021 tentang *Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Bali, Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat, Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, dan Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara*, yang diresmikan beroperasinya oleh Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Desember 2022.

Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat merupakan salah satu pengadilan tingkat banding dibawah Mahkamah Agung RI yang berkedudukan di Manokwari selaku Ibu Kota Provinsi Papua Barat dengan wilayah yurisdiksi yang terdiri dari dua wilayah provinsi yakni Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya yang secara keseluruhan meliputi 12 Kabupaten dan 1 Kota sebagai berikut:

1. Kabupaten Manokwari;
2. Kota Sorong;
3. Kabupaten Fakfak;
4. Kabupaten Kaimana;
5. Kabupaten Sorong;
6. Kabupaten Sorong Selatan;
7. Kabupaten Raja Ampat;
8. Kabupaten Maybrat;
9. Kabupaten Tambora;
10. Kabupaten Teluk Bintuni;
11. Kabupaten Manokwari Selatan;
12. Kabupaten Pegunungan Arfak;
13. Kabupaten Teluk Wondama.

serta membawahi 4 (empat) Pengadilan Agama pada kedua wilayah provinsi tersebut yakni Pengadilan Agama Manokwari, Pengadilan Agama Sorong, Pengadilan Agama Fakfak dan Pengadilan Agama Kaimana.



Gambar 1. Peta Wilayah Yurisdiksi PTA Papua Barat

Sebagai salah satu lembaga peradilan yang melaksanakan kewenangan kekuasaan kehakiman (yudikatif), Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara yang diajukan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, dan telah direvisi oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, serta diperbaiki kembali melalui Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan secara *lex specialis* pada pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Adapun fungsi dari Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat antara lain:

1. Memberikan pelayanan teknis yustisial bagi perkara banding pelayanan di bidang administrasi perkara banding dan administrasi peradilan lainnya.
2. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam pasal 52 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
3. Mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan perilaku Hakim, Panitera, Sekretaris dan Jurusita di daerah hukumnya. Mengadakan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat Pengadilan Agama dan menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya.
4. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama.
5. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti hisab rukyat dan sebagainya.
6. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada satker dibawahnya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi perencanaan/teknologi informasi, umum/ perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan.
7. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan.

C. Struktur Organisasi.

[illegible]

Dalam menyelenggarakan kewenangan, tugas pokok dan fungsi kelembagaan, Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat terbagi dalam beberapa struktur dan kotak jabatan yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Ketua, membina, mengkoordinir dan memimpin penyelenggaraan tugas bidang teknis dan administrasi pengadilan (administrasi perkara dan kesekretariatan).
2. Wakil Ketua, melaksanakan tugas Ketua apabila Ketua berhalangan dan melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Ketua kepadanya.
3. Majelis Hakim, memeriksa dan mengadili berkas perkara banding yang telah diputus pada tingkat pertama. Melaksanakan pembinaan dan mengawasi bidang dan tugas tertentu yang ditugaskan oleh pimpinan.
4. Panitera, menyelenggarakan di bidang teknis peradilan (administrasi perkara) dan tugas lain berdasarkan peraturan yang berlaku.
5. Panitera Muda Banding, membantu panitera dalam menyelenggarakan administrasi perkara banding.
6. Panitera Muda Hukum, membantu panitera melakukan urusan data perkara, statistik dan membuat laporan perkara.
7. Panitera Pengganti, membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan dan Menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda bila telah selesai dimutasi;
8. Sekretaris, menyiapkan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran, pelaksanaan urusan kepegawaian, pelaksanaan urusan keuangan, menyiapkan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana, pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik, pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat dan perpustakaan, penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta laporan dilingkungan kesekretariatan;
9. Kabag. Perencanaan dan Kepegawaian, melaksanakan pelaksanaan perencanaan dan kepegawaian;
10. Kabag. Umum dan Keuangan, Melaksanakan kegiatan keuangan dan urusan rumah tangga kantor;
11. Kasubag. Rencana Program dan Anggaran, Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan, program dan anggaran;
12. Kasubag. Keuangan, melaksanakan urusan dan pengelolaan keuangan kantor;
13. Kasubag. Urusan Rumah Tangga, melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat dan perpustakaan;

Kasubag Kepegawaian dan TI, Organisasi, dan Tata Laksana, melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tatalaksana serta pengelolaan teknologi informasi.

D. Sistematika Penyajian Laporan.

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat selama Tahun 2023. Capaian kinerja (*performance results*) tersebut merupakan perbandingan antara realisasi kinerja dengan target kinerja yang telah tertuang dalam penetapan kinerja (*performance agreement*), maka penetapan kinerja yang telah ditetapkan di awal tahun 2023 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi pada tahun 2023. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini dapat mengidentifikasi sejumlah celah kinerja (*performance gap*) untuk perbaikan kinerja di masa yang akan datang. Untuk mewujudkan hal yang dimaksud, sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat disusun sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan.

Pada bab ini menjelaskan secara singkat latar belakang, kedudukan, tugas pokok dan fungsi serta struktur organisasi Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat.

Bab II Perencanaan Kinerja.

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ ikhtisar Perencanaan Kinerja dari Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat tahun 2020-2024 serta Penetapan Kinerja Tahun 2023.

Bab III Akuntabilitas Kinerja.

Pada bab ini menjelaskan analisis arah kebijakan dan strategi, pencapaian kinerja Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat dikaitkan dengan pertanggungjawaban public terhadap pencapaian sasaran strategis untuk Tahun 2023 dan uraian realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi.

Bab IV Penutup.

Pada bab ini diuraikan Kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat tahun 2023 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Lampiran-Lampiran.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis (RENSTRA) 2020 – 2024

Rencana strategis merupakan dokumen perencanaan unit organisasi sebagai bentuk penjabaran tugas pokok dan fungsi dari organisasi. Rencana Strategis Tahun 2020-2024 merupakan tahap ketiga dari rencana jangka menengah yang dicanangkan Mahkamah Agung RI dalam “Blue Print (cetak biru) Pembaharuan Peradilan 2010-2035” meskipun bagi Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, Tahun 2023 merupakan tahun kinerja pertama sejak beroperasi pada tanggal 5 Desember Tahun 2022. Perencanaan jangka menengah Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan tugas, fungsi dan peran yang diamanahkan.

Tahun 2023 merupakan tahun pertama dari Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat yang menguraikan gambaran kinerja dan rencana kinerja dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sebagai proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan.

Rencana strategis Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat Tahun 2020-2024 merupakan komitmen Bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

1. Visi dan Misi

Visi merupakan gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita atau bahkan sebagai lembaga peradilan maka visi dimaknai lebih filosofis sebagai arah mewujudkan tujuan hukum (rechtsidea) melalui kewenangan Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat. Visi berkaitan dengan pandangan ke depan yang menyangkut kemana Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat akan dibawa dan diarahkan secara konsisten, antisipatif, inovatif berdasarkan needed (dibutuhkan) stkeholder yakni para justitiabelen (pencari keadilan).

Untuk periode 2023-2024, Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat berharap visi dapat memberikan arah yang akan ditempuh oleh Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat dan dapat

mengartikulasikan sosok organisasi secara utuh yang selaras dengan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang bersesuaian dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020-2024, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020-2024. Untuk itu, renstra 2020-2024 sisa waktu 2023-2024 sebagai penjabaran dari visi Mahkamah Agung RI, Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat menetapkan visi :

“TERWUJUDNYA PENGADILAN TINGGI AGAMA PAPUA BARAT YANG AGUNG”

Untuk mencapai visi dan Misi tersebut Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat menetapkan misi sebagai berikut:

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat;
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada Masyarakat Pencari Keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat;

2. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat berusaha mengidentifikasi apa yang akan dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi Visi dan Misinya dalam memformulasikan tujuan strategis ini dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat untuk mengukur sejauh mana Visi dan Misi telah dicapai, mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan Visi dan Misi organisasi. Rumusan tujuan tersebut sebagai berikut:

- a. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
- b. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara;

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2020-2024 tersebut di atas serta dalam rangka mewujudkan Visi Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, maka Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat menetapkan Sasaran

Strategis dengan indikatornya yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) lembaga dan Sasaran Strategis tambahan yang merupakan sasaran pendukung tercapainya IKU, yaitu sebagai berikut:

- a. Terwujudnya peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, dengan indikator:
 - Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu;
 - Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi;
 - Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan.
- b. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara, dengan indikator:
 - Persentase Salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan pengaju tepat waktu.

3. Program Utama dan Kegiatan Pokok

Mengacu pada tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat menetapkan rincian program dan kegiatan pokok sebagai berikut:

a. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

Program penegakan dan pelayanan hukum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara dan pembinaan serta pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok dalam pelaksanaan program penegakan dan pelayanan hukum yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat adalah:

- Penyelesaian perkara banding
- Penelitian berkas perkara banding yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu;
- Registrasi dan pendistribusian berkas perkara banding ke majelis hakim yang tepat waktu;
- Pemanfaatan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) secara terukur dan akuntabel;
- Pembinaan dan Pengawasan ke Pengadilan Agama se- wilayah Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat;
- Implementasi dan Pendampingan Zona Integritas (ZI) untuk peningkatan kualitas pelayanan dan manajemen peradilan;
- Pelaksanaan bimbingan teknis untuk kepaniteraan.

b. Program Dukungan Manajemen

Program dukungan manajemen merupakan program yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian sasaran strategis untuk pengelolaan sumber daya manusia yang berkualitas, pengelolaan operasional perkantoran dengan baik, aksesibilitas masyarakat terhadap

peradilan dan penyediaan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan prima peradilan. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dilaksanakan dilaksanakan Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat dalam program ini adalah:

1. Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi, yaitu:
 - Penyediaan kebutuhan operasional terkait penyelesaian perkara dan pelayanan informasi pengadilan ke publik;
 - Meningkatkan pengelolaan layanan sistem informasi terintegrasi;
 - Pelaksanaan bimbingan teknis Kesekretariatan.
2. Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung, yaitu kegiatan penyediaan sarana dan prasarana guna memudahkan para pencari keadilan/masyarakat dalam pengelolaan layanan informasi baik informasi perkara maupun informasi lainnya secara pasti, transparan dan akuntabel melalui penyediaan informasi berbasis web maupun secara langsung (melalui meja informasi pengadilan).

Sejalan dengan arahan dalam Cetak Biru Pembaharuan Peradilan 2010-2035, penetapan rencana strategis sangat erat kaitannya dengan indikator-indikator sasaran sesuai dengan IKU yang telah ditetapkan oleh Sekretaris Mahkamah Agung RI. Adapun analisa keterkaitan antara cetak biru dengan rencana strategis PTA Papua Barat adalah sebagai berikut:

TABEL 2.1
ANALISA KETERKAITAN CETAK BIRU PEMBARUAN PERADILAN 2010-2035
TERHADAP RENSTRA PTA PAPUA BARAT 2020-2024

NO	ARAHAN PEMBARUAN	CETAK BIRU MAHKAMAH AGUNG	RENSTRA PTA PAPUA BARAT
1	Arahan Pembaruan Fungsi Teknis	Pembatasan Perkara Kasasi dan PK	Meningkatkan Target Capaian setiap tahunnya pada Indikator "Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi" sebagai upaya peningkatan kinerja penyelesaian perkara pada tingkat banding melalui peningkatan kualitas putusan dan memilah perkara berdasarkan jenis dan kompleksitas perkara serta menjadikan Tingkat Banding sebagai peradilan tingkat akhir bagi perkara tertentu.
2	Arahan Pembaruan Manajemen Perkara	Penataan Ulang Manajemen Perkara	Mendorong dan menjaga tingkat produktivitas penanganan perkara dalam rangka meningkatkan capaian kinerja khususnya pada Indikator Kinerja "Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu" melalui mekanisme evaluasi kinerja secara rutin

			pada semua tahapan penanganan perkara sesuai kewenangan majelis hakim.
			Meningkatkan efisiensi penyelesaian minutasasi perkara dengan pengiriman softcopy dokumen Pengadilan Tingkat Pertama dan penggunaan template putusan untuk mempercepat pengetikan putusan, sehingga indikator kinerja "Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat
3	Arahan Pembaruan Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM)	sistem pengelolaan SDM berbasis kompetensi	Indikator Kinerja "Indeks persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan" erat kaitannya dengan layanan yang telah diberikan kepada stakeholder terkait kompetensi dari SDM aparatur pengadilan baik itu terkait layanan teknis yustisial maupun layanan pendukung (administratif). Manajemen SDM diposisikan sebagai aspek strategis dan terpadu dengan visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi serta kompeten khususnya dalam memberikan pelayanan yang prima bagi stakeholder terkait.

Berdasarkan analisa keterkaitan Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 terhadap Renstra Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat tersebut, maka penetapan program dan kegiatan Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat disusun sebagaimana Matrik Rencana Strategis 2020-2024 Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat sebagai berikut:

TABEL 2.2
MATRIKS REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

NO	TUJUAN		TARGET JANGKA MENENGAH (5 THN) %	SASARAN STRATEGIS		TARGET %				
	Uraian	Indikator Kinerja	%	Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu	100	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu	-	-	-	100	100
		Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi	100		Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi	-	-	-	50	75
		Indeks persepsi stakeholder	100		Indeks persepsi stakeholder	-	-	-	85	90

		yang puas terhadap layanan peradilan			yang puas terhadap layanan peradilan					
2.	Terwujudnya Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	100	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	-	-	-	100	100

B. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah tolak ukur utama keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan organisasi. Indikator Kinerja Utama (IKU) ditetapkan dengan memilih indikator-indikator kinerja yang ada dalam Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat Tahun 2020-2024 yang fokus utamanya adalah penyelenggaraan core bussines (tugas utama).

Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) melalui Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat Nomor: W31-A/108.a/OT.01.1/I/2023 tanggal 16 Januari 2023 Tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat Tahun 2023 (sebagaimana terlampir), dengan mengacu pada Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 173/SEK/SK/I/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Berikut matrik Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat Tahun 2023:

TABEL 2.3
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN TINGGI AGAMA
PAPUA BARAT TAHUN 2023

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	a. Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100$ Catatan : - SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan. - Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			- Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Banding paling lambat 3 (tiga) bulan. - Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.		
		b. Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi	Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi $\times 100$ Jumlah Perkara yang diselesaikan Catatan : - Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi dari upaya hukum banding. - Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. - Upaya hukum kasasi dinyatakan mulai adanya akta pernyataan kasasi.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Indeks persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradila n	Indeks Persepsi Kepuasan Stakholder Catatan : - PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Sekretaris Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. - Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus > 80. - Stakeholder adalah semua pemangku kepentingan yang menerima layanan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	Jumlah Salinan Putusan yang dikirim tepat waktu $\times 100$ Jumlah Putusan yang dikirim Catatan : - Jumlah salinan putusan yang dikirim tepat waktu adalah jumlah Salinan putusan/penetapan yang dikirim ke pengadilan pengaju sesuai dengan ketentuan. - Jumlah putusan yang dikirim adalah jumlah putusan/penetapan banding yang sudah diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

C. Rencana Kinerja Tahun 2023

Rencana kinerja Tahun 2023 ini disusun dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 173/SEK/SK/I/2022

tanggal 31 Januari 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung RI. Rencana Kinerja Tahun 2023 Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat merupakan implementasi rencana pencapaian dari pengukuran Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, dan juga merupakan rencana tahapan tahun pertama dari Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat Tahun 2020-2024 yang disusun pertama kalinya pada Tahun 2023, rencana kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 2.4
RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) PENGADILAN TINGGI AGAMA
PAPUA BARAT TAHUN 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target %
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu	100
		Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi	50
		Indeks persepsi <i>stakeholder</i> yang puas terhadap layanan peradilan	85
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	100

Sebagai satuan kerja yang baru dibentuk penyusunan target rencana Kinerja Tahun 2023 pada Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat tersebut didasarkan pada hasil analisis dan evaluasi capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya pada satker induk dengan memperhatikan capaian kinerja pada pengadilan tingkat pertama dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat tahun-tahun sebelumnya, sehingga memunculkan target-target yang rasional dan dapat dipertanggungjawabkan.

D. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja adalah pernyataan yang merupakan komitmen bersama untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu 1 (satu) tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Perjanjian kinerja ini merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas pada akhir tahun 2023.

Penyusunan penetapan kinerja ini didasarkan pada Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Acuan dalam menyusun Penetapan Kinerja Tahun 2023 juga tidak terlepas dari “cetak Biru dan Renstra Mahkamah Agung 2010-2035” yang telah menjadi tekad segenap unsur Pimpinan Mahkamah Agung, Pimpinan Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama seluruh Indonesia dari 4 (empat) lingkungan peradilan untuk diwujudkan. Adapun Perjanjian Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat adalah sebagai berikut:

TABEL 2.5
PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN (PKT) PENGADILAN TINGGI AGAMA
PAPUA BARAT TAHUN 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target %
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu	100
		Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi	50
		Indeks persepsi <i>stakeholder</i> yang puas terhadap layanan peradilan	85%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	100

Dengan Rincian kegiatan anggaran sebagai berikut :

- | | | | |
|----|---|-----|----------------|
| 1. | Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi | Rp. | 12,117,682,000 |
| 2. | Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung | Rp. | 1,124,970,000 |
| 3. | Peningkatan Manajemen Peradilan Agama | Rp. | 83,179,000 |

Perjanjian kinerja Tahun 2023 di atas merupakan pengejawantahan dari rencana kinerja Tahun 2023 yang telah ditetapkan, sehingga menjadi suatu dokumen yang lebih bersifat operasional yang siap untuk diwujudkan dengan dukungan sumber daya manusia, anggaran serta fasilitas kerja dan pelayanan publik yang memadai.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat Tahun 2023

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Presiden RI (PERPRES) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disebutkan bahwa Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP, adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Lebih teknisnya dalam penyusunan Laporan Kinerja mengacu pada Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pertanggungjawaban sumber daya publik (*public resources*) ini merupakan kunci dari proses pengelolaan negara serta merupakan elemen yang utama bagi demokrasi yang sehat. Pihak legislatif, eksekutif dan masyarakat sangat ingin mengetahui, apakah pelayanan pemerintah/lembaga negara kepada masyarakat telah dilaksanakan secara efisien, efektif, ekonomis serta telah menaati hukum dan aturan yang ada.

Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat sebagai salah satu lembaga penegak hukum (*yudikatif*) dalam upaya mewujudkan cita-cita pemerintah Indonesia yaitu pemerintahan yang baik (*good governance*), telah berupaya mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja ke arah terwujudnya lembaga peradilan yang baik dan terpercaya. Secara operasional sasaran yang diinginkan dalam akuntabilitas kinerja adalah menjadikan Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat dan satker di bawahnya sebagai satker yang menjunjung tinggi akuntabilitas dalam setiap kinerjanya, berorientasi pada pelayanan masyarakat, transparan, dipercaya masyarakat, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan penegakan hukum.

Laporan ini diharapkan menjadi media evaluasi secara bertahap terhadap pelaksanaan kinerja Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, sehingga dapat dijadikan bahan koreksi kinerja lembaga sedini mungkin dan bahan perbaikan kinerja selanjutnya, baik reviu perumusan kebijakan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, akuntabilitas kinerja, serta tindak lanjut atas evaluasi, berupa perbaikan atau pemecahan atas masalah yang dihadapi secara berkelanjutan.

Salah satu wujud dalam akuntabilitas kinerja adalah melakukan pengukuran kinerja kegiatan yaitu mengukur tingkat capaian kinerja kegiatan yang dimulai dengan menetapkan indikator kinerja kegiatan berdasarkan kelompok *inputs*, *outputs* dan *outcomes*, menentukan satuan setiap kelompok indikator, menetapkan rencana tingkat capaian (*target*), mengetahui realisasi dan capaian indikator kinerja kegiatan untuk mendapatkan persentasenya.

Capaian kinerja Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat tahun 2023 merupakan pencapaian atas target yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang merupakan Rencana Strategis tahun ketiga dalam Renstra 2020-2024 meskipun bagi Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat selaku satuan kerja yang baru diresmikan pada desember 2022, tahun 2023 merupakan tahun pertama penyelenggaraan kinerja.

Capaian kinerja diukur dengan cara membandingkan antara Realisasi pencapaian indikator kinerja dengan Target yang telah ditetapkan, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak, yaitu dengan menggunakan alat ukur seperti tersebut dibawah ini :

$$\text{Tingkat Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Pengukuran capaian kinerja dalam rangka untuk meningkatkan kinerja harus dilakukan dengan menggunakan manajemen pengukuran yang baik dan tepat. Manajemen pengukuran capaian tersebut harus menggambarkan skema siklus dan tahapan-tahapan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi yang setiap tahapan dan hasil evaluasi kinerja per tahapannya menjadi feedback bagi tahapan perencanaan berikutnya. Manajemen pengukuran kinerja tersebut diperlukan agar upaya-upaya peningkatan kinerja tertata dengan baik dalam siklus tahapan kerja yang tidak terputus, sehingga terbangun budaya kerja yang berorientasi pada proses dan hasil.

Pengukuran capaian kinerja berdasarkan alat ukur sebagaimana disebutkan diatas selanjutnya dikategorikan dengan skala penilaian sebagai berikut:

- 0-60 : kurang
- 60-75 : Cukup
- 76-90 : Baik
- 91-100 : Sangat Baik
- > 100 : Excellent

Skala penilaian tersebut dijadikan sebagai acuan bagi PTA Papua Barat untuk merumuskan strategi pemecahan masalah atas capaian yang tidak sesuai dengan target perencanaan.

Berdasarkan manajemen pengukuran kinerja yang disebutkan diatas, capaian kinerja Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat tahun 2023 secara umum dapat diuraikan sebagaimana tersebut pada tabel berikut :

TABEL 3.1
PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA PENGADILAN TINGGI AGAMA PAPUA BARAT
TAHUN 2023

Sasaran program	Indikator	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	2	3	4	5
Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.	Persentase penyelesaian perkara tepat waktu	100	100	100
	Persentase perkara yg tidak mengajukan upaya hukum Kasasi.	50	-100	-50
	Indeks Persepsi Stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan.	85	89,55	105,35
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.	Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu.	100	100	100

Rekapitulasi pengukuran capaian kinerja Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat berdasarkan uraian tabel diatas menggambarkan bahwa pada Tahun 2023 dari 4 (empat) indikator kinerja yang dievaluasi, terdapat 3 (tiga) indikator kinerja yang mencapai bahkan melebihi target namun terdapat 1 (satu) indikator yang capaiannya jauh dibawah target. Analisis dan penjelasan lebih lanjut dari capaian kinerja masing- masing sasaran dan indikatornya diuraikan sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1 :

TERWUJUDNYA PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL

Capaian kinerja pada sasaran strategis Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel secara rinci sebagaimana pada tabel berikut ini :

TABEL 3.2
CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS 1

Sasaran program	Indikator	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	2	3	4	5

Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.	Persentase penyelesaian perkara tepat waktu	100	100	100
	Persentase perkara yg tidak mengajukan upaya hukum Kasasi.	50	-100	-50
	Indeks Persepsi Stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan.	85	89,55	105,35

Tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa 2 (dua) dari 3 (tiga) indikator kinerja sasaran strategis terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel di Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat mencapai bahkan melebihi target yang telah ditetapkan dan 1 (satu) indikator yang tidak memenuhi target. Berikut ini diuraikan analisis dan penjelasan dari masing-masing indikator:

Indikator Kinerja Pertama : Persentase Penyelesaian Perkara Tepat Waktu

a. Pengukuran Kinerja

Untuk mengukur capaian kinerja Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah sebagai berikut :

$$\text{CAPAIAN} = \frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$$

Realisasi perkara yang diselesaikan tepat waktu dapat dilihat pada matriks berikut:

TABEL 3.3
PERSENTASE PERKARA YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU

INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	INPUT	REALISASI/ (%)	CAPAIAN (%)
Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%	1 perkara	1 perkara (100%)	100 %

Indikator persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu ini mengukur perbandingan jumlah perkara tahun berjalan (jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah dengan sisa perkara tahun sebelumnya) yang diputus tahun berjalan dengan Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu pada tahun berjalan. Yang dimaksud dengan perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diselesaikan paling lama dalam waktu 3 (tiga) bulan sesuai ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung No 2 Tahun 2014.

Pada tahun 2023 Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat menerima perkara sebanyak 1 perkara dan yang berhasil diselesaikan sebanyak 1 perkara. Rincian data keadaan perkara dapat dilihat dari tabel keadaan perkara dibawah ini :

TABEL 3.4
DATA KEADAAN PERKARA YANG DIPUTUS TAHUN 2023

NO	JENIS PERKARA	SISA THN 2021	TERIMA THN 2022	BEBAN	PUTUS	SISA AKHIR
1	2	3	4	5	6	7
1	Izin Poligami	-	-	-	-	-
2	Pencegahan Perkawinan	-	-	-	-	-
3	Penolakan Perkawinan oleh PPN	-	-	-	-	-
4	Pembatalan Perkawinan	-	-	-	-	-
5	Kelalaian Kewajiban Suami/Istri	-	-	-	-	-
6	Cerai Talak	-	-	-	-	-
7	Cerai gugat	-	-	-	-	-
8	Harta Bersama	-	-	-	-	-
9	Penguasaan Anak/Hadlonah	-	-	-	-	-
10	Nafkah Anak oleh Ibu	-	-	-	-	-
11	Hak-Hak Bekas Istri	-	-	-	-	-
12	Pengesahan Anak/Pengangkatan Anak	-	-	-	-	-
13	Pencabutan Hak Orang Tua	-	-	-	-	-
14	Perwalian	-	-	-	-	-
15	Pencabutan Kekuasaan Wali	-	-	-	-	-
16	Penunjukan Orang Lain Sebagai Wali	-	-	-	-	-
17	Ganti Rugi terhadap Wali	-	-	-	-	-
18	Asal Usul Anak	-	-	-	-	-
19	Penolakan Kawin Campur	-	-	-	-	-
20	Isbath Nikah	-	-	-	-	-
21	Izin Kawin	-	-	-	-	-
22	Dispensasi Kawin	-	-	-	-	-
23	Wali Adhol	-	-	-	-	-
24	Ekonomi Syariah	-	-	-	-	-
25	Kewarisan	-	1	1	1	0
26	Wasiat	-	-	-	-	-
27	Hibah	-	-	-	-	-
28	Wakaf	-	-	-	-	-
29	Zakat/Infaq/Shodaqoh	-	-	-	-	-
30	Penetapan Ahli Waris	-	-	-	-	-
31	Lain-Lain	-	-	-	-	-
JUMLAH		-	1	1	1	0

Dari jumlah perkara yang putus tahun 2023, secara keseluruhan (100%) berhasil diselesaikan tepat waktu sesuai ketentuan SEMA No 2 Tahun 2014 yaitu paling lama 3 (tiga) bulan dengan tingkat capaian sebesar **100%**. Dengan demikian target penyelesaian perkara pada Indikator persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu sebesar 100 % **tercapai**.

Dengan tercapainya target pada indikator penyelesaian perkara yang diselesaikan tepat waktu, maka **outcome** yang dihasilkan adalah kepastian hukum yang lebih cepat bagi para pihak berperkara dan menunjukkan kinerja aparaturnya Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat dalam memberikan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.

b. Dukungan Sumber Daya Manusia (SDM)

• **Dukungan Sumber Daya Manusia (SDM)**

Keberhasilan tercapainya target penyelesaian perkara tepat waktu dipengaruhi oleh factor sumber daya manusia pendukung, diantaranya :

1. Sumber daya manusia tenaga teknis pada Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat yang memadai yaitu jumlah Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat sebanyak 14 (Empat belas) orang Hakim Tinggi termasuk Ketua dan Wakil Ketua, dibantu Panitera Muda Banding dan Panitera Muda Hukum yang berperan juga sebagai Panitera Sidang termasuk tenaga IT 1 orang telah mampu mendorong penyelesaian perkara tepat waktu yaitu kurang dari 3 bulan sesuai dengan Perma 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Tingkat Pertama dan Tingkat Banding;
2. Adanya Sumber Daya Manusia tenaga teknis yang memiliki komitmen yang kuat untuk menyelesaikan tugas pokok penyelesaian perkara tepat waktu sesuai SOP yang telah ditetapkan, juga menjadi modal dasar pencapaian target kinerja yang telah diperjanjikan dapat dicapai dengan maksimal dan tepat waktu;

• **Dukungan Anggaran**

Dalam upaya pencapaian target kinerja ataupun kegiatan dukungan anggaran merupakan sebuah kemestian terlebih dalam penyelesaian perkara perdata terdapat azas Ada Perkara Ada Biaya. Dalam pencapaian target kinerja indikator penyelesaian perkara tepat waktu dibiayai dengan biaya proses perkara sebagai biaya langsung yang disetor oleh para pihak berperkara yaitu biaya proses/ATK perkara banding sebesar Rp. 150.000,-/Perkara sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2012 tentang biaya proses penyelesaian perkara dan pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.. Dengan perkara banding yang ditangani Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat pada tahun 2023 sebanyak 1 perkara, maka

telah disediakan biaya perkara sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Disamping biaya langsung, dalam rangka pencapaian target persentase penyelesaian perkara tepat waktu 100% dibiayai juga dengan biaya tidak langsung, yaitu biaya yang bersumber dari Dana DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi) Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat Tahun 2023 sebesar Rp. 13. (....) yang meliputi Biaya Operasional kegiatan seperti Gaji dan Tunjangan Hakim Tinggi dan pegawai sebesar Rp. (...), Biaya pemeliharaan sarana Gedung dan peralatan dan mesin, biaya sewa rumah dinas hakim dan biaya-biaya lainnya sebagai pendukung pencapaian kinerja secara menyeluruh.

c. Dukungan Sarana Prasarana

Sarana prasarana sebagai pendukung pencapaian target kinerja indicator Persentase penyelesaian perkara tepat waktu pada Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat telah tersedia berupa personal computer, laptop, printer, mesin foto copy, scanner. Walaupun jumlahnya relative sedikit satu computer untuk 3 (tiga) orang hakim, namun dengan volume perkara yang sedikit juga ketersediaan sarana computer yang ada masih mencukupi untuk menyelesaikan perkara, sehingga tidak menjadi kendala akibat keterbatasan jumlah computer yang ada saat ini.

d. Faktor Pendukung Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Target Kinerja

Keberhasilan pencapaian target kinerja persentase penyelesaian perkara tepat waktu disamping didukung dengan factor sumber daya manusia dan anggaran, juga terdapat kondisi lain yang mendukung keberhasilan dalam pencapaian target indicator kinerja tersebut, antara lain :

- Adanya system kerja yang terstruktur dan terkoordinasi dengan baik antara satu unit kerja dengan unit lainnya yang saling berhubungan;
- Adanya standar operasional prosedur (SOP) penyelesaian perkara banding yang jelas dan terkoordinasikan di setiap level pelaksana;
- Adanya monitoring kinerja penyelesaian perkara secara berkala baik secara manual maupun secara elektronik melalui aplikasi SIPP;
- Adanya komitmen yang kuat dari Majelis Hakim dan Panitera Pengganti dalam upaya pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan;
- Memiliki pemahaman yang sama tentang perencanaan kinerja yang sudah ditetapkan, sehingga tercipta sinergitas kerja yang kondusif;

- Adanya penilaian kinerja satker pada aplikasi SIPP terkait penyelesaian perkara oleh Ditjen Badilag;

e. Efisiensi Dalam Pencapaian Target Kinerja

Efisiensi kinerja dalam pencapaian target kinerja Persentase penyelesaian perkara tepat waktu pada Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat Tahun 2023 dapat dilihat dalam beberapa segi, antara lain :

- Efisiensi Waktu : Waktu penyelesaian perkara yang disediakan sesuai Perma 2 Tahun 2014 untuk perkara Tingkat banding adalah maksimal 3 bulan. Sedangkan Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat menyelesaikan perkara 50 Hari Kalender, sehingga terdapat efisiensi $50/90 \times 100\% = 0,55$ atau dapat menghemat waktu 50% dari waktu yang ditentukan;
- Efisiensi Sumber Daya Manusia maupun anggaran tidak dapat dilakukan efisiensi karena sebagai Pengadilan Tinggi Agama yang baru berdiri dengan Satker Pengadilan Agama yang hanya 4 satker dibawahnya relative sedikit perkara yang masuk, namun SDM yang ada terutama untuk tenaga Hakim lebih banyak dibanding dengan volume perkara yang harus diselesaikan. Hal ini karena merupakan kebijakan pimpinan pusat (Badilag) sebagai upaya pembelajaran awal bagi hakim baru ditempatkan di wilayah peloksosk/jauh dan di Pengadilan Tinggi Agama baru.

f. Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Capaian Tahun Sebelumnya

Sebagai satuan kerja yang baru beroperasi dan menjalankan kinerja pada tahun 2023, belum terdapat perbandingan capaian kinerja pada unit kerja yang sama di tahun-tahun sebelumnya, namun sebagai perbandingan capaian kinerja berikut ini disajikan data berdasarkan penanganan perkara banding pada Pengadilan Tinggi Agama Jayapura tahun 2022 yang Pengadilan Pengajunya adalah Pengadilan Agama yang saat ini berada dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat. Adapun data perbandingan penanganan perkara yang diputus tepat waktu tersebut diuraikan sebagai berikut:

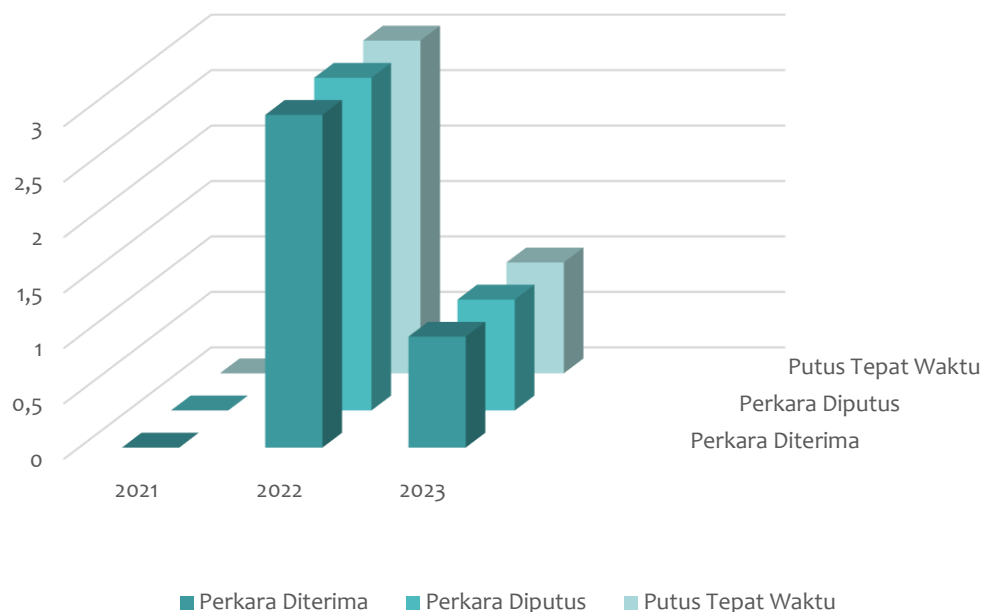
TABEL 3.5
PERBANDINGAN PERKARA YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU
TAHUN 2021 - 2023

THN	JUMLAH			TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAI AN (%)
	BEBAN PERKARA	PUTUS	PUTUS TEPAT WAKTU			
2021	0	0	0	100	100	100
2022	3	3	3	100	100	100

2023	1	1	1	100	100	100
------	---	---	---	-----	-----	-----

Berdasarkan perbandingan data pada tabel diatas, bahwa capaian kinerja pada indikator persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu menunjukan bahwa pada tahun 2023 capaian target kinerja indicator kinerja ini dibandingkan dengan penyelesaian perkara tepat waktu pada Pengadilan Tinggi Agama Jayapura tahun 2022 yang Pengadilan Pengajunya adalah Pengadilan Agama yang saat ini berada dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat sama-sama capaiannya 100% hanya berbeda jumlah perkara banding yang masuk.

GRAFIK 3.1
PERBANDINGAN PERKARA YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU
TAHUN 2021-2023



Capaian yang telah dicapai pada tahun 2023 ini telah sesuai dengan target yang diperjanjikan pada Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat untuk Tahun Kinerja 2023, sehingga dapat diartikan bahwa program-program dan kebijakan pimpinan terkait penyelesaian perkara pada Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat telah berjalan dengan efektif. Namun demikian perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan capaian pada indikator tersebut.

- g. Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Persentase Penyelesaian Perkara Tepat Waktu Tahun 2023 dengan Target Kinerja Jangka Menengah (Rencana Strategis) Tahun 2023.

Untuk menunjukkan adanya keberhasilan capaian target kinerja tahunan yang stabil atau bahkan cenderung meningkat, secara obyektif harus dibandingkan dengan target capaian persentase dalam Renstra tahun berkenaan dan rata-rata selama 5 tahunan, sehingga ada kesinambungan pencapaian target tahunan dengan target 5 tahunan kinerja dalam Renstra tersebut.

Berikut data target dan capaian indicator kinerja Jangka Menengah Tahun 2023 dan Target Tahun 2024 :

TABEL 3.6
DATA PERBANDINGAN TARGET DAN CAPAIAN TAHUN 2023
TERHADAP TARGET JANGKA MENENGAH

TAHUN 2023			TAHUN 2024
TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET
100%	100%	100%	100%

Berdasarkan data realisasi dan capaian diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2023 telah sesuai dengan target jangka menengah yang ditentukan pada Renstra Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat tahun 2020-2024. Apabila memperhatikan fluktuasi jumlah perkara pada setiap tahunnya yang cenderung stabil, maka target jangka menengah yang telah ditentukan akan tercapai oleh Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat pada tahun 2024 mendatang.

h. Upaya Peningkatan Kinerja Untuk Kinerja berikutnya

Dalam rangka upaya peningkatan kinerja untuk tahun berikutnya, berangkat dari capaian target kinerja indicator persentasi perkara yang diselesaikan tepat waktu yang telah mencapai 100%, maka upaya yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

- Mempertahankan dan melanjutkan system kerja yang sudah berjalan dengan baik;
- Memperkuat komitmen Hakim dan pegawai dalam memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat;
- Memperkuat monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala pada tahun yang akan datang;
- Melakukan pembinaan secara berkala baik pembinaan teknis maupun pembinaan mental kinerja pegawai;

Indikator Kinerja Kedua : Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi**a. Pengukuran Kinerja**

Untuk mengukur capaian kinerja Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi adalah sebagai berikut :

$$\text{CAPAIAN} = \frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi}}{\text{Jumlah Perkara Banding Yang diselesaikan}} \times 100\%$$

Realisasi target kinerja persentase perkara yang yg tidak mengajukan upaya hukum Kasasi dapat dilihat pada matriks berikut :

TABEL 3.7
PERSENTASE PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM KASASI

INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	INPUT	REALISASI/ (%)	CAPAIAN (%)
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	50%	1 perkara	0 perkara (-100%)	-50 %

Indikator persentase perkara yg tidak mengajukan upaya hukum Kasasi ini mengukur perbandingan jumlah perkara banding tahun berjalan (jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah dengan sisa perkara tahun sebelumnya) yang diputus tahun berjalan dengan Jumlah Perkara yg tidak mengajukan upaya hukum Kasasi pada tahun berjalan.

Pada tahun 2023, Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat hanya menangani 1 (satu) perkara dan berhasil diputus tepat waktu. Minimnya jumlah perkara tersebut berpengaruh besar terhadap persentase capaian pada Indikator persentase perkara yg tidak mengajukan upaya hukum Kasasi, karena satu-satunya perkara yang ditangani Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat tersebut mengajukan upaya hukum kasasi sehingga tingkat capaian pada indikator ini **tidak terpenuhi**. Dengan target kinerja sebesar 50% yang ditetapkan pada Indikator persentase perkara yg tidak mengajukan upaya hukum Kasasi dengan kondisi sebagaimana disebutkan diatas maka capaian pada indikator ini adalah sebesar **-50 % tidak tercapai**.

Perkara yang mengajukan Kasasi tersebut merupakan perkara Waris, telah diketahui bersama bahwa perkara-perkara pada Pengadilan Agama selain perkara Perceraian seperti Waris, Harta Bersama, Hak Asuh Anak, Ekonomi Syariah potensi mengajukan upaya hukum banding dan kasasi sangat besar. Besar kemungkinan keberhasilan

pencapaian target indikator ini di sebagian besar Peradilan Agama karena perkara yang diputus adalah perkara Perceraian, sedangkan untuk perkara selain perceraian sama cenderung adanya upaya hukum baik banding maupun kasasi sangat besar.

b. Dukungan Sumber Daya

- **Dukungan Sumber Daya Manusia**

Dalam upaya pencapaian target Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi pada Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat dukungan Sumber Daya Manusia sama dengan Indikator Pertama yaitu :

1. Sumber daya manusia tenaga teknis pada Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat yang memadai yaitu jumlah Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat sebanyak 14 (Empat belas) orang Hakim Tinggi termasuk Ketua dan Wakil Ketua, dibantu Panitera Muda Banding dan Panitera Muda Hukum yang berperan juga sebagai Panitera Sidang termasuk tenaga IT 1 orang.
2. Adanya Sumber Daya Manusia tenaga teknis yang memiliki komitmen yang kuat untuk menyelesaikan tugas pokok penyelesaian perkara tepat waktu sesuai SOP dan memiliki kualitas putusan yang tinggi hingga dapat memberikan kepuasan kepada para pencari keadilan;

Dukungan sumber daya manusia yang tersedia sebagaimana tersebut di atas menurut hemat kami tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pencapaian target persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi, karena para pihak kebanyakan **kepuasannya merasa sudah terpenuhi ketika perkaranya menang** sesuai harapan/tuntutan bukan terletak pada sejauhmana pertimbangan atau dalil-dalil hakim dalam memutus perkaranya. Dalam hal ini kami menganalisa bahwa justeru kesulitan untuk mencapai target kinerja ini karena indikator kinerja ini menuntut hemat kami **Tidak SMART karena kehenadak mengajukan banding atau kasasi atau tidaknya sepenuhnya ada di tangan para pihak, upaya yang dapat dilakukan oleh pelaksana peradilan hanya sebatas memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut kemampuan Hakim yang memutus perkaranya, sehingga indikator ini sulit diukur.**

Dengan demikian Sumber Daya Manusia Pengadilan secara kuantitas maupun kualitas sudah memadai untuk mendukung kinerja lebih baik.

- **Dukungan Anggaran**

Dalam upaya pencapaian target kinerja dukungan anggaran merupakan sebuah kemestian terlebih dalam penyelenggaraan kegiatan dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang diasumsikan dapat mendukung keberhasilan kinerja persentasi perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi.

Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya tenaga teknis di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat pada Tahun 2023 terdapat kegiatan Bimbingan Teknis bagi para pelaksana teknis peradilan dan pembinaan yang dibiayai dari DIPA Dirjen Badilag (DIPA 04) sebesar **Rp. 60.000.000,-** (Enam puluh juta rupiah). Dengan kegiatan tersebut yang dilaksanakan pada bulan September 2023 lalu telah menghasilkan output Peningkatan Kompetensi Hakim dan Tenaga Teknis Kepaniteraan pada Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama sewilayah PTA paoua Barat.

- **Dukungan Sarana dan Prasarana**

Sarana prasarana sebagai pendukung pencapaian target kinerja indicator PersentasePerkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi pada Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat telah tersedia berupa personal computer, laptop, printer, mesin foto copy, scanner. Walaupun jumlahnya relative sedikit satu computer untuk 3 (tiga) orang hakim, namun dengan volume perkara yang sedikit juga ketersediaan sarana computer yang ada masih mencukupi untuk menyelesaikan perkara, sehingga tidak menjadi kendala akibat keterbatasan jumlah computer yang ada saat ini.

c. Faktor Pendukung Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Target Kinerja

Target yang tidak tercapai pada Indikator persentase perkara yg tidak mengajukan upaya hukum Kasasi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya:

- Jumlah perkara banding yang diterima pada Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat tahun 2023 sangat minim dan hanya menerima 1 (satu) perkara dan satu-satunya perkara yang ditangani Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat tersebut mengajukan upaya hukum kasasi sehingga secara otomatis persentase capaian 100% tidak terpenuhi;
- Satu-satunya perkara yang ditangani Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat tersebut adalah Perkara Kewarisan yang memang berpotensi pada sulitnya para pihak untuk menerima putusan pengadilan meskipun telah ditangani secara objektif sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;

- Kepuasan atas putusan hakim dalam memutus perkara kebanyakan para pihak karena perkaranya menang, bagi mereka yang perkaranya kalah sangat bergantung pada mereka akan mengajukan kasasi atau tidak, artinya perkara itu kasasi atau tidak merupakan hak prerogative para pihak, tidak bisa dipastikan oleh pelaksana peradilan baik Hakim maupun tenaga teknis lainnya. Faktor ini menurut hemat kami yang sangat dominan berpengaruh terhadap ketidakberhasilan pencapaian target indicator ini dan dapat dikategorikan bahwa indicator ini tidak terukur (Unmeasurable);

f. Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Capaian Tahun Sebelumnya

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat adalah satuan kerja yang baru beroperasi dan menjalankan kinerja pada tahun 2023, pada indikator ini juga belum terdapat perbandingan capaian kinerja pada unit kerja yang sama di tahun-tahun sebelumnya, namun sebagai perbandingan capaian kinerja berikut ini disajikan data berdasarkan penanganan perkara banding pada Pengadilan Tinggi Agama Jayapura tahun 2022 yang Pengadilan Pengajunya adalah Pengadilan Agama yang saat ini berada dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat. Adapun data perbandingan Indikator persentase perkara yg tidak mengajukan upaya hukum Kasasi tersebut diuraikan sebagai berikut:

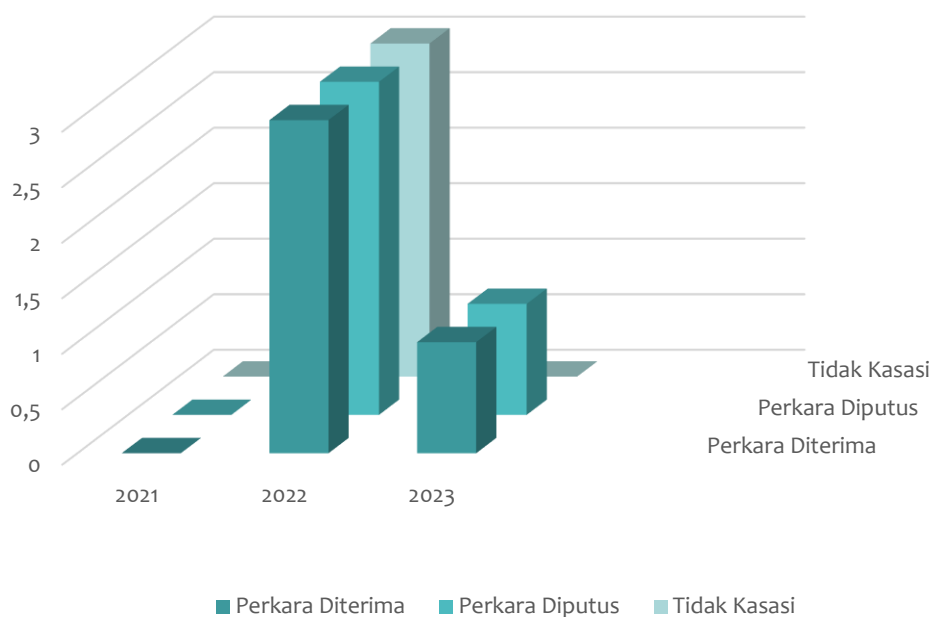
TABEL 3.8
PERBANDINGAN PERSENTASE PERKARA
YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM KASASI TAHUN 2021 - 2023

THN	JUMLAH			TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAI AN (%)
	BEBAN PERKARA	PUTUS	TIDAK MENGAJUKAN KASASI			
2021	0	0	0	100	100	100
2022	3	3	3	100	100	100
2023	1	1	0	50	0	-50

Berdasarkan perbandingan data pada tabel diatas, bahwa capaian kinerja pada Indikator persentase perkara yg tidak mengajukan upaya hukum Kasasi menunjukan bahwa pada tahun 2023 terdapat penurunan jumlah capaian pada Indikator persentase perkara yg tidak mengajukan upaya hukum Kasasi di Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat dibandingkan dengan indikator yang sama pada Pengadilan Tinggi Agama Jayapura tahun 2022 untuk perkara banding yang Pengadilan Pengajunya adalah Pengadilan Agama yang saat ini berada dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi

Agama Papua Barat, hal tersebut disebabkan karena adanya penurunan secara drastis jumlah penerimaan perkara banding.

GRAFIK 3.2
PERBANDINGAN PERKARA
YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM KASASI TAHUN 2021 - 2023



Capaian yang telah dicapai pada tahun 2023 ini belum mencapai target yang diperjanjikan pada Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat untuk Tahun Kinerja 2023, sehingga perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dalam rangka meningkatkan capaian pada indikator tersebut.

g. Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Persentase Penyelesaian Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi dengan Target Kinerja Jangka Menengah (Rencana Strategis) Tahun 2023.

Untuk menunjukan adanya keberhasilan capaian target kinerja tahunan yang stabil atau bahkan cenderung meningkat, secara obyektif harus dibandingkan dengan target capaian persentase dalam Renstra tahun berkenaan dan rata-rata selama 5 tahunan, sehingga ada kesinambungan pencapaian target tahunan dengan target 5 tahunan kinerja dalam Renstra tersebut.

Untuk peningkatan kinerja serta sebagai evaluasi atas kinerja yang telah dilaksanakan, dibawah ini tabel perbandingan capaian tahun 2023 terhadap target capaian jangka menengah tahun 2024 yang akan datang:

TABEL 3.9
DATA PERBANDINGAN TARGET DAN CAPAIAN TAHUN 2023
TERHADAP TARGET JANGKA MENENGAH

TAHUN 2023			TAHUN 2024
TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET
50%	-50%	-50%	100%

Dengan kondisi bahwa pada tahun 2023 target pada Indikator persentase perkara yg tidak mengajukan upaya hukum Kasasi tidak mencapai target, maka perlu dilakukan langkah-langkah kongkrit untuk pencapaian target pada tahun kinerja berikutnya sehingga target jangka menengah yang telah ditentukan bisa dicapai oleh Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat pada tahun 2024 mendatang.

h. Upaya Peningkatan Kinerja Untuk Kinerja berikutnya/Kegiatan dan Strategi

Dalam rangka upaya peningkatan kinerja untuk tahun berikutnya, berangkat dari capaian target kinerja indicator persentasi perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi Tahun 2023 mengalami kegagalan, maka upaya kedepan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

- Mempertahankan dan melanjutkan system kerja yang sudah berjalan dengan baik;
- Memperkuat kompetensi hakim dalam membuat putusan melalui Diskusi Hukum dan Pembinaan-Pembinaan serta mengikutsertakan Hakim Tinggi dalam kegiatan Bimtek yang diselenggarakan oleh Badilag dan Puslitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI.
- Memperkuat kualitas putusan hakim melalui pembahasan putusan oleh majelis hakim sebelum putusan dibacakan dalam sidang;
- Memperkuat komitmen Hakim dan pegawai dalam memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat;
- Memperkuat monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala beserta tindak lanjut yang kongkrit;

Dengan upaya-upaya yang maksimal diharapkan mampu meningkatkan kinerja dengan meminimalisir perkara yang mengajukan upaya hukum Kasasi sebagaimana target

yang diharapkan pada Indikator Kinerja Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi.

Indikator Kinerja Ketiga : Persentase Indeks Persepsi Stakeholder Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan

a. Pengukuran Kinerja

Realisasi capaian Indikator kinerja Indeks Persepsi Stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan dilihat pada matriks berikut:

TABEL 3.10
PERSENTASE INDEKS PERSEPSI STAKEHOLDER
YANG PUAS TERHADAP LAYANAN PERADILAN TAHUN 2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI/ (%)	CAPAIAN (%)
Indeks Persepsi Stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan	85%	89,55%	105,35 %

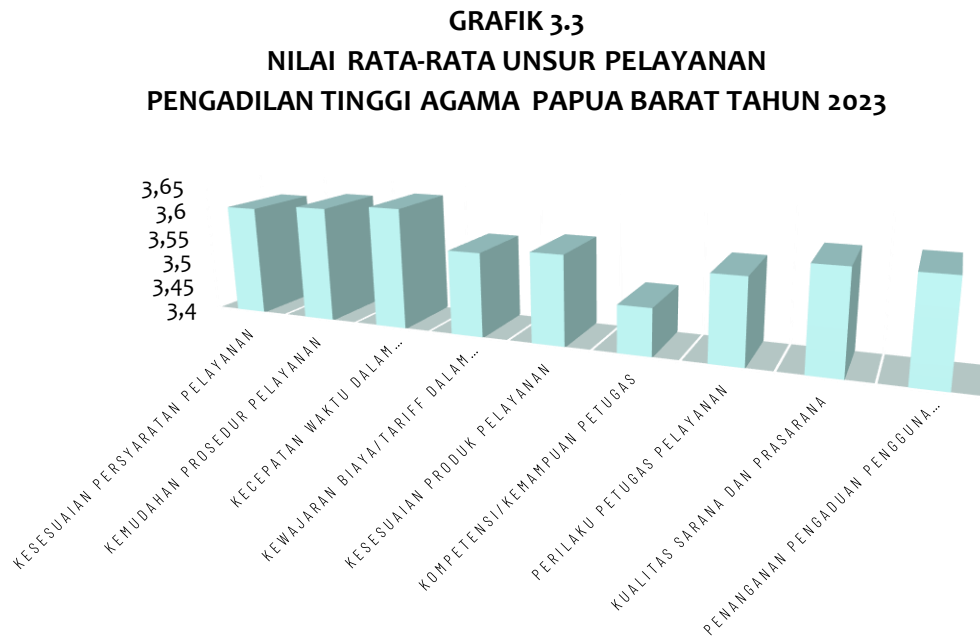
Indikator Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan diukur berdasarkan hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat sebagaimana diatur dalam Pemenpan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik bahwa Survey Kepuasan Masyarakat dilakukan setiap semester atau sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu tahun. Berdasarkan hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat pada tahun 2023, indeks Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan layanan pada Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat mencapai 89,55% dengan kategori **SANGAT BAIK**, yaitu dengan nilai rata-rata tertimbang SKM sebesar 3,58 dengan gambaran sebagai berikut:

TABEL 3.11
NILAI RATA-RATA UNSUR PELAYANAN
PENGADILAN TINGGI AGAMA PAPUA BARAT TAHUN 2023

No.	Unsur Pelayanan	Nilai Unsur Pelayanan	Mutu Pelayanan
1	Kesesuaian Persyaratan Pelayanan	3,61	Sangat Baik
2	Kemudahan Prosedur Pelayanan	3,62	Sangat Baik
3	Kecepatan Waktu dalam memberikan Pelayanan	3,63	Sangat Baik
4	Kewajaran biaya/tariff dalam pelayanan	3,56	Sangat Baik
5	Kesesuaian Produk pelayanan	3,57	Sangat Baik
6	Kompetensi/kemampuan petugas	3,49	Baik
7	Perilaku Petugas Pelayanan	3,56	Sangat Baik

8	Kualitas sarana dan prasarana	3,59	Sangat Baik
9	Penanganan pengaduan pengguna layanan	3,59	Sangat Baik
Rata-rata tertimbang		3,58	Sangat Baik

Dengan komposisi nilai rata-rata capaian layanan sebagaimana digambarkan pada grafik sebagai berikut:



Tabel dan grafik diatas menunjukkan bahwa seluruh unsur pelayanan Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat memiliki kualitas yang sangat baik. Nilai tersebut harus selalu dipertahankan dengan menjaga kualitas pelayanan di Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat. Adapun unsur yang memiliki nilai paling rendah, walaupun nilainya sudah masuk dalam kategori sangat baik tetap harus dilakukan perbaikan pelayan agar pada survey selanjutnya nilai tersebut bisa meningkat.

Berdasarkan hasil pengukuran Survey Indeks Persepsi Kepuasan Masyarakat pada Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat pada Tahun 2023, didapatkan kesimpulan sebagai berikut :

TABEL. 3.12
KESIMPULAN HASIL SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT
PENGADILAN TINGGI AGAMA PAPUA BARAT TAHUN 2023

No.	Kesimpulan	Keterangan
1.	Nilai IKM	89,55
2.	Kategori	Sangat Baik
3.	Unsur Terendah	U6= Perilaku Petugas Pelayanan

4.	Unsur Tertinggi	U3=Kecepatan Waktu dalam memberikan Pelayanan
5.	Prioritas Perbaikan	U6= Perilaku Petugas Pelayanan

Berdasarkan kesimpulan hasil survey tersebut pada tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja pada Indikator kinerja Indeks Persepsi Stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan telah melampaui target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2023 yaitu sebesar 89,55% dari target sebesar 85% dengan persentase total capaian sebesar 105,35%.

Tercapainya target kinerja pada indikator Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan pada tahun 2022 sangat dirasakan manfaatnya sebagai tolak ukur tingkat keberhasilan layanan Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat sehingga menghasilkan outcome meningkatnya kepercayaan masyarakat dan stakeholder kepada Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat (*public trust*). Nilai-nilai persentase tersebut cukup tinggi mengingat keberadaan Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat sebagai satuan kerja yang baru beroperasi dan menjalankan kinerja pada tahun 2023.

b. Dukungan Sumber Daya

- **Dukungan Sumber Daya Manusia**

Pencapaian target kinerja indicator Kinerja Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan tentu sangat dipengaruhi dengan keberadaan Sumber Daya Manusia yang memberikan pelayanan kepada masyarakat pengguna layanan. Sumber Daya Manusia yang mendukung terhadap Index Persepsi Stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan pada Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat tentu semua memiliki peran dan tugasnya masing-masing yang kesemuanya mempunyai arti terhadap Tingkat penilaian masyarakat terhadap layanan yang diberikan. Namun lebih khusus dalam hal ini SDM yang menjadi ujung tombak dalam pelayanan yang memengaruhi terhadap kepuasan masyarakat antara lain : Adanya seorang Hakim sebagai Supervisi untuk kegiatan SPKP. Panitera 1 (satu) orang sebagai bertugas membantu koordinasi dan supervisi untuk kegiatan SPKP.

Petugas PTSP sebanyak 3 (tiga) orang yaitu petugas Meja Permohonan Informasi dan Pengaduan, Petugas Meja Pendaftaran Perkara dan Petugas Meja Adminstrasi Umum. Petugas PTSP ini merupakan garda depan dalam pemberian layanan kepada masyarakat.

- **Dukungan Anggaran**

Pencapaian target kinerja index kepuasan stakeholder terhadap layanan pengadilan tentu memerlukan dukungan anggaran yang memadai. Untuk mendukung target kinerja kepuasan stakeholder pada Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat telah dianggarkan biaya pokok yaitu Biaya Perkara Banding sebesar Rp. 150.000/Perkara, sedangkan anggaran pendukung sebagaimana tertuang dalam DIPA 01 Badan Urusan Administrasi sebagaimana tertuang dalam Program Belanja Pegawai yang meliputi Gaji dan Tunjangan Hakim dan Pegawai sebesar Rp., Belanja Operasional sebesar Rp. yang meliputi Belanja Keperluan sehari-hari perkantoran, Belanja biaya honor pegawai PPNPN, Belanja Barang Persediaan, Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan, Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin dan Biaya Perjalanan Dinas Biasa.

- **Dukungan Sarana Prasarana**

Untuk mendukung pencapaian target kinerja Index Kepuasan Stakeholder atas layanan pengadilan pada PTA Papua Barat telah disediakan sarana prasarana berupa Meja PTSP, Komputer Pelayanan PTSP, Printer, Meubelair PTSP dan tata ruang yang cukup memadai;

c. Faktor Pendukung Keberhasilan Atau Kegagalan Pencapaian Target Kinerja

Keberhasilan tercapainya target pada indikator Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya:

1. Adanya pembinaan dari pimpinan terkait integritas dan perubahan *mindset* terhadap para pegawai serta para petugas PTSP serta agar senantiasa berkomitmen untuk mengedepankan kepuasan para pengguna layanan Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat serta meningkatkan pelayanan prima.
2. Implementasi 5.S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun) secara konsisten dari para petugas layanan dari mulai Satpam, Petugas PTSP dan Pejabat Pemberi layanan informasi;
3. Adanya sistem layanan yang transparan dan mudah diakses oleh masyarakat pengguna layanan, seperti sistem pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) baik secara offline maupun online, website dan media sosial lainnya.
4. Adanya peningkatan sarana dan prasarana penunjang layanan terhadap masyarakat pengguna layanan.

5. Adanya pemahaman tupoksi dan tanggung jawab yang diemban oleh setiap petugas layanan baik internal maupun eksternal serta komitmen untuk memberikan pelayanan sesuai dengan SOP yang berlaku, sehingga pelayanan yang diberikan dapat memuaskan dan diterima oleh stakeholder dengan baik.

Capaian yang telah dicapai pada indikator Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan di tahun 2023 ini telah melampaui target yang diperjanjikan pada Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat untuk Tahun Kinerja 2023, sehingga dapat diartikan bahwa program-program dan kebijakan pimpinan terkait penyelenggaraan pelayanan publik pada Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat telah berjalan dengan efektif. Namun demikian perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan capaian pada indikator tersebut dimasa-masa yang akan datang.

d. Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Capaian Tahun Sebelumnya

Sebagaimana diungkapkan dalam paparan awal bahwa Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat merupakan satuan kerja baru terbentuk pada tanggal 5 Desember 2022 dan baru beroperasi Tahun 2023, maka untuk pelaporan akuntabilitas kinerja tahun 2023 merupakan tahun pertama sehingga belum ada kinerja perbandingan dengan tahun sebelumnya.

e. Perbandingan Capaian Kinerja dengan target Kinerja Jangka Menengah

Capaian target kinerja Index Kepuasan Stakeholder terhadap layanan peradilan pada tahun 2023 dari target kinerja 85% realisasinya 89,55% dengan predikat SANGAT BAIK sehingga capaiannya sebesar 135%. Jika dibandingkan dengan target kinerja Jangka Menengah (Renstra Tahun 2020-2024) maka capaian kinerja tahun 2023 telah melampaui capaian kinerja yang ditargetkan dalam Renstra Tahun 2023 yaitu 85%.

f. Upaya Peningkatan Kinerja Untuk Kinerja berikutnya/Kegiatan dan Strategi yang dilakukan.

Dalam rangka meningkatkan kinerja index kepuasan stakeholder terhadap layanan pengadilan yang telah dicapai pada tahun 2023, maka upaya atau strategi yang dilakukan antara lain sebagai berikut :

1. Membentuk Tim Evaluasi atas hasil survey kepuasan masyarakat;
2. Menyusun tugas dan tanggung jawab tim evaluasi hasil survey kepuasan masyarakat;

3. Melaksanakan evaluasi atas hasil survey kepuasan masyarakat yang telah dilaksanakan setiap triwulan atau semester dan melakukan yindakan perbaikannya;
4. Melaksanakan morning breafing terhadap petugas PTSP sebagai bentuk evaluasi dan Langkah yang harus diterapkan dalam memberikan pelayanan terbaik kepada stakeholder yang membutuhkan pelayanan.
5. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui optimalisasi sumber daya yang ada, sehingga dipastikan pelayanan berjalan dengan efektif dan efesien.

**SASARAN STRATEGIS 2 :
PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA**

Indikator Kinerja : Persentase Penyampaian Salinan Putusan Ke Pengadilan Agama Pengaju Tepat Waktu.

a. Capaian Kinerja

Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara merupakan penunjang dari keberhasilan sasaran Strategis pertama, dimana untuk terwujudnya peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel perlu diiringi oleh peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara sehingga pelayanan hukum bagi masyarakat dapat terlaksana dengan baik. Untuk terselenggaranya tugas dan tercapainya sasaran tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat menyusun sasaran strategis kedua dengan indikator kinerja serta capaiannya pada tahun 2023 sebagaimana tabel dibawah ini:

**TABEL 3.13
CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS 2**

Sasaran program	Indikator	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	2	3	4	5
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.	Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu.	100	100	100

Satu-satunya indikator yang dipergunakan untuk mengukur tingkat capaian pada sasaran strategis Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara di Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, adalah Persentase Salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu.

Cara mengukur indikator kinerja ini adalah sebagai berikut :

Jumlah Salinan Putusan Yang Dikirim ke PA Pengaju Tepat Waktu

X 100%

Jumlah Perkara Yang diselesaikan

Indikator tersebut dalam pelaksanaan kinerja tahun 2023 telah mencapai target sesuai dengan yang telah ditetapkan. Berikut ini adalah rincian dan penjelasan dari dari capaian indikator tersebut:

TABEL 3.14
PERSENTASE SALINAN PUTUSAN
YANG DIKIRIM KE PENGADILAN PENGAJU TEPAT WAKTU

Indikator Kinerja	Target (%)	Input	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5
Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu.	100	1	1	100

Untuk mengukur capaian target kinerja pada indikator persentase Salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu yaitu dengan membandingkan salinan putusan yang disampaikan ke Pengadilan Agama pengaju tepat waktu dengan jumlah perkara yang putus.

Pada tahun 2023 perkara yang putus sebanyak 1 perkara dan Salinan putusan yang disampaikan ke Pengadilan Agama pengaju tepat waktu sebanyak 1 salinan putusan perkara atau sebesar 100%, dengan tingkat capaian 100 %.

Dengan tercapainya capaian kinerja pada indikator ini, menghasilkan outcome bahwa Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat telah memberikan pelayanan prima pada Pengadilan Agama pengaju, sehingga Pengadilan Agama pengaju bisa segera menyampaikan pemberitahuan amar putusan kepada para pihak dan para pihak dapat segera mendapatkan kepastian hukum.

b. Dukungan Sumber Daya

- Dukungan Sumber Daya Manusia**

Sumber Daya Manusia sebagai pendukung pencapaian target kinerja Persentase Penyampaian Salinan Putusan ke Pengadilan Agama Pengaju yang sudah berjalan di Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat yaitu adanya Panitera sebagai Pimpinan Unit Kepaniteraan, Panmud Banding dan Panmud Hukum sebagai ujung tombak dalam

pengelolaan penyampaian Salinan putusan ke Pengadilan Agama Pengaju, Bagian Tata Persuratan dan Petugas POS sebagai kurir pengantar surat atau dokumen.

- **Dukungan Anggaran**

Anggaran biaya yang mendukung pencapaian target kinerja Penyampaian Salinan Putusan Ke Pengadilan Agama Pengaju Tahun 2023 terutama Biaya Proses Berperkara di Tingkat banding yaitu Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) Sedangkan anggaran biaya penunjang kinerja persentase penyampaian Salinan putusan ke Pengadilan Agama Pengaju yang disediakan dalam DIPA TA 2023 PTA Papua Barat antara lain : Anggaran Biaya Operasional berupa Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Sebesar Rp.

Biaya honor tenaga PPNPN sebesar Rp.

Anggaran Biaya Pemeliharaan Komputer dan Laptop sebesar Rp.

Anggara Biaya Jaringan internet Tahun 2023 sebesar Rp.

- c. **Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Target Kinerja**

Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap capaian iindikator ini adalah sebagai berikut :

1. Adanya komitmen dari segenap Aparatur Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat untuk melakukan penyelesaian tugas sesuai dengan Standart Opertional Procedure (SOP) termasuk dalam hal ini SOP Pengiriman Salinan Putusan;
2. Tersedianya Sarana dan Prasarana yang memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas penyelesaian perkara pada Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat;
3. Tersedianya biaya proses pada setiap perkara yang salah satu peruntukannya untuk membiayai pengiriman Salinan putusan.

- d. **Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Capaian Kinerja Tahun -Tahun sebelumnya**

Sebagai perbandingan capaian kinerja berikut ini disajikan data berdasarkan penanganan perkara banding pada Pengadilan Tinggi Agama Jayapura tahun 2022 yang Pengadilan Pengajunya adalah Pengadilan Agama yang saat ini berada dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat. Adapun data perbandingan indikator persentase Salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu tersebut diuraikan sebagai berikut:

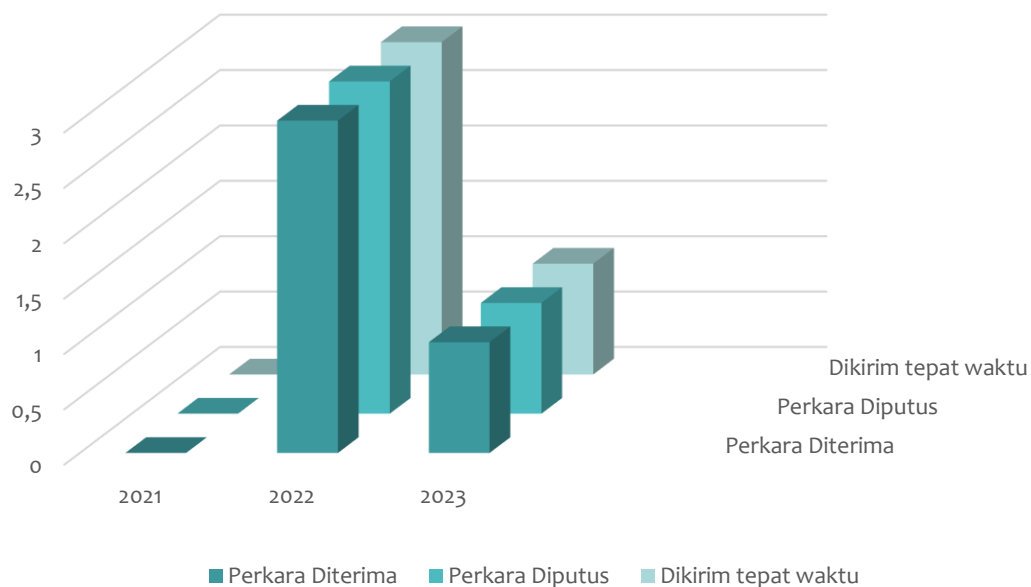
TABEL 3.15
PERBANDINGAN PERSENTASE SALINAN PUTUSAN
YANG DIKIRIM KE PENGADILAN PENGAJU TEPAT WAKTU

THN	JUMLAH	TARGET (%)	CAPAI AN
-----	--------	------------	----------

	BEBAN PERKARA	PUTUS	PENGRIMAN PUTUSAN TEPAT WAKTU		REALISASI (%)	(%)
2021	0	0	0	100	100	100
2022	3	3	3	100	100	100
2023	1	1	1	100	100	100

Dengan komposisi perbandingan capaian pada indikator persentase Salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu selama 3 (tiga) tahun terakhir sebagaimana tersebut pada grafik berikut ini:

GRAFIK 3.4
PERBANDINGAN CAPAIAN INDIKATOR PERSENTASE SALINAN PUTUSAN
YANG DIKIRIM KE PENGADILAN PENGAJU TEPAT WAKTU TAHUN 2021 - 2023



Berdasarkan perbandingan data pada tabel dan grafik diatas, menunjukkan bahwa capaian kinerja pada indikator ini dalam tiga tahun terakhir telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja setiap tahun.

e. Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Target Kinerja Jangka Menengah

Untuk peningkatan kinerja serta sebagai evaluasi atas kinerja yang telah dilaksanakan, dibawah ini tabel perbandingan capaian tahun 2023 terhadap target capaian jangka menengah tahun 2024 yang akan datang:

TABEL 3.16
DATA PERBANDINGAN TARGET DAN CAPAIAN TAHUN 2023
TERHADAP TARGET JANGKA MENENGAH

TAHUN 2023			TAHUN 2024
TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET
100%	100%	100%	100%

Berdasarkan data realisasi dan capaian diatas dapat dilihat bahwa realisasi pada tahun 2023 telah sesuai dengan target jangka menengah yang ditentukan pada Renstra Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat tahun 2020-2024. Dengan capaian yang cenderung stabil setiap tahunnya, maka target jangka menengah yang telah ditentukan akan tercapai oleh Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat pada tahun 2024 mendatang.

f. Upaya Peningkatan Kinerja/Kegiatan dan Strategi

Dalam rangka peningkatan kinerja selanjutnya, maka kegiatan atau strategi yang dilaksanakan antara lain :

1. Menyampaikan Salinan Putusan ke PA Pengaju sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan;
2. Melakukan Monitoring dan Evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan penyampaian Salinan putusan kepada PA Pengaju.

B. Realisasi Anggaran Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat Tahun 2023

Indikator kinerja utama Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat yang dijabarkan dalam sasaran strategis dan ditetapkan sebagai Perjanjian Kinerja Tahun 2023, dalam pelaksanaannya tentunya didukung dengan ketersediaan anggaran yang memadai. Oleh karena itu sebagai bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas publik, penjelasan mengenai Dukungan Anggaran realisasi, dan penggunaannya menjadi bagian yang tak terpisahkan dari setiap laporan kinerja masing-masing instansi.

Pengelolaan keuangan di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat secara umum diselenggarakan oleh Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran, sebagaimana Surat Keputusan Pengguna Anggaran/Barang Mahkamah Agung RI Nomor : 22/PA/SK/XII/2022 tanggal 01 Desember 2022 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Satuan Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya Tahun Anggaran 2023, dengan dibantu oleh Pengelola Anggaran antara lain Pejabat Penanggungjawab Kegiatan/Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penguji dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM), Bendahara Pengeluaran, Petugas Pengelola Administrasi

Belanja Pegawai (PPABP), dan Staf Pengelola Keuangan.

Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat selaku pengadilan tingkat banding yang baru dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2021 tentang *Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Bali, Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat, Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, dan Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara*, yang diresmikan beroperasinya oleh Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Desember 2022, tahun anggaran 2023 merupakan tahun pertama Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) untuk dikelola dalam rangka pembiayaan kegiatan dan operasional kantor.

Pengelolaan keuangan di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat secara umum diselenggarakan oleh Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana Surat Keputusan Pengguna Anggaran/Barang Mahkamah Agung RI Nomor : 22/PA/SK/XII/2022 tanggal 01 Desember 2022 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Satuan Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya Tahun Anggaran 2023, dengan dibantu oleh Pengelola Anggaran antara lain Pejabat Penanggungjawab Kegiatan/Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penguji dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM), Bendahara Pengeluaran, Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP), dan Staf Pengelola Keuangan.

Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat selaku pengadilan tingkat banding yang baru dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2021 tentang *Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Bali, Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat, Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, dan Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara*, yang diresmikan beroperasinya oleh Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Desember 2022, tahun anggaran 2023 merupakan tahun pertama Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) untuk dikelola dalam rangka pembiayaan kegiatan dan operasional kantor.

DIPA yang diterima Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat pada Tahun 2023 terdiri atas 2 (dua) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) masing-masing untuk Unit Organisasi Badan Urusan Administrasi MA-RI dan Unit Organisasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama MA-RI.

B.1. DIPA Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI

DIPA Badan Urusan Administrasi (Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya) Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada awal tahun anggaran 2023

menerima DIPA Unit Organisasi Badan Urusan Administrai MA-RI dengan Nomor : DIPA-005.01.2.526718/2023 tanggal 30 November 2022 dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 3.970.101.000,- (Tiga milyar sembilan ratus tujuh puluh juta seratus satu ribu rupiah) yang dalam tahun berjalan beberapa kali mengalami revisi penambahan anggaran baik dari revisi eselon 1 maupun melalui hibah langsung sehingga per tanggal 31 Desember 2023 total anggaran pada DIPA Unit Organisasi Badan Urusan Administrai Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat sebesar Rp. 13.213.773.000,- (Tiga belas milyar dua ratus tiga belas juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), terbagi dalam 3 (tiga) jenis belanja yang dirinci sebagai berikut :

TABEL 3.17
PAGU ANGGARAN BELANJA UNIT BUA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PAPUA BARAT TA 2023

JENIS BELANJA	DATA PAGU UNIT BUA			
	PAGU AWAL	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	JUMLAH ANGGARAN
1	2	3	4	5
Belanja Pegawai	2.000.000.000,-	8,248,215,000,-	0,-	10,248,215,000,-
Belanja Barang	1.790.101.000,-	50.487.000,-	0,-	1.840.588.000,-
Belanja Modal	0,-	1,124,970,000,-	0,-	1,124,970,000,-
JUMLAH	3.790.101.000,-	9.423.672.000,-	0,-	13.213.773.000,-

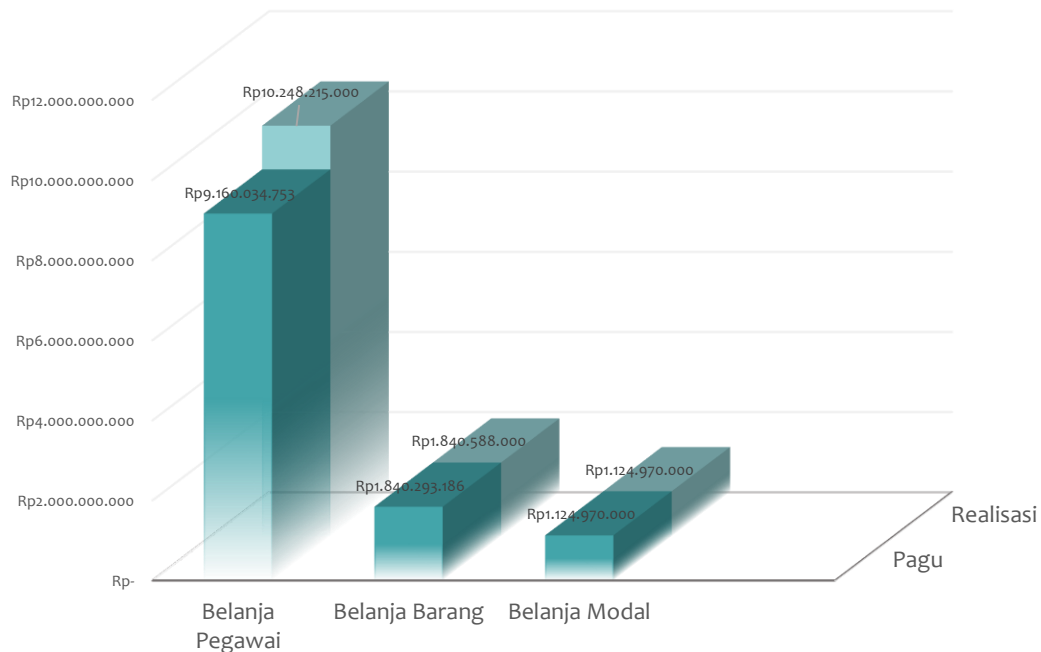
Realisasi Realisasi Belanja Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat untuk DIPA BUA per 31 Desember TA 2023 adalah sebesar Rp. 12,125,297,939,- atau sebesar 91.76% dari anggaran senilai Rp. 13,213,773,000,- Rincian realisasi anggaran belanja pada TA 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

TABEL 3.18
RINCIAN REALISASI ANGGARAN BELANJA UNIT BUA
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PAPUA BARAT TA 2023

U R A I A N	PER-31 DESEMBER TA 2023		
	PAGU	REALISASI	%
Belanja Pegawai	10,248,215,000	9,160,034,753	89.38
Belanja Barang	1,840,588,000	1,840,293,186	99.98
Belanja Modal	1,124,970,000	1,124,970,000	100.00
Total Belanja Bruto	13,213,773,000	12,125,297,939	91.76
Pengembalian Belanja	0	0	0
Total Belanja Netto	13,213,773,000	12,125,297,939	91.76

GRAFIK 3.5

KOMPOSISI ANGGARAN DAN REALISASI ANGGARAN BELANJA UNIT BUA PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PAPUA BARAT TA 2023



Penjelasan atas komposisi pagu dan realisasi anggaran sebagaimana dituangkan pada tabel dan grafik diatas secara rinci diuraikan menurut masing-masing jenis belanja sebagai berikut :

B.1.1. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat per 31 Desember Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 9,160,034,753,- atau sebesar 89.38% dari Pagu Belanja Pegawai sebesar Rp. 10,248,215,000,-. Realisasi belanja pegawai secara total tidak melebihi pagu anggaran tahun 2023 meskipun demikian penyerapan anggaran belanja pegawai telah maksimal dan kebutuhan satuan kerja terhadap anggaran untuk pemenuhan hak-hak finansial pegawai telah terpenuhi dengan baik selama tahun anggaran 2023. Pelaksanaan anggaran belanja pegawai di tahun 2023 adalah pengelolaan belanja pegawai tahun pertama pada Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat yang merupakan satuan kerja yang baru beroperasi, oleh karenanya belum ada data pembandingan realisasi anggaran belanja pegawai pada tahun-tahun sebelumnya. Adapun rincian realisasi belanja pegawai Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat berdasarkan akun-akun belanja sebagaimana diuraikan pada tabel berikut ini:

TABEL 3.19
RINCIAN REALISASI BELANJA PEGAWAI

PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PAPUA BARAT TA 2023

URAIAN	PAGU	REALISASI	% REALISASI
Belanja Gaji Pokok PNS	1,674,288,000	1.439.249.200	85,96
Belanja Pembulatan Gaji PNS	50,000	19.439	38,88
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	167,372,000	120.420.550	71,95
Belanja Tunj. Anak PNS	100,000,000	30.677.162	30,68
Belanja Tunj. Struktural PNS	165,520,000	69.715.000	42,12
Belanja Tunj. Fungsional PNS	5,263,940,000	5.177.760.000	98,36
Belanja Tunj. PPh PNS	1,363,659,000	1.363.658.743	100,00
Belanja Tunj. Beras PNS	70,971,000	67.495.440	95,10
Belanja Uang Makan PNS	401,190,000	191.850.000	47,82
Belanja Tunjangan Khusus Papua	333,580,000	333.580.000	100,00
Belanja Tunjangan Umum PNS	100,000,000	4.560.000	4,56
Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim	607,645,000	361.050.000	59,42
Total Belanja Brutto	10.248.215.000	9.160.035.534	89,38
Pengembalian Belanja	0	0	0
Total Belanja Netto	10.248.215.00	9.160.035.534	89,38

B.1.2. Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat per 31 Desember Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 1.840.293.186,- atau sebesar 99.98% dari Pagu Belanja Barang sebesar Rp. 1.840.588.000,-. Sama halnya dengan belanja pegawai, pelaksanaan anggaran belanja barang di tahun 2023 adalah pengelolaan belanja barang tahun pertama pada Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat. Adapun rincian realisasi belanja barang Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat berdasarkan akun-akun belanja sebagaimana diuraikan pada tabel berikut ini:

TABEL 3.20
REKAPITULASI REALISASI BELANJA BARANG
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PAPUA BARAT TA 2023

MATA ANGGARAN	PAGU	REALISASI	SISA PAGU
Belanja Keperluan Perkantoran (52111)	377.584.000	377.584.000	0
Belanja Pengiriman Surat Dinas (52114)	1.263.000	1.148.500	114.500
Belanja Honor Operasional Satker (52115)	74.004.000	74.004.000	0

Belanja Barang Operasional Lainnya (521119)	132.020.000	132.020.000	0
Belanja Brg Persediaan Komsumsi (521811)	67.230.000	67.230.000	0
Belanja Langganan Telpon (522112)	50.000	0	50.000
Belanja Langganan Air (522113)	50.000	0	50.000
Belanja Sewa (522141)	443.396.000	443.396.000	0
Belanja Pemeliharaan Gedung (523111)	205.356.000	205.356.000	0
Blj. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 523121	96.120.000	96.039.718	80.282
Belanja Perjalanan Dinas Biasa (524111)	357.557.000	357.556.968	32
Blj. Perjadin Paket Meeting dlm Kota (524114)	85.958.000	85.958.000	0
JUMLAH	1.840.588.000	1.840.293.186	294.814

B.1.3. Belanja Modal

Pagu Anggaran Belanja Modal pada Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat tahun 2023 sebesar Rp. 1.124.970.000 yang terdiri dari Anggaran yang bersumber dari APBN sebesar Rp 125.000.000,- serta anggaran yang bersumber dari Hibah Langsung Daerah (HLD) Provinsi Papua Barat sebesar Rp 999.970.000. Dari alokasi pagu anggaran tersebut sampai dengan 31 Desember Tahun 2023 dapat direalisasikan 100% dengan nilai total realisasi sebesar Rp. 1.124.970.000. Adapun rincian pagu dan realisasi belanja modal Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat berdasarkan akun-akun belanja sebagaimana diuraikan pada tabel berikut ini:

TABEL 3.21
RINCIAN PAGU DAN REALISASI BELANJA MODAL
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PAPUA BARAT TA 2023

MATA ANGGARAN	SUMBER DANA	PAGU	REALISASI	SISA PAGU
Belanja Modal Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi (532111)	APBN (RM)	90.000.000	90.000.000	0
Belanja Modal Fasilitas Perkantoran Berupa Pengadaan Air Conditioner/AC (532111)	APBN (RM)	35.000.000	35.000.000	0
Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 4 (532111)	HLD (RM)	870.500.000	870.500.000	0
Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 2 (532111)	HLD (RM)	73.410.000	73.410.000	0
Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran (532111)	HLD (RM)	56.060.000	56.060.000	0
JUMLAH		1.124.970.000	1.124.970.000	0

B.2. DIPA Ditjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI**B.2.1. DIPA Ditjen Badilag Pada Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat**

Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat pada awal tahun anggaran 2023 selain menerima DIPA Unit Organisasi Badan Urusan Administrai MA-RI juga menerima DIPA Unit Organisasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI dengan Nomor: SP.DIPA-005.04.2.52679/2023 tanggal 30 November 2022 dengan jumlah anggaran sebesar Rp 83.179.000 (delapan puluh tiga juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) sebagaimana pada tabel berikut:

TABEL 3.22
PAGU ANGGARAN BELANJA UNIT DITJEN BADILAG
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PAPUA BARAT TAHUN 2023

JENIS BELANJA	DIPA 04 BADILAG TAHUN ANGGARAN 2023			
	PAGU AWAL	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	PAGU AKHIR
Belanja Pegawai	0	0	0	0
Belanja Barang	83.179.000	0	0	83.179.000
Belanja Modal	0	0	0	0
TOTAL	83.179.000	0	0	83.179.000

Alokasi Anggaran DIPA Ditjen Badilag pada Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat Tahun 2023 dari segi komposisi anggaran hanya memiliki satu jenis belanja yakni belanja barang. Dari alokasi anggaran tersebut sampai dengan 31 Desember TA 2023 terealisasi sebesar Rp 82.612.000 atau sebesar 99,32% dari anggaran senilai Rp 83.179.000. Rincian realisasi anggaran belanja DIPA Ditjen Badilag pada Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

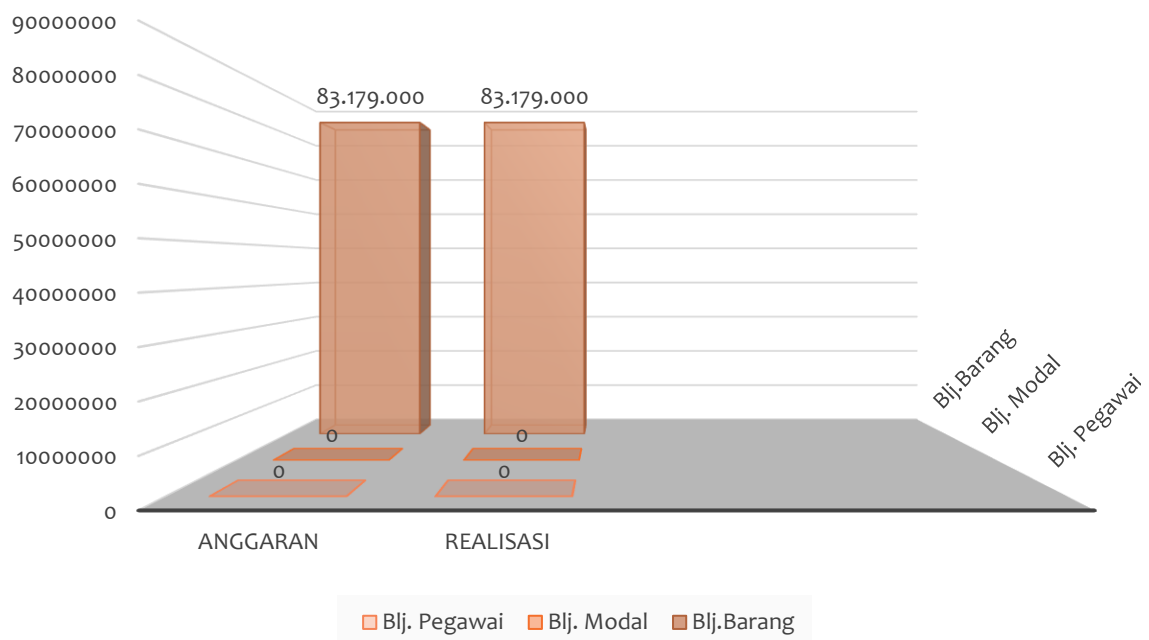
TABEL 3.23
REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA UNIT DITJEN BADILAG
PENGADILAN TINGGI AGAMA PAPUA BARAT TAHUN 2023

URAIAN	31 DESEMBER TA 2023		
	PAGU	REALISASI	%
Belanja Pegawai	0	0	0
Belanja Barang	83.179.000	82.612.000	99,32%
Belanja Modal	0	0	0
Total Belanja Bruto	83.179.000	82.612.000	99,32%
Pengembalian Belanja	0	0	0
Total Belanja Netto	83.179.000	82.612.000	99,32%

Komposisi Anggaran dan Realisasi DIPA Ditjen Badilag pada Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat Tahun 2023 dapat dilihat pada grafik berikut ini :

GRAFIK 3.6

KOMPOSISI ANGGARAN DAN REALISASI ANGGARAN BELANJA UNIT DITEN BADILAG PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PAPUA BARAT TA 2023



Pagu anggaran DIPA Ditjen Badan Peradilan Agama pada Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat Tahun 2023 dialokasikan untuk membiayai Program Penegakan dan Pelayanan Hukum dengan kode program 005.04.BF yang terdiri dari satu kegiatan utama yakni Kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Agama kode kegiatan 1053 dengan dua Komponen Rincian Output (KRO) yang terdiri dari KRO Pembinaan dan Pemantauan layanan Peradilan (005.AEA.003.053) serta KRO Implementasi dan Pendampingan ZI menuju WBK/WBBM (005.AEA.003.053). Adapun realisasi anggaran DIPA Ditjen Badan Peradilan Agama pada Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat secara rinci sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebagaimana diuraikan pada tabel berikut:

TABEL 3.24
RINCIAN REALISASI ANGGARAN BELANJA UNIT DITJEN BADILAG
PENGADILAN TINGGI AGAMA PAPUA BARAT TAHUN 2023

KRO	SUMBER DANA	PAGU	REALISASI	SISA PAGU
Belanja Pembinaan dan Pemantauan layanan Peradilan	APBN (RM)	53.767.000	53.200.000	567.000
Implementasi dan Pendampingan ZI menuju WBK/WBBM	APBN (RM)	29.412.000	29.412.000	0
JUMLAH		83.179.000	82.612.000	567.000

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan pertanggung jawaban atas kinerja instansi pemerintah dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang berisi tentang uraian capaian indikator kinerja kegiatan, program, dan sasaran yang telah dilaksanakan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat tahun 2023 menyajikan capaian kinerja berdasarkan perjanjian kinerja yang sudah ditetapkan. Capaian tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) beserta analisis kinerja dan penjelasannya.

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun 2023, terdapat 4 (empat) indikator kinerja yang merupakan tolak ukur capaian dari 2 sasaran strategis sesuai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung. Berdasarkan target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja, Pengadilan Tinggi Agama

Papua Barat Tahun 2023 untuk beberapa indikator capaian telah berhasil mencapai target bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, terdapat satu indikator yang belum tercapai sesuai target.

Berikut adalah capaian pada setiap indikator sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2023 pada Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat:

TABEL 4.1
PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA PENGADILAN TINGGI AGAMA PAPUA BARAT
TAHUN 2023

Sasaran program	Indikator	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.	Persentase penyelesaian perkara tepat waktu	100	100	100
	Persentase perkara yg tidak mengajukan upaya hukum Kasasi.	50	-100	-50
	Indeks Persepsi Stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan.	85	89,55	105,35
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.	Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu.	100	100	100

Nilai capaian pada masing-masing indikator pada tabel diatas menunjukkan bahwa terdapat 1 (satu) indikator yang tidak memenuhi target yakni Indikator Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi, beberapa faktor yang teridentifikasi menjadi penyebabnya antara lain:

1. Jumlah perkara yang diterima pada Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat tahun 2023 sangat minim dan hanya menerima 1 (satu) perkara dan satu-satunya perkara yang ditangani Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat tersebut mengajukan upaya hukum kasasi sehingga secara otomatis persentase capaian 100% tidak terpenuhi;
2. Satu-satunya perkara yang ditangani Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat tersebut adalah Perkara Kewarisan yang memang berpotensi pada sulitnya para pihak untuk menerima putusan pengadilan meskipun telah ditangani secara objektif sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;

Dengan kondisi bahwa pada tahun 2023 target pada Indikator persentase perkara yg tidak mengajukan upaya hukum Kasasi tidak mencapai target, maka perlu dilakukan langkah-langkah kongkrit untuk pencapaian target pada tahun kinerja berikutnya sehingga target jangka menengah yang telah ditentukan bisa dicapai oleh Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat pada tahun 2024 mendatang.

Sebagai upaya peningkatan pelaporan yang terarah dan terkoordinasi secara kontinue, Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat senantiasa melakukan monitoring dan evaluasi Realisasi Perjanjian Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat sendiri maupun Satker di bawahnya secara berkala setiap bulan dan evaluasi triwulanan melalui e-Sakip Komdanas dan Evaluasi manual yang ditindaklanjuti dengan penilaian melalui eviden KKE dan LHE triwulanan.

B. REKOMENDASI

Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat terus berupaya untuk meningkatkan kualitas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), sehingga penyajian berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian dari perjanjian kinerja yang telah diperjanjikan pada tahun 2023, merupakan bagian penting dari poin-poin evaluasi yang akan dilaksanakan untuk perbaikan kinerja pada periode berikutnya. Berdasarkan reviu Tim Penyusunan LKjIP tahun 2023 ini, ada beberapa rekomendasi yang perlu disampaikan sebagai berikut:

1. Perlu penambahan alokasi anggaran untuk belanja modal dalam upaya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana terutama Gedung prototype yang representative untuk memberikan pelayanan yang maksimal terhadap para pencari keadilan.
2. Peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagai instrument control yang objektif dan transparan dalam merencanakan, menetapkan dan mengukur kinerja Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat dan jajaran peradilan agama se-Wilayah PTA Papua Barat sesuai dengan core bussines dari tugas fungsinya dan keterampilan sumber daya manusia untuk peningkatan penyelesaian perkara.
3. Agar implementasi SAKIP benar-benar efektif perlu segera direalisasikan sinergitas antara laporan kinerja dengan laporan keuangan sebagai satu kesatuan, sehingga kinerja yang dibiayai oleh DIPA benar-benar terukur, bermanfaat dan akuntabel.
4. Lebih mengoptimalkan penerapan SAKIP mulai dari penyusunan Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja, dengan cara antara lain:
 - a. Dalam perumusan berbagai dokumen perencanaan, seperti Program Kerja, Rencana Kinerja Tahunan, Penganggaran, Penetapan Kinerja dan lain-lain, memanfaatkan Renstra sebagai acuan.
 - b. Mempersiapkan sistem pengukuran dan pengumpulan data kinerja yang handal termasuk penetapan kinerja dan outcome, sehingga Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat dapat memperlihatkan manfaat program dan kegiatan bagi masyarakat.

Lampiran - lampiran

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

PENGADILAN TINGGI AGAMA PAPUA BARAT TAHUN ANGGARAN 2023

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat untuk tahun anggaran 2023 sesuai pedoman reviu atas Laporan Kinerja. Substansi Informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan data/informasi kinerja Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat sehingga dapat menghasilkan laporan kinerja yang berkualitas.

Berdasarkan hasil reviu, laporan kinerja ini telah disajikan secara akurat, andal, dan valid, serta tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan dalam laporan kinerja ini.



Manokwari, 26 Februari 2024
Kepala Reviu

Dr. Drs. H. ABDUL GHOFUR, S.H., M.H



STRUKTUR ORGANISASI

PENGADILAN TINGGI AGAMA PAPUA BARAT

TOKIKI	
	Drs. H. Abdul Khaliq, M.H. NP. 185230195230108
	Drs. Muhammad Ridwan, M.H. NP. 185230195230107
	Drs. Nur Yuliana, M.H. NP. 185230195230107
	Drs. Muband, M.H. NP. 185230195230106
	Drs. Abd. Ruzik Pungpa, M.H. NP. 185230195230105
	Drs. H. M. Heng, S.H., M.H. NP. 185230195230107
	Drs. H. AR Mayekar, S.H., M.H. Ph.D. NP. 185230195230102
	Drs. H. Muband, M.H. NP. 185230195230104
	Drs. Uro, M.H. NP. 185230195230103
	Drs. H. Abdul Ghafur, M.H. NP. 185230195230104
	Drs. H. Muhammad Umar, S.H., M.Sy. NP. 185230195230107
	Drs. Firdaus Chaido, M.H. NP. 185230195230103

PANTHERA

Drs. Fakhruzzaman, M.H.
NP. 185230195230108

KERUDA

Drs. H. Ahmad Fathoni, S.H., M.H.
NP. 185230195230102

WAKIL KERUDA

Drs. Drs. H. Abdul Ghafur, S.H., M.H.
NP. 185230195230107

SIKREKASIS

Nurmanah, S.Ag., M.H.
NP. 187250187250103

KADAG KEBERKAWAKSIAN

Syamal Fahir, S.H.
NP. 185230195230102

KADAG HUKUMI/KEKAWAKSIAN

Raniw, S.H.
NP. 185230195230106

PANTHERA MUDA DANDING

Misa Shafwan, S.H.
NP. 187250187250104

PANTHERA MUDA HUKUMI

H. Kurniyah, S.Ag., M.H.
NP. 187250187250102

KADAG KEBERKAWAKSIAN/KEKAWAKSIAN

Nurmanah, S.H.
NP. 185230195230104

KADAG KEBERKAWAKSIAN/KEKAWAKSIAN

M. Nur Husein, M.H.
NP. 185230195230101

KADAG KEBERKAWAKSIAN/KEKAWAKSIAN

Ummu Mukhlis, S.H., M.H.
NP. 185230195230106

KADAG KEBERKAWAKSIAN/KEKAWAKSIAN

Sunkenana, S.E.
NP. 187250187250103

PENGADILAN MUDA HUKUMI

Misa Shafwan, S.H.
NP. 187250187250104

PENGADILAN MUDA HUKUMI

H. Kurniyah, S.Ag., M.H.
NP. 187250187250102

PENGADILAN MUDA HUKUMI

Nurmanah, S.H.
NP. 185230195230104

PENGADILAN MUDA HUKUMI

M. Nur Husein, M.H.
NP. 185230195230101

PENGADILAN MUDA HUKUMI

Ummu Mukhlis, S.H., M.H.
NP. 185230195230106

PENGADILAN MUDA HUKUMI

Sunkenana, S.E.
NP. 187250187250103

PENGADILAN MUDA HUKUMI

Misa Shafwan, S.H.
NP. 187250187250104

PENGADILAN MUDA HUKUMI

H. Kurniyah, S.Ag., M.H.
NP. 187250187250102

PENGADILAN MUDA HUKUMI

Nurmanah, S.H.
NP. 185230195230104

PENGADILAN MUDA HUKUMI

M. Nur Husein, M.H.
NP. 185230195230101

PENGADILAN MUDA HUKUMI

Ummu Mukhlis, S.H., M.H.
NP. 185230195230106

PENGADILAN MUDA HUKUMI

Sunkenana, S.E.
NP. 187250187250103

PENGADILAN MUDA HUKUMI

Misa Shafwan, S.H.
NP. 187250187250104

PENGADILAN MUDA HUKUMI

H. Kurniyah, S.Ag., M.H.
NP. 187250187250102

PENGADILAN MUDA HUKUMI

Nurmanah, S.H.
NP. 185230195230104

PENGADILAN MUDA HUKUMI

M. Nur Husein, M.H.
NP. 185230195230101

PENGADILAN MUDA HUKUMI

Ummu Mukhlis, S.H., M.H.
NP. 185230195230106

PENGADILAN MUDA HUKUMI

Sunkenana, S.E.
NP. 187250187250103

PENGADILAN MUDA HUKUMI

Misa Shafwan, S.H.
NP. 187250187250104

PENGADILAN MUDA HUKUMI

H. Kurniyah, S.Ag., M.H.
NP. 187250187250102

PENGADILAN MUDA HUKUMI

Nurmanah, S.H.
NP. 185230195230104

PENGADILAN MUDA HUKUMI

M. Nur Husein, M.H.
NP. 185230195230101

PENGADILAN MUDA HUKUMI

Ummu Mukhlis, S.H., M.H.
NP. 185230195230106

PENGADILAN MUDA HUKUMI

Sunkenana, S.E.
NP. 187250187250103

PENGADILAN MUDA HUKUMI

Misa Shafwan, S.H.
NP. 187250187250104

PENGADILAN MUDA HUKUMI

H. Kurniyah, S.Ag., M.H.
NP. 187250187250102

PENGADILAN MUDA HUKUMI

Nurmanah, S.H.
NP. 185230195230104

PENGADILAN MUDA HUKUMI

M. Nur Husein, M.H.
NP. 185230195230101

PENGADILAN MUDA HUKUMI

Ummu Mukhlis, S.H., M.H.
NP. 185230195230106

PENGADILAN MUDA HUKUMI

Sunkenana, S.E.
NP. 187250187250103

PENGADILAN MUDA HUKUMI

Misa Shafwan, S.H.
NP. 187250187250104

PENGADILAN MUDA HUKUMI

H. Kurniyah, S.Ag., M.H.
NP. 187250187250102

PENGADILAN MUDA HUKUMI

Nurmanah, S.H.
NP. 185230195230104

PENGADILAN MUDA HUKUMI

M. Nur Husein, M.H.
NP. 185230195230101

PENGADILAN MUDA HUKUMI

Ummu Mukhlis, S.H., M.H.
NP. 185230195230106

PENGADILAN MUDA HUKUMI

Sunkenana, S.E.
NP. 187250187250103

----- : GARIS TANGGUNG JAWAB
----- : GARIS KOORDINASI



**PENETAPAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA
(IKU)**

2023

PENGADILAN TINGGI AGAMA PAPUA BARAT



**MAHKAMAH AGUNG RI
PENGADILAN TINGGI AGAMA PAPUA BARAT
Jalan Brawijaya - Manokwari
PAPUA BARAT**



PENGADILAN TINGGI AGAMA PAPUA BARAT
SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PAPUA BARAT
NOMOR : W31-A/108.a/OT.01.1/I/2023
tentang
PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PAPUA BARAT

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PAPUA BARAT

- Menimbang : 1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
2. bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2010 – 2014, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015 – 2019 maka Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang - undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja;

7. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor :
173/SEK/SK/ I/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama
pada Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama di
Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan : Hasil Rapat Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi
Agama Papua Barat tanggal 16 Januari 2023 tentang Pembahasan
Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tinggi Agama Papua
Barat

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PAPUA BARAT
TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PAPUA BARAT

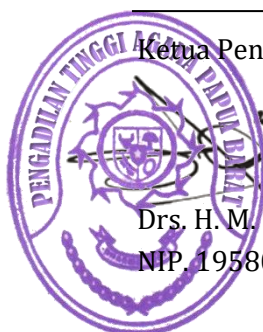
PERTAMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran
keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh
Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat , untuk menetapkan Renstra,
Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan penyusunan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi
pencapaian kinerja.

KEDUA : Bahwa dalam melakukan Reviu Indikator Kinerja Utama bertujuan
untuk lebih menyelaraskan isu-isu strategis di Lingkungan MA RI dan
Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat agar tetap memiliki IKU yang
valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja, pengendalian
pelaksanaan program dan kegiatan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan
diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Manokwari
pada tanggal : 16 Januari 2023

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat



Drs. H. M. NAHIRUDDIN, S.H., M.H.
NIP. 195808051984031004

**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PAPUA BARAT**

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	a. Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu b. Persentase Perkara tidak diajukan Upaya Hukum Kasasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100$ Catatan : • SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan. • Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. • Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Banding paling lambat 3 (tiga) bulan. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. $\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100$ Catatan : • Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi dari upaya hukum banding. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. • Upaya hukum kasasi dinyatakan mulai adanya akta pernyataan kasasi.	Panitera Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		c. Indeks persepsi <i>stakeholder</i> yang puas terhadap layanan peradilan	Indeks Persepsi Kepuasan Stakeholder Catatan : • PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Sekretaris Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. • Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus > 80. • Stakeholder adalah semua pemangku kepentingan yang menerima layanan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan yang dikirim tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan yang dikirim}} \times 100$ Catatan : • Jumlah salinan putusan yang dikirim tepat waktu adalah jumlah Salinan putusan/penetapan yang dikirim ke pengadilan pengaju sesuai dengan ketentuan. • Jumlah putusan yang dikirim adalah jumlah putusan/penetapan banding yang sudah diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Manokwari, 16 Januari 2023
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat



Drs. H. M. NAHRUDDIN, S.H., M.H.
NIP. 195808051984031004

MATRIKS REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

Instansi : Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat
 Visi : Terwujudnya Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat yang Agung
 Misi :
 1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan
 2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan
 3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan
 4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan

No	Tujuan		Target jangka Menengah (5 Tahun) %	Sasaran Strategis		Target %				
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu	100	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu	-	-	-	100	100
		Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi			Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi	-	-	-	100	100
		Indeks persepsi <i>stakeholder</i> yang puas terhadap layanan peradilan	100		Indeks persepsi <i>stakeholder</i> yang puas terhadap layanan peradilan	-	-	-	100	100
2.	Terwujudnya Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	100	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	-	-	-	100	100


 Manokwari, 16 Januari 2023
 Ketua Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat

 Drs. H. M. NAHIRUDDIN, S.H., M.H.
 NIP. 195808051984031004

MATRIK KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
NOMOR : W31-A/108.c/OT.01.1/I/2023
PENGADILAN TINGGI AGAMA PAPUA BARAT

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target %
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu	100
		Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi	100
		Indeks persepsi <i>stakeholder</i> yang puas terhadap layanan peradilan	100
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	100

	Kegiatan	Anggaran
1.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp. 12,117,682,000
2.	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp. 90,000,000
3.	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Rp. 83,179,000



Manokwari, 16 Januari 2023

Ketua,

Drs. H. M. NAHIRUDDIN, S.H., M.H.
NIP. 195808051984031004



**RENCANA KINERJA TAHUNAN
(RKT)**

2024

PENGADILAN TINGGI AGAMA PAPUA BARAT



**MAHKAMAH AGUNG RI
PENGADILAN TINGGI AGAMA PAPUA BARAT
Jalan Brawijaya - Manokwari
PAPUA BARAT**

RENCANA KINERJA TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : W31-A/108.b/OT.01.1/I/2023
PENGADILAN TINGGI AGAMA PAPUA BARAT

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target %
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu	100
		Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi	100
		Indeks persepsi <i>stakeholder</i> yang puas terhadap layanan peradilan	100
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	100
3.	Terwujudnya Dukungan Tugas dan Fungsi Pengadilan Tingkat Banding (Penugasan dari Mahkamah Agung RI)	Persentase terlaksananya pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan peradilan	100
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dan Nilai Capaian Output Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	90
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dan Nilai Capaian Output Program Dukungan Manajemen	90



Manokwari, 16 Januari 2023
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat

Drs. H. M. NANIRUDDIN, S.H., M.H.
NIP. 195808051984031004



**PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN
(PKT)**

2023

PENGADILAN TINGGI AGAMA PAPUA BARAT



MAHKAMAH AGUNG RI
PENGADILAN TINGGI AGAMA PAPUA BARAT
Jalan Brawijaya - Manokwari
PAPUA BARAT

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
NOMOR : W31-A/108.c/OT.01.1/I/2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. H. M. NAHIRUDDIN, S.H., M.H.
Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat

Selanjutnya disebut **pihak pertama**.

Nama : Dr. Drs. Aco Nur, S.H., M.H.
Jabatan : Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**.

Pihak pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama

Dr. Drs. Aco Nur, S.H., M.H.
NIP. 196303131989031021

Manokwari, 16 Januari 2023

Pihak Pertama

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat



Drs. H. M. NAHIRUDDIN, S.H., M.H.
NIP. 195808051984031004

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
NOMOR : W31-A/108.c/OT.01.1/I/2023
PENGADILAN TINGGI AGAMA PAPUA BARAT

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target %
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu	100
		Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi	100
		Indeks persepsi <i>stakeholder</i> yang puas terhadap layanan peradilan	100
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	100

	Kegiatan	Anggaran
1.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp. 12,117,682,000
2.	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp. 90,000,000
3.	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Rp. 83,179,000



Manokwari, 16 Januari 2023

Ketua,

Drs. H. M. NAHIRUDDIN, S.H., M.H.
NIP. 195808051984031004



**RENCANA AKSI KINERJA TAHUNAN
(RAK)**

2023

PENGADILAN TINGGI AGAMA PAPUA BARAT



**MAHKAMAH AGUNG RI
PENGADILAN TINGGI AGAMA PAPUA BARAT
Jalan Brawijaya - Manokwari
PAPUA BARAT**

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
PENGADILAN TINGGI AGAMA PAPUA BARAT

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET 2023	TARGET TRIWULAN			
				I	II	III	IV
1	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi					100%
		Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan	100%	100%	100%	100%	100%
NO	AKSI KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN (Triwulan)	KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (Rp)	
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel						
	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu						
	Melakukan penyelesaian perkara tahun berjalan (2023)tepat waktu		Laporan perkara tahun berjalan (2023) yang diselesaikan tepat waktu	Peningkatan Penyelesaian Perkara	Menyelesaikan Perkara tahun berjalan (2023) melalui persidangan tidak lebih dari 2 bulan	Anggaran Biaya Perkara dari para Pihak	
	b. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi						
	Meningkatkan Kualitas Putusan dan Pelayanan		Laporan perkara tahun berjalan (2023) yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	Peningkatan Kualitas Putusan dan Pelayanan	Meningkatkan kualitas putusan melalui diskusi hukum serta memberikan pelayanan prima melalui meja PTSP baik <i>offline</i> maupun online	APBN	
	c. Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan						
	Melakukan survey kepada Pegawai Pengadilan Agama se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat dan Masyarakat Pengguna Layanan		Laporan Survey Kepuasan Masyarakat per-Semester	Peningkatan Pelayanan Prima terhadap Pengguna Layanan PTA Papua Barat	Meningkatkan akses masyarakat untuk memperoleh informasi (SIPP, Website, Sosial Media, PTSP Baik Online maupun Offline)	APBN	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET 2023	TARGET TRIWULAN			
				I	II	III	IV
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Perkara	Persentase Salinan Putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%

NO	AKSI KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN (Triwulan)				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (Rp)
		I	II	III	IV				
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Perkara								
	a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu								
	Mengirimkan Salinan Putusan ke Pengadilan Pengaju tepat waktu					Salinan Putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Perkara	Mengirimkan Salinan Putusan ke Pengadilan Pengaju paling lambat 14 hari setelah sidang pembacaan Putusan	Anggaran Biaya Perkara dari para Pihak



 Manokwari, 16 Januari 2023
 Ketua
 Drs. H. M. NAHIRUDDIN, S.H., M.H.
 NIP. 195808051984031004



PENGADILAN TINGGI AGAMA PAPUA BARAT

[onshow.satker_street] [onshow.satker_telp] [onshow.satker_fax]
[onshow.satker_kabkot_name] [onshow.wilayah_name] [onshow.satker_kodepos]
[onshow.satker_email]

LAPORAN KINERJA TRIWULAN TAHUN 2023

- Memperhatikan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah , Bagian keenam Pasal 18 dan 19;
- Permenpan No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Rekomendasi Kementerian PAN dan RB No. B/3826/M.PAN-RB/11/2014 Hal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah “Pemanfaatan Penetapan Kinerja (PK) yang telah ditandatangani, sebagai sarana untuk menilai dan menyimpulkan kinerja pihak yang berjanji. Selain itu , perlu ada penjabaran lebih lanjut dokumen Penetapan Kinerja (PK) ke dalam satu rencana aksi yang lebih detail dan dapat dimanfaatkan sebagai instrumen untuk memantau dan mengevaluasi kemajuan (progress) kinerja secara periodik (triwulan atau semesteran), sekaligus sebagai sarana untuk mengarahkan dan mengelola kegiatan.



PENGADILAN TINGGI AGAMA PAPUA BARAT

[onshow.satker_street] [onshow.satker_telp] [onshow.satker_fax]
[onshow.satker_kabkot_name] [onshow.wilayah_name] [onshow.satker_kodepos]
[onshow.satker_email]

PENGUKURAN KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2023

N o.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi Triwulan											
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Input	Realisasi	Capaian (%)	Input	Realisasi	Capaian (%)	Input	Realisasi	Capaian (%)	Input	Realisasi	Capaian (%)
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata Agama yang diselesaikan Tepat Waktu	100	0	0	0,00	0	0	0,00	1	1	100,00	0	0	0,00
2.		Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan		0	0	0,00	0	89	0,00	0	0	0,00	0	89	0,00

[illegible]



PENGADILAN TINGGI AGAMA PAPUA BARAT

[onshow.satker_street] [onshow.satker_telp] [onshow.satker_fax]
[onshow.satker_kabkot_name] [onshow.wilayah_name] [onshow.satker_kodepos]
[onshow.satker_email]

KEGIATAN DAN ANGGARAN

No	Kegiatan	Anggaran
1	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Rp....
2	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Rp...



PENGADILAN TINGGI AGAMA PAPUA BARAT

[onshow.satker_street] [onshow.satker_telp] [onshow.satker_fax]
[onshow.satker_kabkot_name] [onshow.wilayah_name] [onshow.satker_kodepos]
[onshow.satker_email]

LAPORAN KINERJA TRIWULAN TAHUN 2023

- Memperhatikan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah , Bagian keenam Pasal 18 dan 19;
- Permenpan No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Rekomendasi Kementerian PAN dan RB No. B/3826/M.PAN-RB/11/2014 Hal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah “Pemanfaatan Penetapan Kinerja (PK) yang telah ditandatangani, sebagai sarana untuk menilai dan menyimpulkan kinerja pihak yang berjanji. Selain itu , perlu ada penjabaran lebih lanjut dokumen Penetapan Kinerja (PK) ke dalam satu rencana aksi yang lebih detail dan dapat dimanfaatkan sebagai instrumen untuk memantau dan mengevaluasi kemajuan (progress) kinerja secara periodik (triwulan atau semesteran), sekaligus sebagai sarana untuk mengarahkan dan mengelola kegiatan.



PENGADILAN TINGGI AGAMA PAPUA BARAT

[onshow.satker_street] [onshow.satker_telp] [onshow.satker_fax]
[onshow.satker_kabkot_name] [onshow.wilayah_name] [onshow.satker_kodepos]
[onshow.satker_email]

PENGUKURAN KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2023

N o.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi Triwulan											
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Input	Realisasi	Capaian (%)	Input	Realisasi	Capaian (%)	Input	Realisasi	Capaian (%)	Input	Realisasi	Capaian (%)
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata Agama yang diselesaikan Tepat Waktu	100	0	0	0,00	0	0	0,00	1	1	100,00	0	0	0,00
2.		Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan		0	0	0,00	0	89	0,00	0	0	0,00	0	89	0,00

[illegible]



PENGADILAN TINGGI AGAMA PAPUA BARAT

[onshow.satker_street] [onshow.satker_telp] [onshow.satker_fax]
[onshow.satker_kabkot_name] [onshow.wilayah_name] [onshow.satker_kodepos]
[onshow.satker_email]

KEGIATAN DAN ANGGARAN

No	Kegiatan	Anggaran
1	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Rp....
2	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Rp...



PENGADILAN TINGGI AGAMA PAPUA BARAT

[onshow.satker_street] [onshow.satker_telp] [onshow.satker_fax]
[onshow.satker_kabkot_name] [onshow.wilayah_name] [onshow.satker_kodepos]
[onshow.satker_email]

LAPORAN KINERJA TRIWULAN TAHUN 2023

- Memperhatikan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah , Bagian keenam Pasal 18 dan 19;
- Permenpan No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Rekomendasi Kementerian PAN dan RB No. B/3826/M.PAN-RB/11/2014 Hal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah “Pemanfaatan Penetapan Kinerja (PK) yang telah ditandatangani, sebagai sarana untuk menilai dan menyimpulkan kinerja pihak yang berjanji. Selain itu , perlu ada penjabaran lebih lanjut dokumen Penetapan Kinerja (PK) ke dalam satu rencana aksi yang lebih detail dan dapat dimanfaatkan sebagai instrumen untuk memantau dan mengevaluasi kemajuan (progress) kinerja secara periodik (triwulan atau semesteran), sekaligus sebagai sarana untuk mengarahkan dan mengelola kegiatan.



PENGADILAN TINGGI AGAMA PAPUA BARAT

[onshow.satker_street] [onshow.satker_telp] [onshow.satker_fax]
[onshow.satker_kabkot_name] [onshow.wilayah_name] [onshow.satker_kodepos]
[onshow.satker_email]

PENGUKURAN KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2023

N o.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi Triwulan											
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Input	Realisasi	Capaian (%)	Input	Realisasi	Capaian (%)	Input	Realisasi	Capaian (%)	Input	Realisasi	Capaian (%)
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata Agama yang diselesaikan Tepat Waktu	100	0	0	0,00	0	0	0,00	1	1	100,00	0	0	0,00
2.		Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan		0	0	0,00	0	89	0,00	0	0	0,00	0	89	0,00



[onshow.satker_street] [onshow.satker_telp] [onshow.satker_fax]
[onshow.satker_kabkot_name] [onshow.wilayah_name] [onshow.satker_kodepos]
[onshow.satker_email]

[illegible]



PENGADILAN TINGGI AGAMA PAPUA BARAT

[onshow.satker_street] [onshow.satker_telp] [onshow.satker_fax]
[onshow.satker_kabkot_name] [onshow.wilayah_name] [onshow.satker_kodepos]
[onshow.satker_email]

KEGIATAN DAN ANGGARAN

No	Kegiatan	Anggaran
1	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Rp....
2	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Rp...



PENGADILAN TINGGI AGAMA PAPUA BARAT

[onshow.satker_street] [onshow.satker_telp] [onshow.satker_fax]
[onshow.satker_kabkot_name] [onshow.wilayah_name] [onshow.satker_kodepos]
[onshow.satker_email]

LAPORAN KINERJA TRIWULAN TAHUN 2023

- Memperhatikan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah , Bagian keenam Pasal 18 dan 19;
- Permenpan No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Rekomendasi Kementerian PAN dan RB No. B/3826/M.PAN-RB/11/2014 Hal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah “Pemanfaatan Penetapan Kinerja (PK) yang telah ditandatangani, sebagai sarana untuk menilai dan menyimpulkan kinerja pihak yang berjanji. Selain itu , perlu ada penjabaran lebih lanjut dokumen Penetapan Kinerja (PK) ke dalam satu rencana aksi yang lebih detail dan dapat dimanfaatkan sebagai instrumen untuk memantau dan mengevaluasi kemajuan (progress) kinerja secara periodik (triwulan atau semesteran), sekaligus sebagai sarana untuk mengarahkan dan mengelola kegiatan.



PENGADILAN TINGGI AGAMA PAPUA BARAT

[onshow.satker_street] [onshow.satker_telp] [onshow.satker_fax]
[onshow.satker_kabkot_name] [onshow.wilayah_name] [onshow.satker_kodepos]
[onshow.satker_email]

PENGUKURAN KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2023

N o.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi Triwulan											
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Input	Realisasi	Capaian (%)	Input	Realisasi	Capaian (%)	Input	Realisasi	Capaian (%)	Input	Realisasi	Capaian (%)
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata Agama yang diselesaikan Tepat Waktu	100	0	0	0,00	0	0	0,00	1	1	100,00	0	0	0,00
2.		Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan		0	0	0,00	0	89	0,00	0	0	0,00	0	89	0,00



[onshow.satker_street] [onshow.satker_telp] [onshow.satker_fax]
[onshow.satker_kabkot_name] [onshow.wilayah_name] [onshow.satker_kodepos]
[onshow.satker_email]

[illegible]



PENGADILAN TINGGI AGAMA PAPUA BARAT

[onshow.satker_street] [onshow.satker_telp] [onshow.satker_fax]
[onshow.satker_kabkot_name] [onshow.wilayah_name] [onshow.satker_kodepos]
[onshow.satker_email]

KEGIATAN DAN ANGGARAN

No	Kegiatan	Anggaran
1	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Rp....
2	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Rp...

Results 1 - 5 of 5 | ibat: 20 ✓ satker ner halaman

Tampilkan : Semua Satker Tahun 2023

[illegible][illegible]



LAPORAN

Survey

2023 SEMESTER I

PENGADILAN TINGGI AGAMA PAPUA BARAT

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
 Bab 1 Pendahuluan	
1.1 Latar belakang.....	I-1
1.2 Peraturan Perundangan.....	I-2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	I-2
1.4 Sasaran.....	I-3
1.5 Ruang Lingkup.....	I-3
1.6 Manfaat	I-3
1.7 Indikator Penilaian.....	I-4
 Bab 2 Teknis Pelaksanaan	
2.1 Pengertian	II-1
2.2 Metodologi Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat	II-4
 Bab III Profil dan Pembahasan:	
3.1 Profil Organisasi.....	III-1
3.2 Profil Responden.....	III-4
3.3 Tingkat Kepuasan Masyarakat	III-5
3.4 Analisa Antara Persepsi dan Harapan	III-7
3.5 Kesimpulan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	III-9
3.6 Opini Responden.....	III-9
 Bab IV Kesimpulan, Saran, dan Penutup	
4.1 Kesimpulan	IV-1
4.2 Saran	IV-1
4.3 Penutup	IV-2

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelayanan publik merupakan suatu tindakan pemberian barang atau jasa kepada Pencari Keadilan oleh pemerintah, dalam rangka tanggung jawabnya kepada publik yang diberikan secara langsung dan dirasakan oleh Pencari Keadilan. Pelayanan publik harus diberikan kepada Pencari Keadilan karena adanya kepentingan publik (public interest), yang harus dipenuhi oleh pemerintah, karena pemerintahlah yang memiliki tanggung jawab untuk memenuhinya.

Dalam memberikan pelayanannya, pemerintah dituntut untuk memberikan sebuah pelayanan prima kepada publik, sehingga tercapai suatu kepuasan. Pelayanan prima merupakan suatu layanan yang diberikan kepada publik yang mampu memuaskan pihak yang dilayani, hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam Undang- Undang Nomr : 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor : 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Seiring dengan perubahan lingkungan strategis yang cepat dan luas di berbagai sektor, maka spesialisasi dan variasi tuntutan kebutuhanpun semakin meningkat dalam kegiatan dan kehidupan Pencari Keadilan. Ditambah lagi dengan peningkatan kesadaran bernegara, kesemuanya itu mengharuskan adanya perubahan tentang konsep pelayanan terhadap pencari keadilan. Pencari Keadilan semakin dinamis dan semakin kritis, sehingga hal ini memicu adanya keharusan perubahan paradigma pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada Pencari Keadilan.

Penyusunan Survey Indeks Persepsi Pelayanan Publik merupakan suatu langkah yang tepat untuk mengakomodasi harapan Stakeholders, menilai tingkat kepuasan Pencari Stakeholders terhadap kinerja pemerintah terutama aparat

dan fasilitasnya serta sebagai alat untuk membuat program-program pemerintah yang efektif dan tepat sasaran.

1.2 Peraturan Perundangan

Dasar dari penyusunan Indeks Persepsi Pelayanan Publik adalah peraturan perundangan sebagai berikut :

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS).
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah Kepada Masyarakat.
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor: 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Survey Indeks Persepsi Pelayanan Publik terhadap Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, dimaksudkan sebagai kegiatan untuk mendapatkan suatu gambaran/pendapat masyarakat tentang kualitas pelayanan publik yang telah diberikan oleh Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat.

Selain itu kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, baik oleh masyarakat maupun instansi/unit terkait sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya.

1.4 Sasaran

Adapun sasaran dari Penyusunan Survey Indeks Persepsi Pelayanan Publik ini adalah :

1. Terwujudnya tingkat kinerja Unit Pelayanan Publik Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
2. Penataan sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan, sehingga pelayanan dapat dilaksanakan secara lebih berkualitas, berdaya guna dan berhasil guna;
3. Tumbuh kreativitas, prakarsa dan peran serta masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.

1.5 Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan adalah pada seluruh proses pelayanan Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat.

1.6 Manfaat

Dengan tersedianya data Survey Indeks Persepsi Pelayanan Publik secara periodik, dapat diperoleh manfaat sebagai berikut :

1. Mengetahui kelemahan/kekurangan dari masing-masing unsur/indikator dalam penyelenggaraan pelayanan publik Unit Pelayanan Publik Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat.
2. Mengetahui kinerja penyelenggaraan pelayanan yang telah dilaksanakan oleh Unit Pelayanan Publik Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat secara periodik.
3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya yang perlu dilakukan.
4. Mengetahui Survey Indeks Persepsi Pelayanan Publik secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan publik Unit Pelayanan Publik Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat.
5. Memacu persaingan positif antar unit penyelenggara pelayanan pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah dalam upaya peningkatan kinerja

pelayanan.

6. Masyarakat dapat mengetahui gambaran tentang kinerja Unit Pelayanan Publik Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat.

1.7 Unsur/indikator Penilaian

Penyusunan Survey Indeks Persepsi Pelayanan Publik ini mengacu pada **Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat** terdapat 9 unsur/indikator,

yang meliputi :

1. Kesesuaian Persyaratan Pelayanan
2. Kemudahan Prosedur Pelayanan
3. Kecepatan Waktu dalam memberikan Pelayanan
4. Kewajaran biaya/tariff dalam pelayanan
5. Kesesuaian Produk pelayanan
6. Kompetensi/kemampuan petugas
7. Perilaku Petugas Pelayanan
8. Kualitas sarana dan prasarana'
9. Penanganan pengaduan pengguna layanan

BAB II

TEKNIS PELAKSANAAN

2.1 Pengertian

2.1.1 Pengertian Umum

1. **Survey Indeks Persepsi Pelayanan (IPP)** adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitas atas pendapat Pencari Keadilan dalam memperoleh pelayanan dari publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan.
2. **Penyelenggara pelayanan publik** adalah Instansi Pemerintah.
3. **Instansi Pemerintah** adalah Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
4. **Pelayanan publik** adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. **Unit pelayanan publik** adalah unit kerja pelayanan yang berupa Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan pelayanan kepada penerima pelayanan.
6. **Pemberi pelayanan publik** adalah pegawai instansi Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat yang melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. **Penerimaan pelayanan publik** adalah orang, Pengguna Jasa Peradilan yang menerima pelayanan dari aparaturnya penyelenggara pelayanan publik di Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat.
8. **Kepuasan pelayanan** adalah hasil pendapat dan penilaian orang, Pencari Keadilan, Pencari Keadilan, Para Pihak Berperkara terhadap kinerja

pelayanan yang diberikan oleh aparatur penyelenggara pelayanan publik di Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat.

9. **Biaya pelayanan publik** adalah segala biaya (dengan nama atau sebutan apapun) sebagai imbal jasa atas pemberian pelayanan publik di Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, yang besaran dan tata cara pembayarannya ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. **Unsur pelayanan** adalah faktor atau aspek yang terdapat dalam penyelenggaraan pelayanan kepada Pencari Keadilan sebagai variabel penyusunan Survey Kepuasan Pencari Keadilan untuk mengetahui kinerja Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat.
11. **Responden** adalah penerima pelayanan publik yang pada saat pencacahan sedang berada di lokasi unit pelayanan dan telah menerima pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat.

2.1.2 Unsur Survey Indeks Persepsi Pelayanan

A. Pengertian 9 Unsur Utama Pelayanan

Penyusunan Survey Indeks Persepsi Pelayanan ini mengacu pada **Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat** terdapat 9 unsur/indikator, namun untuk menyesuaikan pada pelayanan Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat maka unsur/indikator akan dirubah dengan tidak mengurangi kecukupan dari ketetapan peraturan tersebut.

Adapun 9 unsur/indikator yang dijadikan sebagai acuan pengukuran Survey Indeks Persepsi Pelayanan , yang meliputi :

1. **Persyaratan**, yaitu syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif;
2. **Sistem, mekanisme, prosedur**, yaitu tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan;

3. **Waktu penyelesaian**, yaitu jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan;
4. **Biaya/tarif**, yaitu ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan penyelenggara dan masyarakat;
5. **Produk spesifikasi jenis pelayanan**, yaitu hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.
6. **Kompetensi pelaksana**, yaitu kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pengalaman;
7. **Perilaku pelaksana**, yaitu sikap petugas dalam memberikan pelayanan;
8. **Penanganan pengaduan, saran dan masukan**, yaitu tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut;
9. **Kesopanan petugas pelayanan**, yaitu sikap dan perilaku petugas dalam memberikan pelayanan kepada Pencari Keadilan secara sopan serta saling menghargai dan menghormati;

2.1.3 Pengertian Khusus

1. **Tempat Parkir** adalah sebagian tempat atau wilayah atau lokasi di unit pelayanan yang digunakan untuk memarkir kendaraan yang dibawa oleh pengunjung selama proses pelayanan berlangsung.
2. **Ruang Tunggu** adalah suatu tempat atau ruangan di unit pelayanan yang berfungsi sebagai tempat pengunjung dalam menunggu antrian untuk mendapatkan pelayanan.
3. **Ruang Pelayanan** adalah suatu tempat atau ruangan di unit pelayanan yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya proses pelayanan.
4. **Toilet** adalah ruangan yang digunakan sebagai tempat untuk melakukan aktifitas seperti cuci tangan dan muka dan/atau kamar kecil (kakus).

2.2. Metodologi Penyusunan Survey Kepuasan Pencari Keadilan

a. Persiapan

Persiapan yang dilakukan oleh Tim Survey Indeks Persepsi Pelayanan meliputi;

a. Penyusunan kuisisioner

Kuisisioner dibagi atas 5 (lima) bagian yaitu :

- Bagian I : Identitas responden, meliputi : usia, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan, jumlah kunjungan yang berguna untuk menganalisis profil responden dalam penilaiannya terhadap unit pelayanan instansi pemerintah
- Bagian II : Waktu pelaksanaan Survey
- Bagian III : Jenis-jenis layanan.
- Bagian IV : Persepsi dan harapan terhadap mutu pelayanan publik, pendapat penerima pelayanan dengan pemberian suatu nilai dengan range nilai tertentu terhadap unsur-unsur pelayanan yang ditanyakan.
- Bagian V : Saran/opini/pendapat responden terhadap unit pelayanan.

b. Penyusunan bentuk jawaban

1. Survey Kepuasan Pencari Keadilan

Bentuk jawaban untuk menentukan Persepsi Publik melalui pertanyaan dari setiap unsur pelayanan secara umum mencerminkan tingkat kualitas pelayanan pada Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat dengan menggunakan barometer Rating mulai bintang 1 sampai dengan 6.

Persepsi layanan bintang 6 dengan kategori sempurna atau sangat baik dan kategor sangat buruk dengan bintang 1.

2. Persepsi dan Harapan

Responden diminta untuk memberikan suatu nilai terhadap mutu pelayanan unit pelayanan publik sesuai dengan persepsi

dan harapannya. Range nilai jawaban adalah **1 (satu)** sampai **6 (enam)**.

Maksud dari nilai persepsi adalah nilai yang diberikan oleh responden terhadap persepsi/yang dirasakan responden terhadap mutu pelayanan saat ini di unit terkait.

Maksud dari nilai harapan adalah nilai yang diberikan oleh responden terhadap keinginan/harapan responden terhadap mutu pelayanan yang ideal di unit terkait.

3. Saran Perbaikan

Responden diminta untuk memberikan saran perbaikan kepada Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerja dari Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat.

c. Penetapan responden dan lokasi

i. Jumlah responden

Responden dipilih secara acak (*purposive sampling*) yang ditentukan sesuai dengan cakupan wilayah Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat. Untuk memenuhi akurasi hasil penyusunan survey, jumlah minimal responden terpilih ditetapkan dari jumlah populasi penerima layanan, dengan dasar:

$$S = (\lambda^2 \cdot N \cdot P \cdot Q) / (d^2 (N-1) + \lambda^2 \cdot P \cdot Q)$$

ii. Lokasi dan waktu pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan di Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat pada jam kerja terhadap responden yang telah menerima pelayanan Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat dengan proporsional terhadap waktu banyaknya pengunjung.

iii. Target responden

Secara garis besar target responden adalah Pencari Keadilan

maupun penerima layanan internal yang telah berkunjung ke Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat dan telah mendapat pelayanan dari Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat.

b. Pengumpulan data

Dari jumlah responden yang telah ditetapkan, dilakukan pengumpulan informasi dengan cara acak dengan metode pengisian form elektronik mengenai unsur pelayanan yang telah ditetapkan dan saran perbaikan terhadap pelayanan di Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat.

Selain itu dilakukan pengumpulan data internal untuk memahami mengenai visi, misi, program, serta profil pelayanan publik dan pengunjung Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat.

c. Pengolahan Data

Nilai SKM dihitung dengan menggunakan “nilai rata-rata tertimbang” masing-masing unsur pelayanan. Dalam perhitungan Survey Kepuasan Pencari Keadilan terhadap misal 9 unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah unsur}} = \frac{1}{9} = 0,11$$

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{IKM} = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai penimbang}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{IKM Unit Pelayanan} \times 25$$

Mengingat unit pelayanan mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, maka setiap unit pelayanan dimungkinkan untuk:

- Menambah unsur yang dianggap relevan
- Memberikan bobot yang berbeda terhadap 9 unsur yang dominan dalam unit pelayanan, dengan catatan jumlah bobot seluruh unsur tetap 1

d. Analisa Data

Data yang telah masuk, akan dianalisa secara manual maupun dengan menggunakan software statistik seperti Minitab atau SPSS. Pengolahan data akan menghasilkan output:

Nilai Survei Kepuasan Pencari Keadilan (SKM) :

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL SKM	NILAI INTERVAL KONVERSI SKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	1,00-2,59	25,00-64,99	D	Tidak baik
2	2,60-3,06	65,00-76,60	C	Kurang baik
3	3,06-3,53	76,61-88,30	B	Baik
4	3,53-4,00	88,31-100,00	A	Sangat baik

Output lain yang dihasilkan adalah Diagram Matriks Persepsi dan Harapan Responden (Diagram Importance & Performance Matrix).



- Kuadran I : merupakan wilayah yang memuat faktor-faktor yang dianggap penting oleh pelanggan tetapi pada kenyataannya faktor-faktor ini belum sesuai dengan harapan pelanggan (tingkat kepuasan yang diperoleh sangat rendah). Variabel-variabel yang masuk dalam kuadran ini harus ditingkatkan. Caranya adalah organisasi melakukan perbaikan secara terus-menerus sehingga hasil kerja/performance unsur pelayanan yang ada dalam kuadran ini akan meningkat.
- Kuadran II : merupakan wilayah yang memuat faktor-faktor yang dianggap penting oleh pelanggan dan faktor-faktor yang dianggap penting oleh pelanggan sudah sesuai dengan yang dirasakan sehingga tingkat kepuasannya relatif lebih tinggi. Variabel-variabel yang masuk dalam kuadran ini harus tetap dipertahankan karena semua variabel ini menjadikan unsur tersebut unggul dimata pelanggan.
- Kuadran III : merupakan wilayah yang memuat faktor-faktor yang dianggap kurang penting oleh pelanggan dan pada kenyataannya kinerjanya tidak terlalu istimewa. Peningkatan variabel-variabel yang termasuk dalam kuadran ini dapat dipertimbangkan kembali karena pengaruhnya terhadap manfaat yang dirasakan oleh pelanggan sangat kecil.
- Kuadran IV : merupakan wilayah yang memuat faktor-faktor yang dianggap kurang penting oleh pelanggan dan dirasakan terlalu berlebihan. Variabel-variabel yang masuk dalam kuadran ini dapat dikurangi agar organisasi dapat melakukan penghematan, terutama dalam hal penghematan biaya.

e. Evaluasi dan Program

Tahapan akhir berisi kesimpulan terhadap hasil Persepsi Pelayanan Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat. Tim Survey Indeks Persepsi Pelayanan akan memberikan saran rekomendasi tindak lanjut yang harus dilakukan terutama pada unsur-unsur yang mempunyai nilai kurang baik, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerja pelayanan Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat kepada Pencari Keadilan.

BAB II

PROFIL DAN PEMBAHASAN

Pada semester II tahun 2023 dilakukan Survey Indeks Persepsi Pelayanan pada Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat. Survey ini mendapat respon positif dari masyarakat yang mengharapkan adanya perbaikan kinerja pelayanan dari unit pelayanan.

Berikut pembahasan mengenai pelayanan pada Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat yang telah dihimpun oleh surveyor Tim Survey Indeks Persepsi Pelayanan :

3.1 Profil Organisasi

Nama Instansi	: Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat
Alamat	: Jl. Brawijaya, Manokwari Provinsi Papua Barat
No. Telp/Fax	:
Waktu Pelayanan	: 07.00 – 15.00 WIB
Jenis Pelayanan	: Pelayanan Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, meliputi :
	1. Standar, Norma, Kriteria dan Prosedur Pelayanan Perkara Banding 2. Konsultasi Penyusunan dan Revisi Anggaran 3. Usul Belanja Modal 4. Izin Cuti 5. Izin Pencantuman Gelar 6. Izin Belajar 7. Pengusulan Pensiun 8. Kenaikan Pangkat Pegawai 9. Usul Promosi dan Mutasi 10. Konsultasi Bidang Keuangan 11. Izin Penelitian 12. Rekonsoliasi Keuangan 13. Pengajuan Remunerasi 14. Usul Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) 15. Pengelolaan Persuratan 16. Pelayanan Permintaan Data 17. Layanan lainnya.

Biaya Pelayanan : Biaya perkara ditetapkan sesuai dengan SK Ketua Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat

Persyaratan Administrasi : Tergantung pada jenis pelayanan

Jumlah Pengunjung : ± 5 - 25 orang/hari

Visi Misi : Visi :

"Terwujudnya Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat Yang Agung".

Misi :

1. Memberikan rasa keadilan masyarakat dengan cepat, sederhana dan biaya ringan;
2. Meningkatkan Profesionalisme Aparatur Peradilan Agama;
3. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien;
4. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan yang efektif dan efisien untuk mewujudkan pelayanan prima;
5. Meningkatkan sarana dan prasarana, untuk meningkatkan pelayanan dan kewibawaan peradilan.

Struktur Organisasi :

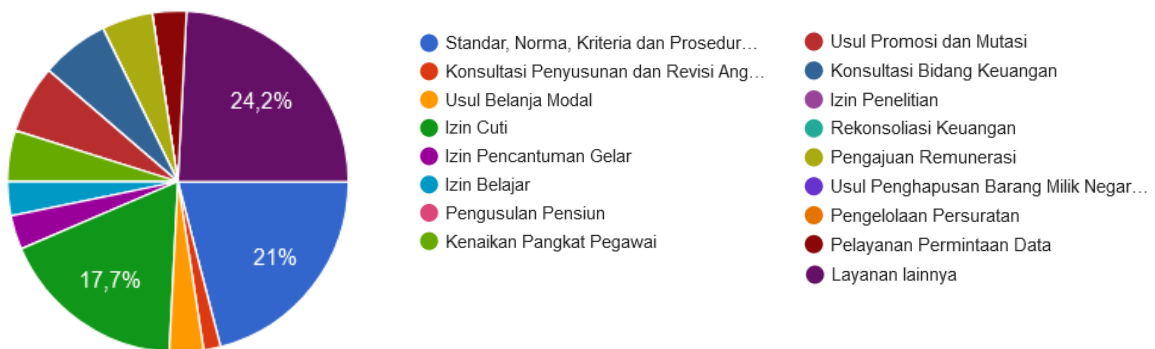


3.2. Profil Responden

3.2.1 Pelayanan

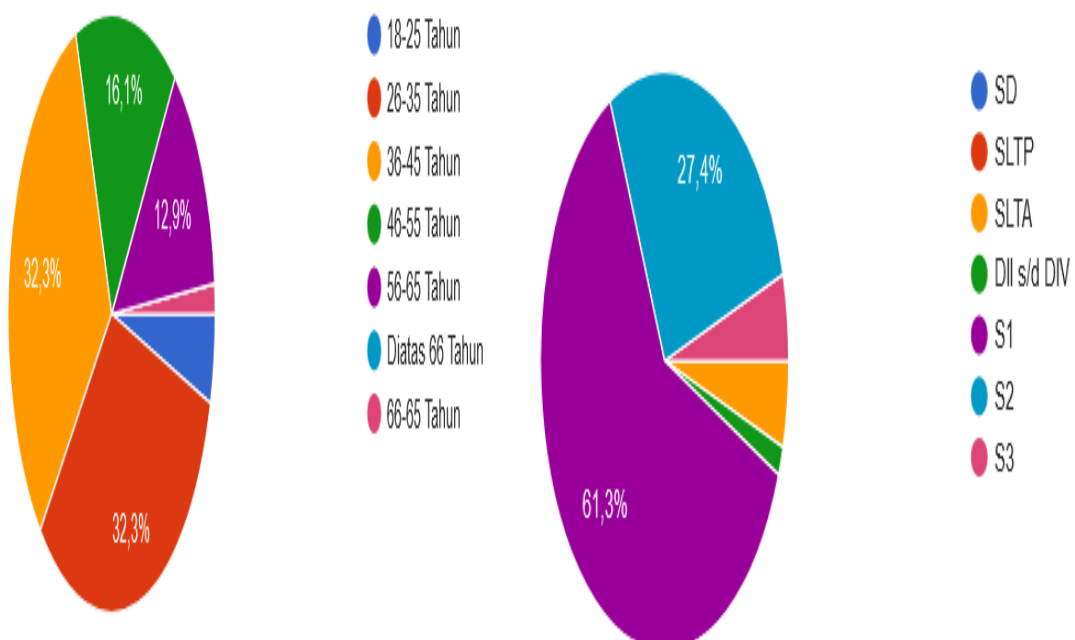
Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat memberikan pelayanan pada survey semester I tahun 2023, dengan komposisi responden berdasarkan pengguna jenis pelayanan dapat dilihat pada **grafik 3.1**

**GRAFIK 3.1 PERSENTASE RESPONDEN
PENGADILAN TINGGI AGAMA PAPUA BARAT
BERDASARKAN PENGGUNA JENIS PELAYANAN**



3.2.2 Karakteristik Responden

**GRAFIK 3.2 PERSENTASE KARAKTERISTIK RESPONDEN
PENGADILAN TINGGI AGAMA PAPUA BARAT**



Dominasi masing-masing karakteristik responden pada Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat dapat dilihat pada **Grafik 3.2**. Karakteristik responden yang mewakili pengunjung Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat secara keseluruhan perlu mendapat perhatian secara khusus, sehingga diharapkan dengan mengetahui tipe mayoritas pengunjung, Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat dapat mempersiapkan strategi dan pelayanan yang spesifik.

3.3. Tingkat Kepuasan Masyarakat

Hasil penyusunan Survey Indeks Persepsi Pelayanan pada Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat pada **Tahun 2023** mempunyai kategori **SANGAT BAIK**, yaitu dengan nilai rata-rata tertimbang SKM adalah **3,58** atau konversi IKM sebesar **89,55**.

Berikut adalah tabel nilai persepsi, interval IKM, interval konversi IKM, mutu pelayanan dan kinerja unit pelayanan menurut Permenpan RB No 14 tahun 2017 :

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL SKM	NILAI INTERVAL KONVERSI SKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	1,00-2,59	25,00-64,99	D	Tidak baik
2	2,60-3,06	65,00-76,60	C	Kurang baik
3	3,06-3,53	76,61-88,30	B	Baik
4	3,53-4,00	88,31-100,00	A	Sangat baik

Berbagai unsur yang terkandung dalam kuisisioner dapat dijadikan suatu acuan untuk melihat sistem pelayanan, dan secara rinci dapat dijadikan suatu pedoman perbaikan kinerja. Sehingga dari indeks per unsur ini dapat digunakan untuk melihat kekurangan dari sistem di suatu unit kerja, keluhan masyarakat, hal-hal yang harus diutamakan, unsur yang harus ditingkatkan dan harus dipertahankan.

Ada dua hal penting yang harus diutamakan dalam memaksimalkan kinerja di sektor pelayanan publik. Pertama adalah indikator efisiensi yang dapat dilihat dari mudahnya mendapatkan informasi pelayanan oleh masyarakat, kecepatan pelayanan dan biaya yang terjangkau oleh masyarakat. Kedua adalah indikator sufisiensi yang dapat dilihat dari bagaimana menyikapi

keluhan dari masyarakat, tidak terdapatnya diskriminasi dalam pelayanan serta pelayanan yang ada memang dibutuhkan oleh masyarakat.

**TABEL 3.3 NILAI RATA-RATA UNSUR PELAYANAN
PENGADILAN TINGGI AGAMA PAPUA BARAT**

No.	Unsur Pelayanan	Nilai Unsur Pelayanan	Mutu Pelayanan
1	Kesesuaian Persyaratan Pelayanan	3,61	Sangat Baik
2	Kemudahan Prosedur Pelayanan	3,62	Sangat Baik
3	Kecepatan Waktu dalam memberikan Pelayanan	3,63	Sangat Baik
4	Kewajaran biaya/tariff dalam pelayanan	3,56	Sangat Baik
5	Kesesuaian Produk pelayanan	3,57	Sangat Baik
6	Kompetensi/kemampuan petugas	3,49	Baik
7	Perilaku Petugas Pelayanan	3,56	Sangat Baik
8	Kualitas sarana dan prasarana	3,59	Sangat Baik
9	Penanganan pengaduan pengguna layanan	3,59	Sangat Baik
Rata-rata tertimbang		3,58	Sangat Baik

Catatan : Warna biru menunjukkan persentase yang tinggi pada unsur pelayanan

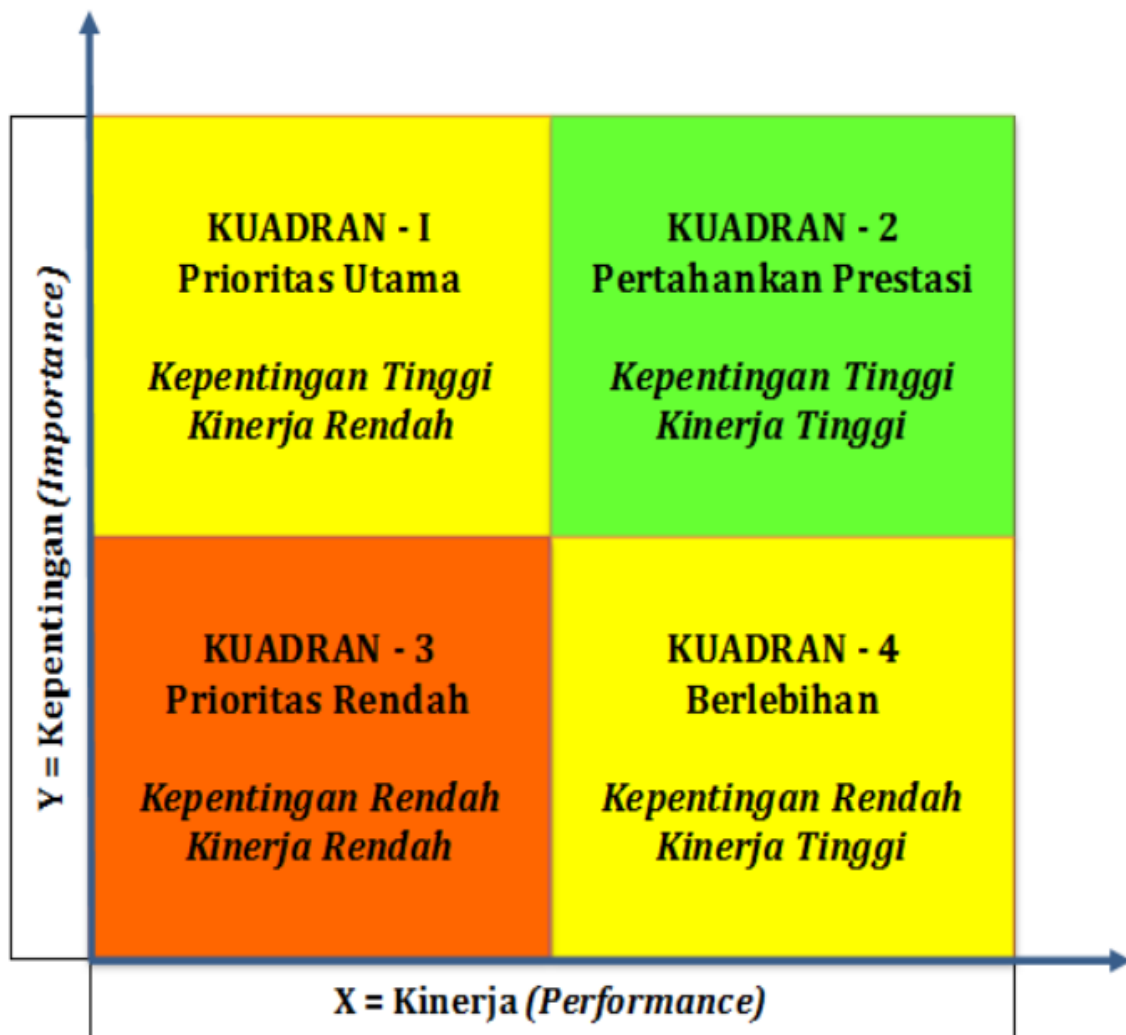
Berdasarkan **Tabel 3.3** menunjukkan bahwa dari 9 unsur pelayanan sudah sangat baik, 8 unsur pelayanan memiliki kualitas pelayanan yang sangat baik dan 1 unsur pelayanan memiliki kualitas yang baik. Unsur pelayanan yang dinilai masyarakat memiliki kualitas sangat baik adalah :

1. Kesesuaian Persyaratan Pelayanan
2. Kemudahan Prosedur Pelayanan
3. Kecepatan Waktu dalam memberikan Pelayanan
4. Kewajaran biaya/tariff dalam pelayanan
5. Kesesuaian Produk pelayanan
6. Perilaku Petugas Pelayanan
7. Kualitas sarana dan prasarana'
8. Penanganan pengaduan pengguna layanan

3.4. Analisa Antara Persepsi dan Harapan

Pada periode survey ini, dilakukan pencarian data yang lebih mendalam terhadap persepsi dan harapan responden terhadap mutu pelayanan unit pelayanan publik, sehingga dapat diketahui unsur-unsur pelayanan yang menjadi prioritas untuk ditingkatkan.

Analisa persepsi dan harapan dapat melihat seberapa besar harapan/kepentingan pelanggan dan persepsi/pendapat pelanggan atas keadaan suatu unsur pelayanan saat ini. Keadaan persepsi dan harapan pelanggan dapat dilihat melalui matriks, dimana matriks tersebut terdiri dari 4 kuadran sebagaimana diagram berikut :



Gambar 3.4 Diagram Matriks Persepsi dan Harapan Pelanggan di Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat

TABEL 3.4 VARIABEL-VARIABEL PADA TIAP-TIAP KUADRAN

Kuadran	Variabel
I	U6=Perilaku Petugas Pelayanan
II	U1=Kesesuaian Persyaratan Pelayanan U2=Kemudahan Prosedur Pelayanan U3=Kecepatan Waktu dalam memberikan Pelayanan U4=Kewajaran biaya/tariff dalam pelayanan U5=Kesesuaian Produk pelayanan U7=Perilaku Petugas Pelayanan U8=Kualitas sarana dan prasarana' U9=Penanganan pengaduan pengguna layanan
III	Tidak Ada
IV	Tidak Ada

Dari hasil diagram tersebut dapat dibuat suatu strategi untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Strategi tersebut dibuat berdasarkan posisi masing-masing variabel dalam kuadran.

Terdapat 1 unsur pelayanan yang masuk dalam Kuadran I. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa unsur-unsur yang terdapat di Kuadran I merupakan unsur-unsur yang dinilai masyarakat memiliki kualitas pelayanan yang masih rendah namun harapan masyarakat terhadap kualitas pelayanan unsur tersebut tinggi sehingga pada unsur-unsur yang masuk di Kuadran I perlu dilakukan perbaikan. Unsur-unsur yang diprioritaskan untuk dilakukan perbaikan antara lain :

No	Prioritas Unsur	Program/Kegiatan	Waktu				PIC
			Juli	Agst	Sept	Okt	
1	U6	Melakukan Breafing berkala kepada petugas layanan terkait dengan		√			Pimpinan Unit

		penerapan Budaya Kerja 5S dan 5R					
--	--	--	--	--	--	--	--

Semua unsur tersebut berdasarkan persepsi masyarakat sudah baik. Namun hal tersebut masih belum sesuai dengan harapan masyarakat yang menginginkan pelayanan yang lebih baik dari kualitas pelayanan yang diberikan saat ini.

3.5. Kesimpulan Hasil Survey Indeks Persepsi Pelayanan

Berdasarkan hasil pengukuran Survey Indeks Persepsi Pelayanan pada Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat pada periode Semester I Tahun 2023, didapatkan kesimpulan sebagai berikut :

No.	Kesimpulan	Keterangan
1.	Nilai IKM	89,55
2.	Kategori	Sangat Baik
3.	Unsur Terendah	U6= Perilaku Petugas Pelayanan
4.	Unsur Tertinggi	U3=Kecepatan Waktu dalam memberikan Pelayanan
5.	Prioritas Perbaikan	U6= Perilaku Petugas Pelayanan

3.6. Opini Responden

Untuk memotivasi dan memperbaiki kinerja suatu unit pelayanan pemerintah yang peduli untuk memberikan yang terbaik untuk masyarakat, maka masukan/opini/pendapat masyarakat sangat diperlukan. Selama pelaksanaan survey, surveyor menampung masukan/opini/pendapat dari masyarakat dengan harapan aspirasi dari masyarakat dapat diakomodir demi kemajuan bersama. Beberapa opini masyarakat dapat digunakan untuk memperbaiki unsur-unsur pelayanan yang dianggap kurang oleh masyarakat.

Berikut adalah masukan/opini/pendapat dari responden terhadap pelayanan Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat :

1. Tetap konsisten untuk berbuat yang lebih baik

2. Semoga Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat semakin sukses
3. Baik tapi masih perlu ditingkatkan
4. Pertahankan pelayanan Prima selama ini
5. Pelayanan Berkualitas, Pertahankan, Bintang 5
6. Bagus
7. Pengadilan Tinggi Agama Pabar semoga makin sukses, bersama kita pasti bisa, Dll.

3.6.1 Saran

Berikut ini saran-saran yang disampaikan masyarakat terhadap Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat.

1. Penyediaan Pertemuan Virtual Baiknya Dikelola Secara Profesional Sehingga Rapat Koordinasi dan Koordinasi Berjalan Lancar.
2. Lebih meningkatkan koordinasi dan pembinaan secara rutin terhadap seluruh satker dalam wilayah PTA Papua barat.
3. Sangat di perlukan inovasi-inovasi pelayanan smempercepat kerja kerja pelaporan, sehingga ke depan diharapkan PTA Papua Barat dapat menjadi pelopor inovasi pelaporan terpadu baik di bidang kesekretariatan.

BAB IV

KESIMPULAN, SARAN DAN PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisa terhadap hasil pengolahan survei Indeks Persepsi Pelayanan pada Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut :

1. Hasil penyusunan Kepuasan Masyarakat pada Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat Semester I Tahun 2023 menunjukkan kategori **SANGAT BAIK**, yaitu dengan nilai rata-rata tertimbang IKM **3,58** atau konversi IKM **89,55**.
2. Hasil pengolahan Kepuasan Masyarakat memberikan informasi bahwa :
Unsur – unsur pelayanan tertinggi dari hasil survey adalah **U3**=Kecepatan Waktu dalam memberikan Pelayanan

4.2 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan berdasarkan analisa data yang diperoleh pada survei Semester I Tahun 2023 :

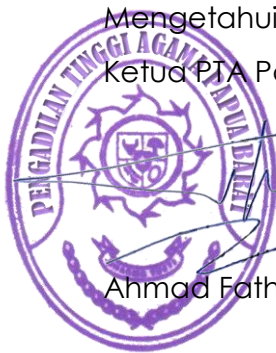
1. Berdasarkan hasil analisa persepsi dan harapan pelanggan, maka unsur-unsur yang perlu mendapat prioritas perbaikan, yaitu **U6**=Perilaku Petugas Pelayanan
2. Perlunya pelatihan-pelatihan atau kegiatan serupa yang dapat memperbaiki kualitas kepribadian petugas pelayanan. Peningkatan kompetensi petugas pelayanan tidak hanya diperuntukkan sebatas peningkatan kemampuan administratif akan tetapi unsur yang menjadi prioritas perbaikan adalah berkaitan dengan perilaku 5R5S. Dengan demikian diharapkan pelayanan yang diberikan dapat memenuhi harapan pelanggan secara tersurat maupun tersirat.

4.3. Penutup

Demikian Laporan survei Indeks Persepsi Pelayanan pada Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat Semester I Tahun 2023 sebagai bahan untuk perbaikan kinerja pelayanan public pada Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat.

Mengetahui

Ketua PTA Papua Barat



Ahmad Fathoni

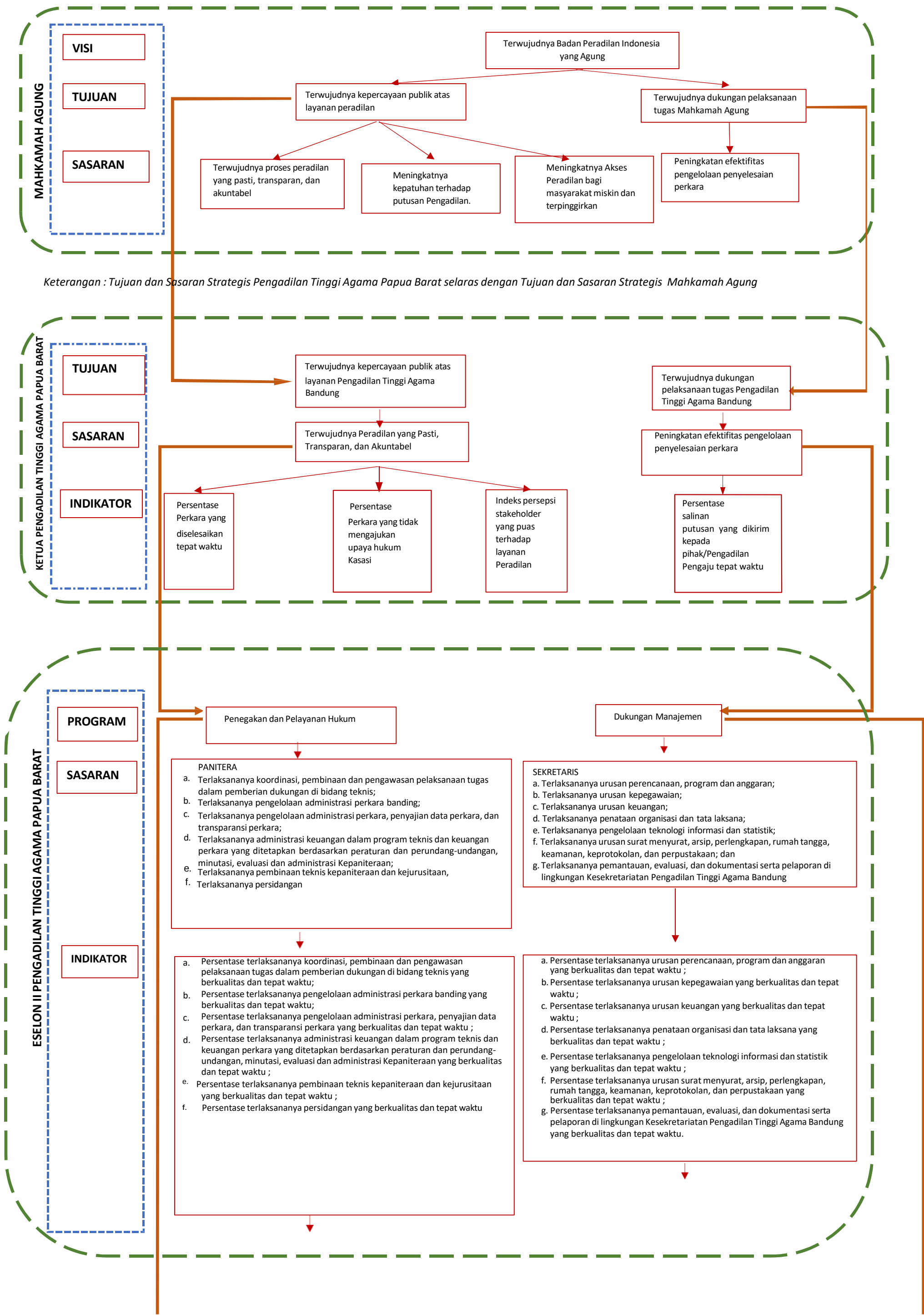
Manokwari, 4 Juli 2023

Ketua Tim Survey



Fakhurrizi

POHON KINERJA PENGADILAN TINGGI AGAMA PAPUA BARAT



ESELON IV BAGIAN KEPANITERAAN PENGADILAN TINGGI AGAMA PAPUA BARAT

KEGIATAN

Melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis, administrasi perkara, dan persidangan

SASARAN

PANITERA MUDA BANDING

- Terlaksananya pelaksanaan persidangan yang baik
- Terlaksananya pemberkasan perkara secara lengkap
- Terlaksananya pengelolaan administrasi perkara melalui administrasi SIPP dengan benar
- Terlaksananya direktid pimpinan sebagai Sekretaris Area Penataan Tata Laksana Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM
- Terlaksananya direktif pimpinan sebagai asisten pembinaan dan pengawasan pengadilan agama se-jawa barat
- Terlaksananya direktif pimpinan sebagai pendamping Asesor Eksternal/ Monev SIPP
- Terlaksananya penerimaan perkara banding
- Terlaksananya pengadministrasian biaya perkara pada perkara banding
- Terlaksananya upload putusan dan anonimasi putusan ke dalam aplikasi SIPP sesuai aturan
- Terlaksananya penggandaan salinan putusan sesuai ketentuan

PANITERA MUDA HUKUM

- Terselenggaranya pelaksanaan persidangan yang baik;
- Terlaksananya pemberkasan perkara secara lengkap
- Terlaksananya pengelolaan administrasi perkara melalui administrasi SIPP dengan benar
- Terlaksananya upload putusan ke dalam aplikasi SIPP
- Terlaksananya penggandaan salinan putusan sesuai ketentuan
- Terlaksananya direktif pimpinan sebagai Asisten Pembinaan dan Pengawasan Pengadilan Agama Se Jawa Barat
- Terlaksananya direktif pimpinan sebagai Pendamping Asesor Eksternal / Monev SIPP
- Terkoordinasinya pengumpulan pengaduan dan pelayanan masyarakat
- Terkoordinasinya penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara;
- Terlaksananya pengelolaan surat masuk dan keluar pada Panitera Muda Hukum;
- Terlaksananya pengelolaan berkas perkara aktif dan inaktif pada ruang arsip perkara
- Terkoordinasinya pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara sebagai bahan pengawasan
- Terlaksananya retensi arsip perkara tahun 2017
- Terlaksananya direktif pimpinan sebagai Anggota Area V Penguatan Pengawasan Pembangunan Zona Integritas untuk menuju WBK dan WBBM

PANITERA PENGGANTI

- Terselenggaranya pelaksanaan persidangan yang baik
- Terlaksananya pemberkasan perkara secara lengkap
- Terlaksananya pengelolaan administrasi perkara melalui administrasi SIPP dengan benar
- Terlaksananya anonimasi putusan yang sesuai dengan aturan
- Terlaksananya penggandaan salinan putusan sesuai ketentuan
- Terlaksananya direktif pimpinan sebagai Asisten Pembinaan dan Pengawasan Pengadilan Agama Se Jawa Barat
- Terlaksananya direktif pimpinan sebagai Pendamping Asesor Eksternal / Monev SIPP

INDIKATOR

- Persentase jumlah berita acara sidang yang diselesaikan tepat waktu;
- Persentase tingkat kesesuaian perkara yang diminutasi dengan perkara yang BHT;
- Persentase Jumlah perkara banding yang datanya telah masuk dalam aplikasi SIPP;
- Persentase Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Area Penataan Tata Laksana;
- Persentase Jumlah kegiatan Pembinaan dan Pengawasan;
- Persentase Tingkat kesesuaian Hasil Asesment/Monev;
- Persentase penerimaan perkara banding;
- Persentase terlaksananya pengadministrasian biaya perkara pada perkara banding;
- Persentase Jumlah putusan yang diupload;
- Persentase jumlah salinan putusan yang digandakan;

- Presentase jumlah berita acara sidang yang diselesaikan tepat waktu
- Persentase jumlah perkara banding yang telah diminutasi
- Persentase jumlah perkara banding yang datanya telah masuk dalam aplikasi SIPP
- Persentase tingkat kesesuaian perkara putus dengan yang diupload ke dalam aplikasi SIPP
- Persentase jumlah salinan putusan yang digandakan
- Persentase jumlah kegiatan Pembinaan dan Pengawasan
- Persentase jumlah kegiatan Asesment/Monev
- Persentase jumlah surat pengaduan yang dihimpun
- Persentase laporan statistik perkara, keuangan perkara dan penggunaan biaya perkara setiap bulan
- Persentase jumlah dokumen hasil pengelolaan surat masuk dan surat keluar
- Persentase penyusunan berkas perkara aktif dan inaktif pada arsip perkara
- Persentase monitoring keuangan perkara dan data perkara melalui validasi harian, dan Komdanas aplikasi kinsatker
- Persentase jumlah arsip yang akan diretensi tahun 2017
- Persentase Pemenuhan Eviden Area V Penguatan Pengawasan

- Persentase Jumlah berita acara sidang yang diselesaikan
- Persentase jumlah perkara banding yang diminutasi sesuai dengan peraturan yang berlaku
- Persentase jumlah perkara banding yang datanya telah diinput kedalam aplikasi SIPP
- Persentase anonimasi putusan yang telah diselesaikan
- Persentase jumlah salinan putusan yang digandakan
- Persentase jumlah kegiatan Pembinaan dan Pengawasan yang diselesaikan
- Persentase jumlah kegiatan Asesment SIPP yang diselesaikan

ESELON III BAGIAN KESEKRETARIATAN PENGADILAN TINGGI AGAMA PAPUA BARAT

KEGIATAN

Melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi , organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana prasarana

SASARAN

KABAG PERENCANAAN DAN KEPEGAWAIAN

- Terkoordinirnya penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan dan penyusunan program dan anggaran;
- Terkoordinirnya penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan formasi, pendataan dan pengembangan pegawai, pengusulan kenaikan pangkat, pemindahan dan mutasi, pengusulan pemberhentian dan pensiun serta pengelolaan Sasaran Kerja Pegawai, administrasi jabatan fungsional, dan pengurusan ASKES dan disiplin pegawai, serta penyusunan laporan kepegawaian;
- Terkoordinirnya penyiapan bahan pelaksanaan penelaahan, penataan, dan evaluasi organisasi dan tata laksana;
- Terkoordinirnya penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan teknologi informatika dan statistik; dan
- Terkoordinirnya penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dokumentasi, dan pelaporan.

INDIKATOR

- Persentase terkoordinirnya penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan dan penyusunan program dan anggaran yang berkualitas dan tepat waktu ;
- Persentase terkoordinirnya penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan formasi, pendataan dan pengembangan pegawai, pengusulan kenaikan pangkat, pemindahan dan mutasi, pengusulan pemberhentian dan pensiun serta pengelolaan Sasaran Kerja Pegawai, administrasi jabatan fungsional, dan pengurusan ASKES dan disiplin pegawai, serta penyusunan laporan kepegawaian yang berkualitas dan tepat waktu ;
- Persentase terkoordinirnya penyiapan bahan pelaksanaan penelaahan, penataan, dan evaluasi organisasi dan tata laksana yang berkualitas dan tepat waktu ;
- Persentase terkoordinirnya penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan teknologi informatika dan statistik yang berkualitas dan tepat waktu ;
- Persentase terkoordinirnya penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dokumentasi, dan pelaporan yang berkualitas dan tepat waktu.

KABAG UMUM DAN KEUANGAN

- Terkoordinasinya Pengelolaan Anggaran, Perbendaharaan, Akuntansi dan Verifikasi
- Terkoordinasinya Pengelolaan Barang Milik Negara
- Terkoordinasinya Pemantauan serta Penyusunan Laporan Keuangan
- Terkoordinasinya pelaksanaan surat menyurat
- Terkoordinasinya pelaksanaan kearsipan
- Terkoordinasinya Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
- Terkoordinasinya pelaksanaan perawat dan pemeliharaan gedung, sarana dan prasarana
- Terkoordinasinya pengelolaan perpustakaan
- Terkoordinasinya pelaksanaan urusan keamanan, keprotokolan dan hubungan masyarakat

- Persentase Realisasi Anggaran
- Persentase Dokumen Pengelolaan BMN yang diselesaikan
- Persentase Pemantauan dan Penyusunan Laporan Keuangan
- Persentase surat menyurat yang diselesaikan sesuai SOP
- Persentase arsip yang telah dicatat dan disimpan ke dalam lemari arsip
- Persentase Pengadaan Barang/Jasa yang diselesaikan
- Persentase pelaksanaan perawatan dan pemeliharaan gedung, sarana dan prasarana yang diselesaikan
- Persentase jumlah buku yang diinput ke dalam aplikasi slims
- Persentase jumlah security yang bertugas sesuai dengan SOP

ESELON V BAGIAN KESEKRETARIATAN PENGADILAN TINGGI AGAMA PAPUA BARAT

KEGIATAN

Melaksanakan penyiapan bahan perencanaan program dan pelaksanaan program dan anggaran, pemantauan, evaluasi, dokumentasi, serta penyusunan laporan.

SASARAN

KASUB RPA

- Terverifikasinya Dokumen Review Renstra PTA Bandung
- Terverifikasinya pelaksanaan review IKU PTA Bandung
- Terverifikasinya Dokumen RKT dan PKT PTA Bandung
- Terverifikasinya Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL) PTA Bandung
- Terverifikasinya Usulan RKAK/L Pengadilan Agama Wilayah Jawa Barat
- Terverifikasinya Draft Laporan Pelaksanaan Kegiatan
- Terverifikasinya Draft Laporan Hasil Monitoring Pelaksanaan Perjanjian Kinerja PTA Bandung dan Pengadilan Agama Se-Jawa Barat
- Terverifikasinya Draft LKJIP PTA Bandung

INDIKATOR

- Persentase Dokumen Renstra yang diselesaikan
- Persentase dokumen review IKU PTA Bandung yang diselesaikan
- Persentase dokumen RKT dan PKT yang diselesaikan
- Persentase jumlah dokumen RKAKL yang diselesaikan
- Persentase jumlah usulan RKAK/L yang diselesaikan
- Persentase Draft Dokumen SAKIP yang diselesaikan
- Persentase Draft Laporan Hasil Monitoring Pelaksanaan Perjanjian Kinerja yang diselesaikan
- Persentase LKJIP yang disampaikan tepat waktu

- Terverifikasinya Draft Dokumen Usulan kenaikan pangkat
- Terverifikasinya Pemberhentian dan pensiun pegawai dengan tepat waktu
- Terverifikasinya Draft Surat Kenaikan Gaji Berkala
- Terverifikasinya Draft Usulan Tugas Belajar
- Terverifikasinya Draft Usulan Kartu Suami dan Istri
- Terverifikasinya Draft Analisa Kebutuhan Diklat
- Terverifikasinya Draft Laporan LHKPN dan LHKASN
- Terverifikasinya draft usulan penempatan pegawai / mutasi
- Terverifikasinya draft Anjab dan ABK
- Terverifikasinya draft review SOP
- Terverifikasinya pelaksanaan disiplin pegawai
- Terverifikasinya draft penelaahan, penataan dan evaluasi organisasi dan tatalaksana
- Terverifikasinya draft penilaian kinerja ASN
- Terverifikasinya pemberian penghargaan & fasilitas ASN
- Inovasi Teknologi Informasi siap diimplementasikan
- Terverifikasinya Pelaksanaan Pemeliharaan Teknologi Informasi

- Persentase pegawai yang diusulkan kenaikan pangkat sesuai dengan ketentuan
- Persentase usulan pensiun yang proses
- Persentase pegawai yang diusulkan kenaikan gaji berkala sesuai dengan ketentuan
- Persentase Usulan Izin Belajar Yang Diproses
- Persentase Usulan Kartu Suami/Istri yang diproses
- Persentase dokumen Analisa Kebutuhan Diklat yang diselesaikan
- Persentase jumlah pegawai yang telah melaporkan LHKPN dan LHKASN
- Persentase jumlah usulan yang ditindaklanjuti
- Persentase dokumen ABK dan Anjab yang diselesaikan
- Persentase SOP Kepegawaian & TI yang telah selesai ditelaah /

Melaksanakan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, perpustakaan, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi, dokumentasi, serta penyusunan laporan.

KASUB TURT

- Terlaksananya pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan penggandaan;
- Terlaksananya pelaksanaan urusan perawatan dan pemeliharaan gedung, sarana dan prasarana serta perlengkapan dan perpustakaan;
- Terlaksananya pelaksanaan urusan keamanan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;

- Persentase terlaksananya urusan surat menyurat, kearsipan dan penggandaan yang berkualitas dan tepat waktu
- Persentase terlaksananya urusan perawatan dan pemeliharaan gedung, sarana dan prasarana serta perlengkapan dan perpustakaan yang terlaksanasecara berkualitas dan tepat waktu
- Persentase terlaksananya urusan keamanan, keprotokolan dan hubungan masyarakat yang berkualitas dan tepat waktu.

KASUB KEU & PELAPORAN

- Terlaksananya pelaksanaan pengelolaan anggaran, perbendaharaan akuntansi dan verifikasi, pengelolaan barang milik negara serta pelaporan keuangan; dan
- Terlaksananya penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, serta penyusunan laporan.

- Persentase terlaksananya pengelolaan anggaran, perbendaharaan akuntansi dan verifikasi, pengelolaan barang milik negara serta pelaporan keuangan yang berkualitas dan tepat waktu.
- Persentase terlaksananya penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, serta penyusunan laporan yang berkualitas dan tepat waktu.

Manokwari, 8 Januari 2024
Ketua
Ahmad Fathoni

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB
UNIT ORG
UNIT KERJA
ALOKASI

(005)
(01)
(526718)
Rp. 13,213,773,000

MAHKAMAH AGUNG
Badan Urusan Administrasi
Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
005.01.WA 1066 1066.EBA	Program Dukungan Manajemen Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi Layanan Dukungan Manajemen Internal[Base Line]	2.0 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit		13,213,773,000 12,088,803,000 12,088,803,000	
1066.EBA.962 051 A 524114	Lokasi : KAB. MANOKWARI Layanan Umum Dukungan Manajemen Non Operasional Satker Daerah Bimbingan Teknis ASN Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (KPPN.065-Manokwari) - Bimbingan Teknis ASN - tambahan bimtek ASN	1.0 Laporan 1.0 THN 1.0 keg		85,958,000 85,958,000 85,958,000 85,958,000	RM
1066.EBA.994 001 A 511111	Layanan Perkantoran Gaji dan Tunjangan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Belanja Gaji Pokok PNS (KPPN.065-Manokwari) - Belanja Gaji Pokok PNS	1.0 Layanan 1.0 THN		12,002,845,000 10,248,215,000 10,248,215,000 1,674,288,000	RM
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS (KPPN.065-Manokwari) - Belanja Pembulatan Gaji PNS	1.0 THN	1,674,288,200	1,674,288,000 50,000	RM
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (KPPN.065-Manokwari) - Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	1.0 THN	50,000	50,000 167,372,000	RM
511122	Belanja Tunj. Anak PNS (KPPN.065-Manokwari) - Belanja Tunj. Anak PNS	1.0 THN	167,372,280	167,372,000 100,000,000	RM
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS (KPPN.065-Manokwari) - Belanja Tunj. Struktural PNS	1.0 THN	100,000,000	100,000,000 165,520,000	RM
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS (KPPN.065-Manokwari) - Belanja Tunj. Fungsional PNS	1.0 THN	165,520,000	165,520,000 5,263,940,000	RM
511125	Belanja Tunj. PPh PNS (KPPN.065-Manokwari) - Belanja Tunj. PPh PNS	1.0 THN	5,263,940,000	5,263,940,000 1,363,659,000	RM
511126	Belanja Tunj. Beras PNS (KPPN.065-Manokwari) - Belanja Tunj. Beras PNS	1.0 THN	1,363,659,000	1,363,659,000 70,971,000 70,971,000	RM

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (005) MAHKAMAH AGUNG
 UNIT ORG (01) Badan Urusan Administrasi
 UNIT KERJA (526718) Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat
 ALOKASI Rp. 13,213,773,000

Halaman : 2

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
511129	<u>Belanja Uang Makan PNS</u> (KPPN.065-Manokwari)			401,190,000	RM
	- Belanja Uang Makan PNS	1.0 THN	401,190,000	401,190,000	
511138	<u>Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS</u> (KPPN.065-Manokwari)			333,580,000	RM
	- Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS	1.0 THN	333,580,000	333,580,000	
511151	<u>Belanja Tunjangan Umum PNS</u> (KPPN.065-Manokwari)			100,000,000	RM
	- Belanja Tunjangan Umum PNS	1.0 THN	100,000,000	100,000,000	
511157	<u>Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim</u> (KPPN.065-Manokwari)			607,645,000	RM
	- Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim	1.0 THN	607,645,514	607,645,000	
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor			1,754,630,000	
A	<i>Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran</i>			<i>443,814,000</i>	
521111	<u>Belanja Keperluan Perkantoran</u> (KPPN.065-Manokwari)			376,584,000	RM
	- Honor Pramubakti [4 ORG x 13 BLN]	52.0 OB	3,449,000	179,348,000	
	- Honor Satpam [2 ORG x 13 BLN]	26.0 OB	3,793,000	98,618,000	
	- Honor Pengemudi [2 ORG x 13 BLN]	26.0 OB	3,793,000	98,618,000	
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.065-Manokwari)			67,230,000	RM
	- Keperluan Sehari-hari Perkantoran	1.0 thn	67,230,000	67,230,000	
B	<i>Langganan Daya dan Jasa</i>			<i>133,189,000</i>	
521111	<u>Belanja Keperluan Perkantoran</u> (KPPN.065-Manokwari)			1,000,000	RM
	- Lisensi Zoom	1.0 thn	1,000,000	1,000,000	
521114	<u>Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat</u> (KPPN.065-Manokwari)			1,263,000	RM
	- Pengiriman Surat Pos	12.0 BLN	105,250	1,263,000	
522112	<u>Belanja Langganan Telepon</u> (KPPN.065-Manokwari)			50,000	RM
	- Langganan Telpon	12.0 BLN	4,167	50,000	
522113	<u>Belanja Langganan Air</u> (KPPN.065-Manokwari)			50,000	RM
	- Langganan Air	12.0 BLN	4,167	50,000	
522141	<u>Belanja Sewa</u> (KPPN.065-Manokwari)			130,826,000	RM
	- Sewa Bandwith Internet	12.0 bln	10,902,167	130,826,000	
C	<i>Pemeliharaan kantor</i>			<i>301,476,000</i>	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORG (01) Badan Urusan Administrasi
UNIT KERJA (526718) Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat
ALOKASI Rp. 13,213,773,000

Halaman : 3

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
523111	<u>Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan</u> (KPPN.065-Manokwari)			205,356,000	RM
	- Pemeliharaan Gedung Kantor	596.0 m2	339,490	202,336,000	
	- Pemeliharaan Halaman Gedung Kantor	604.0 m2	5,000	3,020,000	
523121	<u>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.065-Manokwari)			96,120,000	RM
	- Mobil BBM Kendaraan Sewa	3.0 unit	26,733,334	80,200,000	
	- PC/Laptop	21.0 unit	238,096	5,000,000	
	- Printer	21.0 unit	5,715	120,000	
	- AC	8.0 unit	1,287,500	10,300,000	
	- Inventaris kantor [25 ORG x 1 THN]	25.0 OT	20,000	500,000	
D	<i>Koordinasi ke Pusat/Tk. Banding/Tk. Pertama</i>			150,000,000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.065-Manokwari)			150,000,000	RM
	- Perjalanan Dinas	1.0 THN	150,000,000	150,000,000	
E	<i>Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor</i>			206,024,000	
521115	<u>Belanja Honor Operasional Satuan Kerja</u> (KPPN.065-Manokwari)			74,004,000	RM
	- KPA	12.0 BLN	1,813,000	21,756,000	
	- PPK	12.0 BLN	1,764,000	21,168,000	
	- PPSPM	12.0 BLN	990,000	11,880,000	
	- Bendahara	12.0 BLN	700,000	8,400,000	
	- Staf Pengelola Keuangan [2 ORG x 12 BLN]	24.0 OB	450,000	10,800,000	
521119	<u>Belanja Barang Operasional Lainnya</u> (KPPN.065-Manokwari)			132,020,000	RM
	- Keperluan sehari-hari Perkantoran lainnya	1.0 THN	47,180,000	47,180,000	
	- Pakaian Dinas Pegawai	44.0 STEL	1,212,000	53,328,000	
	- Pakaian Dinas Pramubakti	8.0 STEL	782,000	6,256,000	
	- Pakaian Dinas Pengemudi	4.0 STEL	782,000	3,128,000	
	- Pakaian Dinas Satpam	4.0 STEL	2,032,000	8,128,000	
	- Rapat Koordinasi Internal	12.0 BLN	1,166,667	14,000,000	
F	<i>Hak Keuangan dan fasilitas Hakim Ad-Hoc</i>			312,570,000	
522141	<u>Belanja Sewa</u> (KPPN.065-Manokwari)			312,570,000	RM
	- Sewa Rumah Dinas Hakim	19.0 OB	2,070,000	39,330,000	
	- Sewa Rumah Dinas Hakim [11 ORG x 12 BLN]	132.0 OB	2,070,000	273,240,000	
G	<i>KONSUL KE PUSAT DAN PENGAWASAN TK BANDING</i>			207,557,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORG (01) Badan Urusan Administrasi
UNIT KERJA (526718) Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat
ALOKASI Rp. 13,213,773,000

Halaman : 4

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.065-Manokwari)			207,557,000	RM
	KONSUL KE PUSAT DAN PENGAWASAN TK BANDING	1.0 THN	207,557,000	207,557,000	
1071	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung			1,124,970,000	
1071.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal[Base Line]	13.0 Unit, m2, Paket		1,124,970,000	
	Lokasi : KAB. MANOKWARI				
1071.EBB.951	Layanan Sarana Internal	13.0 Unit		1,124,970,000	U
051	Pengadaan kendaraan bermotor			943,910,000	
A	Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda 4			870,500,000	
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin (KPPN.065-Manokwari / Reg. 28USM7TA)			870,500,000	HLD
	Kendaraan Operasional Roda 4	1.0 unit	327,000,000	327,000,000	
	Kendaraan Operasional Roda 4	2.0 unit	271,750,000	543,500,000	
B	Pengadaan Kendaraan Roda 2			73,410,000	
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin (KPPN.065-Manokwari / Reg. 28USM7TA)			73,410,000	HLD
	Kendaraan Operasional Roda 2	3.0 Unit	24,470,000	73,410,000	
052	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi			90,000,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			90,000,000	
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin (KPPN.065-Manokwari)			90,000,000	
	PC Kepaniteraan [3 Unit]	3.0 Unit	15,000,000	45,000,000	
	PC Unit [1 Unit]	1.0 Unit	25,000,000	25,000,000	
	Printer [4 Unit]	4.0 Unit	5,000,000	20,000,000	
053	Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran			91,060,000	RM
A	Pengadaan Fasilitas Perkantoran			91,060,000	
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin (KPPN.065-Manokwari / Reg. 28USM7TA)			56,060,000	
	Sofa	2.0 unit	6,100,000	12,200,000	
	Kulkas Ketua	1.0 Unit	3,441,000	3,441,000	
	Kulkas	3.0 Unit	3,059,000	9,177,000	
	Sprind Bed	2.0 Unit	6,100,000	12,200,000	
	Mesin Cuci	2.0 Unit	2,318,000	4,636,000	
	Lemari Ketua	1.0 Unit	2,136,750	2,136,000	
	Lemari	3.0 Unit	2,560,250	7,680,000	
	Mesin Babat Rumput	1.0 Unit	2,516,500	2,516,000	
	Meja Rapat	2.0 Unit	1,037,000	2,074,000	HLD

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

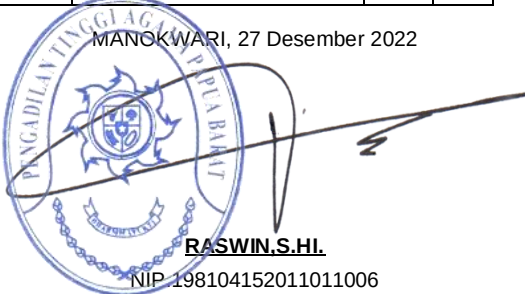
KEMEN/LEMB (005) MAHKAMAH AGUNG
 UNIT ORG (01) Badan Urusan Administrasi
 UNIT KERJA (526718) Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat
 ALOKASI Rp. 13,213,773,000

Halaman : 5

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin (KPPN.065-Manokwari) - AC	5.0 unit	7,000,000	35,000,000 35,000,000	RM

Catatan : 1. U = Komponen Utama
 2. P = Komponen Penunjang
 3. * = Blokir

MANOKWARI, 27 Desember 2022



RASWIN,S.HI.
 NIP.198104152011011006

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

UNIT KERJA

ALOKASI

(005)

(01)

(526718)

Rp. 3,790,101,000

MAHKAMAH AGUNG

Badan Urusan Administrasi

Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
005.01.WA	Program Dukungan Manajemen			3,790,101,000	
1066	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi			3,790,101,000	
1066.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal[Base Line]	2.0 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit		3,790,101,000	
1066.EBA.962	Lokasi : KAB. MANOKWARI Layanan Umum	1.0 Laporan		218,946,000	
051	Dukungan Manajemen Non Operasional Satker Daerah			218,946,000	
A	Bimbingan Teknis ASN			218,946,000	
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (KPPN.065-Manokwari)			218,946,000	9 RM
	- Bimbingan Teknis ASN	1.0 THN	218,946,000	218,946,000	*
1066.EBA.994	Layanan Perkantoran	1.0 Layanan		3,571,155,000	
001	Gaji dan Tunjangan			2,000,000,000	
A	Pembayaran Gaji dan Tunjangan			2,000,000,000	
511111	Belanja Gaji Pokok PNS (KPPN.065-Manokwari)			1,000,000,000	RM
	- Belanja Gaji Pokok PNS	1.0 THN	1,000,000,000	1,000,000,000	
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS (KPPN.065-Manokwari)			50,000	RM
	- Belanja Pembulatan Gaji PNS	1.0 THN	50,000	50,000	
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (KPPN.065-Manokwari)			100,000,000	RM
	- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	1.0 THN	100,000,000	100,000,000	
511122	Belanja Tunj. Anak PNS (KPPN.065-Manokwari)			100,000,000	RM
	- Belanja Tunj. Anak PNS	1.0 THN	100,000,000	100,000,000	
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS (KPPN.065-Manokwari)			20,000,000	RM
	- Belanja Tunj. Struktural PNS	1.0 THN	20,000,000	20,000,000	
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS (KPPN.065-Manokwari)			109,550,000	RM
	- Belanja Tunj. Fungsional PNS	1.0 THN	109,550,000	109,550,000	
511125	Belanja Tunj. PPh PNS (KPPN.065-Manokwari)			100,000,000	RM
	- Belanja Tunj. PPh PNS	1.0 THN	100,000,000	100,000,000	
511126	Belanja Tunj. Beras PNS (KPPN.065-Manokwari)			40,000,000	RM
	- Belanja Tunj. Beras PNS	1.0 THN	40,000,000	40,000,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORG (01) Badan Urusan Administrasi
UNIT KERJA (526718) Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat
ALOKASI Rp. 3,790,101,000

Halaman : 2

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
511129	<u>Belanja Uang Makan PNS</u> (KPPN.065-Manokwari) - Belanja Uang Makan PNS	1.0 THN	100,000,000	100,000,000	RM
511138	<u>Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS</u> (KPPN.065-Manokwari) - Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS	1.0 THN	100,000,000	100,000,000	RM
511151	<u>Belanja Tunjangan Umum PNS</u> (KPPN.065-Manokwari) - Belanja Tunjangan Umum PNS	1.0 THN	100,000,000	100,000,000	RM
511157	<u>Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim</u> (KPPN.065-Manokwari) - Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim	1.0 THN	230,400,000	230,400,000	RM
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor			1,571,155,000	
A	<i>Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran</i>			<i>454,214,000</i>	
521111	<u>Belanja Keperluan Perkantoran</u> (KPPN.065-Manokwari) - Honor Pramubakti [4 ORG x 13 BLN] - Honor Satpam [2 ORG x 13 BLN] - Honor Pengemudi [2 ORG x 13 BLN]	52.0 OB 26.0 OB 26.0 OB	3,449,000 3,793,000 3,793,000	179,348,000 98,618,000 98,618,000	RM
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.065-Manokwari) - Keperluan Sehari-hari Perkantoran	1.0 thn	77,630,000	77,630,000	RM
B	<i>Langganan Daya dan Jasa</i>			<i>153,000,000</i>	
521111	<u>Belanja Keperluan Perkantoran</u> (KPPN.065-Manokwari) - Lisensi Zoom	1.0 thn	3,000,000	3,000,000	RM
521114	<u>Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat</u> (KPPN.065-Manokwari) - Pengiriman Surat Pos	12.0 BLN	500,000	6,000,000	RM
522112	<u>Belanja Langganan Telepon</u> (KPPN.065-Manokwari) - Langanan Telpo	12.0 BLN	500,000	6,000,000	RM
522113	<u>Belanja Langganan Air</u> (KPPN.065-Manokwari) - Langganan Air	12.0 BLN	500,000	6,000,000	RM
522141	<u>Belanja Sewa</u> (KPPN.065-Manokwari) - Sewa Bandwith Internet	12.0 bln	11,000,000	132,000,000	RM
C	<i>Pemeliharaan kantor</i>			<i>268,820,000</i>	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (005) MAHKAMAH AGUNG
 UNIT ORG (01) Badan Urusan Administrasi
 UNIT KERJA (526718) Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat
 ALOKASI Rp. 3,790,101,000

Halaman : 3

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
523111	<u>Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan</u> (KPPN.065-Manokwari)			181,820,000	RM
	- Pemeliharaan Gedung Kantor	596.0 m2	300,000	178,800,000	
	- Pemeliharaan Halaman Gedung Kantor	604.0 m2	5,000	3,020,000	
523121	<u>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.065-Manokwari)			87,000,000	RM
	- Mobil BBM Kendaraan Sewa	3.0 unit	20,000,000	60,000,000	
	- PC/Laptop	21.0 unit	500,000	10,500,000	
	- Printer	21.0 unit	500,000	10,500,000	
	- AC	8.0 unit	500,000	4,000,000	
	- Inventaris kantor [25 ORG x 1 THN]	25.0 OT	80,000	2,000,000	
D	<i>Koordinasi ke Pusat/Tk. Banding/Tk. Pertama</i>			150,000,000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.065-Manokwari)			150,000,000	RM
	- Perjalanan Dinas	1.0 THN	150,000,000	150,000,000	
E	<i>Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor</i>			158,844,000	
521115	<u>Belanja Honor Operasional Satuan Kerja</u> (KPPN.065-Manokwari)			74,004,000	RM
	- KPA	12.0 BLN	1,813,000	21,756,000	
	- PPK	12.0 BLN	1,764,000	21,168,000	
	- PPSPM	12.0 BLN	990,000	11,880,000	
	- Bendahara	12.0 BLN	700,000	8,400,000	
	- Staf Pengelola Keuangan [2 ORG x 12 BLN]	24.0 OB	450,000	10,800,000	
521119	<u>Belanja Barang Operasional Lainnya</u> (KPPN.065-Manokwari)			84,840,000	RM
	- Pakaian Dinas Pegawai	44.0 STEL	1,212,000	53,328,000	
	- Pakaian Dinas Pramubakti	8.0 STEL	782,000	6,256,000	
	- Pakaian Dinas Pengemudi	4.0 STEL	782,000	3,128,000	
	- Pakaian Dinas Satpam	4.0 STEL	2,032,000	8,128,000	
	- Rapat Koordinasi Internal	12.0 BLN	1,166,667	14,000,000	
F	<i>Hak Keuangan dan fasilitas Hakim Ad-Hoc</i>			198,720,000	
522141	<u>Belanja Sewa</u> (KPPN.065-Manokwari)			198,720,000	RM
	- Sewa Rumah Dinas Hakim [8 ORG x 12 BLN]	96.0 OB	2,070,000	198,720,000	
G	<i>KONSUL KE PUSAT DAN PENGAWASAN TK BANDING</i>			187,557,000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.065-Manokwari)			187,557,000	RM
	- KONSUL KE PUSAT DAN PENGAWASAN TK BANDING	1.0 THN	187,557,000	187,557,000	

Catatan : 1. U = Komponen Utama
 2. P = Komponen Penunjang
 3. * = Blokir

MANOKWARI, 16 Februari 2023

RASWIN, S.HI.
 NIP. 198104152011011006

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

UNIT KERJA

ALOKASI

(005)

(01)

(526718)

Rp. 3,880,101,000

MAHKAMAH AGUNG

Badan Urusan Administrasi

Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023				SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)
005.01.WA 1066 1066.EBA	Program Dukungan Manajemen Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi Layanan Dukungan Manajemen Internal[Base Line]	2.0 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit		3,880,101,000		
				3,790,101,000		
				3,790,101,000		
	Lokasi : KAB. MANOKWARI	1.0 Laporan		218,946,000	9	RM
1066.EBA.962	Layanan Umum			218,946,000		
051	Dukungan Manajemen Non Operasional Satker Daerah			218,946,000		
A	Bimbingan Teknis ASN			218,946,000		
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota			218,946,000		
	(KPPN.065-Manokwari)					
	- Bimbingan Teknis ASN	1.0 THN	218,946,000	218,946,000	*	
1066.EBA.994	Layanan Perkantoran	1.0 Layanan		3,571,155,000		
001	Gaji dan Tunjangan			2,000,000,000		
A	Pembayaran Gaji dan Tunjangan			2,000,000,000		
511111	Belanja Gaji Pokok PNS			1,000,000,000		RM
	(KPPN.065-Manokwari)					
	- Belanja Gaji Pokok PNS	1.0 THN	1,000,000,000	1,000,000,000		
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS			50,000		RM
	(KPPN.065-Manokwari)					
	- Belanja Pembulatan Gaji PNS	1.0 THN	50,000	50,000		
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS			100,000,000		RM
	(KPPN.065-Manokwari)					
	- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	1.0 THN	100,000,000	100,000,000		
511122	Belanja Tunj. Anak PNS			100,000,000		RM
	(KPPN.065-Manokwari)					
	- Belanja Tunj. Anak PNS	1.0 THN	100,000,000	100,000,000		
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS			20,000,000		RM
	(KPPN.065-Manokwari)					
	- Belanja Tunj. Struktural PNS	1.0 THN	20,000,000	20,000,000		
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS			109,550,000		RM
	(KPPN.065-Manokwari)					
	- Belanja Tunj. Fungsional PNS	1.0 THN	109,550,000	109,550,000		
511125	Belanja Tunj. PPh PNS			100,000,000		RM
	(KPPN.065-Manokwari)					
	- Belanja Tunj. PPh PNS	1.0 THN	100,000,000	100,000,000		
511126	Belanja Tunj. Beras PNS			40,000,000		RM
	(KPPN.065-Manokwari)					
	- Belanja Tunj. Beras PNS	1.0 THN	40,000,000	40,000,000		

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORG (01) Badan Urusan Administrasi
UNIT KERJA (526718) Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat
ALOKASI Rp. 3,880,101,000

Halaman : 2

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
511129	<u>Belanja Uang Makan PNS</u> (KPPN.065-Manokwari) - Belanja Uang Makan PNS	1.0 THN	100,000,000	100,000,000	RM
511138	<u>Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS</u> (KPPN.065-Manokwari) - Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS	1.0 THN	100,000,000	100,000,000	RM
511151	<u>Belanja Tunjangan Umum PNS</u> (KPPN.065-Manokwari) - Belanja Tunjangan Umum PNS	1.0 THN	100,000,000	100,000,000	RM
511157	<u>Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim</u> (KPPN.065-Manokwari) - Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim	1.0 THN	230,400,000	230,400,000	RM
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor			1,571,155,000	
A	<i>Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran</i>			<i>443,814,000</i>	
521111	<u>Belanja Keperluan Perkantoran</u> (KPPN.065-Manokwari) - Honor Pramubakti [4 ORG x 13 BLN] - Honor Satpam [2 ORG x 13 BLN] - Honor Pengemudi [2 ORG x 13 BLN]	52.0 OB 26.0 OB 26.0 OB	3,449,000 3,793,000 3,793,000	179,348,000 98,618,000 98,618,000	RM
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.065-Manokwari) - Keperluan Sehari-hari Perkantoran	1.0 thn	67,230,000	67,230,000	RM
B	<i>Langganan Daya dan Jasa</i>			<i>143,400,000</i>	
521111	<u>Belanja Keperluan Perkantoran</u> (KPPN.065-Manokwari) - Lisensi Zoom	1.0 thn	3,000,000	3,000,000	RM
521114	<u>Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat</u> (KPPN.065-Manokwari) - Pengiriman Surat Pos	12.0 BLN	500,000	6,000,000	RM
522112	<u>Belanja Langganan Telepon</u> (KPPN.065-Manokwari) - Langganan Telpon	12.0 BLN	100,000	1,200,000	RM
522113	<u>Belanja Langganan Air</u> (KPPN.065-Manokwari) - Langganan Air	12.0 BLN	100,000	1,200,000	RM
522141	<u>Belanja Sewa</u> (KPPN.065-Manokwari) - Sewa Bandwith Internet	12.0 bln	11,000,000	132,000,000	RM
C	<i>Pemeliharaan kantor</i>			<i>268,820,000</i>	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORG (01) Badan Urusan Administrasi
UNIT KERJA (526718) Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat
ALOKASI Rp. 3,880,101,000

Halaman : 3

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
523111	<u>Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan</u> (KPPN.065-Manokwari)			181,820,000	RM
	- Pemeliharaan Gedung Kantor	596.0 m2	300,000	178,800,000	
	- Pemeliharaan Halaman Gedung Kantor	604.0 m2	5,000	3,020,000	
523121	<u>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.065-Manokwari)			87,000,000	RM
	- Mobil BBM Kendaraan Sewa	3.0 unit	20,000,000	60,000,000	
	- PC/Laptop	21.0 unit	500,000	10,500,000	
	- Printer	21.0 unit	500,000	10,500,000	
	- AC	8.0 unit	500,000	4,000,000	
	- Inventaris kantor [25 ORG x 1 THN]	25.0 OT	80,000	2,000,000	
D	<i>Koordinasi ke Pusat/Tk. Banding/Tk. Pertama</i>			150,000,000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.065-Manokwari)			150,000,000	RM
	- Perjalanan Dinas	1.0 THN	150,000,000	150,000,000	
E	<i>Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor</i>			178,844,000	
521115	<u>Belanja Honor Operasional Satuan Kerja</u> (KPPN.065-Manokwari)			74,004,000	RM
	- KPA	12.0 BLN	1,813,000	21,756,000	
	- PPK	12.0 BLN	1,764,000	21,168,000	
	- PPSPM	12.0 BLN	990,000	11,880,000	
	- Bendahara	12.0 BLN	700,000	8,400,000	
	- Staf Pengelola Keuangan [2 ORG x 12 BLN]	24.0 OB	450,000	10,800,000	
521119	<u>Belanja Barang Operasional Lainnya</u> (KPPN.065-Manokwari)			104,840,000	RM
	- Keperluan sehari-hari Perkantoran lainnya	1.0 THN	20,000,000	20,000,000	
	- Pakaian Dinas Pegawai	44.0 STEL	1,212,000	53,328,000	
	- Pakaian Dinas Pramubakti	8.0 STEL	782,000	6,256,000	
	- Pakaian Dinas Pengemudi	4.0 STEL	782,000	3,128,000	
	- Pakaian Dinas Satpam	4.0 STEL	2,032,000	8,128,000	
	- Rapat Koordinasi Internal	12.0 BLN	1,166,667	14,000,000	
F	<i>Hak Keuangan dan fasilitas Hakim Ad-Hoc</i>			198,720,000	
522141	<u>Belanja Sewa</u> (KPPN.065-Manokwari)			198,720,000	RM
	- Sewa Rumah Dinas Hakim [8 ORG x 12 BLN]	96.0 OB	2,070,000	198,720,000	
G	<i>KONSUL KE PUSAT DAN PENGAWASAN TK BANDING</i>			187,557,000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.065-Manokwari)			187,557,000	RM
	- KONSUL KE PUSAT DAN PENGAWASAN TK BANDING	1.0 THN	187,557,000	187,557,000	
1071	<u>Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah</u>			90,000,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (005) MAHKAMAH AGUNG
 UNIT ORG (01) Badan Urusan Administrasi
 UNIT KERJA (526718) Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat
 ALOKASI Rp. 3,880,101,000

Halaman : 4

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1071.EBB	Agung Layanan Sarana dan Prasarana Internal[Base Line]	8.0 Unit, m2, Paket		90,000,000	
1071.EBB.951	Lokasi : KAB. MANOKWARI Layanan Sarana Internal	8.0 Unit		90,000,000	
052	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi			90,000,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			90,000,000	
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin (KPPN.065-Manokwari)			90,000,000	RM
	- PC Kepaniteraan [3 Unit]	3.0 Unit	15,000,000	45,000,000	
	- PC Unit [1 Unit]	1.0 Unit	25,000,000	25,000,000	
	- Printer [4 Unit]	4.0 Unit	5,000,000	20,000,000	

Catatan : 1. U = Komponen Utama
 2. P = Komponen Penunjang
 3. * = Blokir

MANOKWARI, 19 Maret 2023


 RASWIN, S.H.
 NIP 198104152011011006

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORG (01) Badan Urusan Administrasi
UNIT KERJA (526718) Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat
ALOKASI Rp. 3,880,101,000

Halaman : 1

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
005.01.WA 1066 1066.EBA	Program Dukungan Manajemen Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi Layanan Dukungan Manajemen Internal[Base Line]	2.0 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit		3,880,101,000 3,790,101,000 3,790,101,000	
1066.EBA.962 051 A 524114	Lokasi : KAB. MANOKWARI Layanan Umum Dukungan Manajemen Non Operasional Satker Daerah Bimbingan Teknis ASN Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (KPPN.065-Manokwari) - Bimbingan Teknis ASN	1.0 Laporan 1.0 THN 1.0 Layanan		218,946,000 218,946,000 218,946,000 218,946,000	9 RM
1066.EBA.994 001 A 511111	Layanan Perkantoran Gaji dan Tunjangan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Belanja Gaji Pokok PNS (KPPN.065-Manokwari) - Belanja Gaji Pokok PNS	1.0 THN 1.0 Layanan	218,946,000	218,946,000 3,571,155,000 2,000,000,000 1,000,000,000	* RM
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS (KPPN.065-Manokwari) - Belanja Pembulatan Gaji PNS	1.0 THN	1,000,000,000	1,000,000,000 50,000	RM
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (KPPN.065-Manokwari) - Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	1.0 THN	50,000	50,000 100,000,000	RM
511122	Belanja Tunj. Anak PNS (KPPN.065-Manokwari) - Belanja Tunj. Anak PNS	1.0 THN	100,000,000	100,000,000 100,000,000	RM
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS (KPPN.065-Manokwari) - Belanja Tunj. Struktural PNS	1.0 THN	100,000,000	20,000,000 20,000,000	RM
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS (KPPN.065-Manokwari) - Belanja Tunj. Fungsional PNS	1.0 THN	20,000,000	20,000,000 109,550,000	RM
511125	Belanja Tunj. PPh PNS (KPPN.065-Manokwari) - Belanja Tunj. PPh PNS	1.0 THN	109,550,000	109,550,000 100,000,000	RM
511126	Belanja Tunj. Beras PNS (KPPN.065-Manokwari) - Belanja Tunj. Beras PNS	1.0 THN	100,000,000	100,000,000 40,000,000	RM
		1.0 THN	40,000,000	40,000,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORG (01) Badan Urusan Administrasi
UNIT KERJA (526718) Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat
ALOKASI Rp. 3,880,101,000

Halaman : 2

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
511129	<u>Belanja Uang Makan PNS</u> (KPPN.065-Manokwari) - Belanja Uang Makan PNS	1.0 THN	100,000,000	100,000,000	RM
511138	<u>Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS</u> (KPPN.065-Manokwari) - Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS	1.0 THN	100,000,000	100,000,000	RM
511151	<u>Belanja Tunjangan Umum PNS</u> (KPPN.065-Manokwari) - Belanja Tunjangan Umum PNS	1.0 THN	100,000,000	100,000,000	RM
511157	<u>Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim</u> (KPPN.065-Manokwari) - Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim	1.0 THN	230,400,000	230,400,000	RM
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor			1,571,155,000	
A	<i>Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran</i>			<i>443,814,000</i>	
521111	<u>Belanja Keperluan Perkantoran</u> (KPPN.065-Manokwari) - Honor Pramubakti [4 ORG x 13 BLN] - Honor Satpam [2 ORG x 13 BLN] - Honor Pengemudi [2 ORG x 13 BLN]	52.0 OB 26.0 OB 26.0 OB	3,449,000 3,793,000 3,793,000	179,348,000 98,618,000 98,618,000	RM
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.065-Manokwari) - Keperluan Sehari-hari Perkantoran	1.0 thn	67,230,000	67,230,000	RM
B	<i>Langganan Daya dan Jasa</i>			<i>143,400,000</i>	
521111	<u>Belanja Keperluan Perkantoran</u> (KPPN.065-Manokwari) - Lisensi Zoom	1.0 thn	3,000,000	3,000,000	RM
521114	<u>Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat</u> (KPPN.065-Manokwari) - Pengiriman Surat Pos	12.0 BLN	500,000	6,000,000	RM
522112	<u>Belanja Langganan Telepon</u> (KPPN.065-Manokwari) - Langanan Telpon	12.0 BLN	100,000	1,200,000	RM
522113	<u>Belanja Langganan Air</u> (KPPN.065-Manokwari) - Langganan Air	12.0 BLN	100,000	1,200,000	RM
522141	<u>Belanja Sewa</u> (KPPN.065-Manokwari) - Sewa Bandwith Internet	12.0 bln	11,000,000	132,000,000	RM
C	<i>Pemeliharaan kantor</i>			<i>268,820,000</i>	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORG (01) Badan Urusan Administrasi
UNIT KERJA (526718) Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat
ALOKASI Rp. 3,880,101,000

Halaman : 3

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
523111	<u>Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan</u> (KPPN.065-Manokwari)			181,820,000	RM
	- Pemeliharaan Gedung Kantor	596.0 m2	300,000	178,800,000	
	- Pemeliharaan Halaman Gedung Kantor	604.0 m2	5,000	3,020,000	
523121	<u>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.065-Manokwari)			87,000,000	RM
	- Mobil BBM Kendaraan Sewa	3.0 unit	20,000,000	60,000,000	
	- PC/Laptop	21.0 unit	500,000	10,500,000	
	- Printer	21.0 unit	500,000	10,500,000	
	- AC	8.0 unit	500,000	4,000,000	
	- Inventaris kantor [25 ORG x 1 THN]	25.0 OT	80,000	2,000,000	
D	<i>Koordinasi ke Pusat/Tk. Banding/Tk. Pertama</i>			150,000,000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.065-Manokwari)			150,000,000	RM
	- Perjalanan Dinas	1.0 THN	150,000,000	150,000,000	
E	<i>Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor</i>			178,844,000	
521115	<u>Belanja Honor Operasional Satuan Kerja</u> (KPPN.065-Manokwari)			74,004,000	RM
	- KPA	12.0 BLN	1,813,000	21,756,000	
	- PPK	12.0 BLN	1,764,000	21,168,000	
	- PPSPM	12.0 BLN	990,000	11,880,000	
	- Bendahara	12.0 BLN	700,000	8,400,000	
	- Staf Pengelola Keuangan [2 ORG x 12 BLN]	24.0 OB	450,000	10,800,000	
521119	<u>Belanja Barang Operasional Lainnya</u> (KPPN.065-Manokwari)			104,840,000	RM
	- Keperluan sehari-hari Perkantoran lainnya	1.0 THN	20,000,000	20,000,000	
	- Pakaian Dinas Pegawai	44.0 STEL	1,212,000	53,328,000	
	- Pakaian Dinas Pramubakti	8.0 STEL	782,000	6,256,000	
	- Pakaian Dinas Pengemudi	4.0 STEL	782,000	3,128,000	
	- Pakaian Dinas Satpam	4.0 STEL	2,032,000	8,128,000	
	- Rapat Koordinasi Internal	12.0 BLN	1,166,667	14,000,000	
F	<i>Hak Keuangan dan fasilitas Hakim Ad-Hoc</i>			198,720,000	
522141	<u>Belanja Sewa</u> (KPPN.065-Manokwari)			198,720,000	RM
	- Sewa Rumah Dinas Hakim [8 ORG x 12 BLN]	96.0 OB	2,070,000	198,720,000	
G	<i>KONSUL KE PUSAT DAN PENGAWASAN TK BANDING</i>			187,557,000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.065-Manokwari)			187,557,000	RM
	- KONSUL KE PUSAT DAN PENGAWASAN TK BANDING	1.0 THN	187,557,000	187,557,000	
1071	<u>Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah</u>			90,000,000	

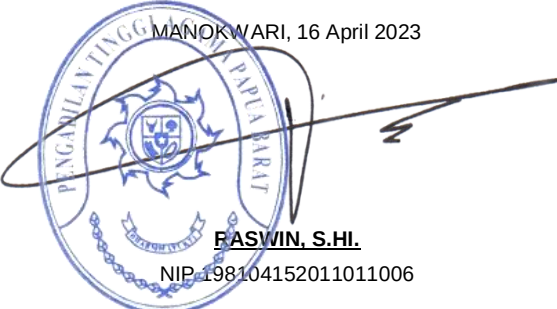
RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (005) MAHKAMAH AGUNG
 UNIT ORG (01) Badan Urusan Administrasi
 UNIT KERJA (526718) Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat
 ALOKASI Rp. 3,880,101,000

Halaman : 4

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1071.EBB	Agung Layanan Sarana dan Prasarana Internal[Base Line]	8.0 Unit, m2, Paket		90,000,000	
1071.EBB.951	Lokasi : KAB. MANOKWARI Layanan Sarana Internal	8.0 Unit		90,000,000	
052	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi			90,000,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			90,000,000	
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin (KPPN.065-Manokwari)			90,000,000	RM
	- PC Kepaniteraan [3 Unit]	3.0 Unit	15,000,000	45,000,000	
	- PC Unit [1 Unit]	1.0 Unit	25,000,000	25,000,000	
	- Printer [4 Unit]	4.0 Unit	5,000,000	20,000,000	

Catatan : 1. U = Komponen Utama
 2. P = Komponen Penunjang
 3. * = Blokir

MANOKWARI, 16 April 2023

RASWIN, S.HI.
 NIP.198104152011011006

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

UNIT KERJA

ALOKASI

(005)

(01)

(526718)

Rp. 12,268,355,000

MAHKAMAH AGUNG

Badan Urusan Administrasi

Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
005.01.WA	Program Dukungan Manajemen			12,268,355,000	
1066	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi			12,178,355,000	
1066.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal[Base Line]	2.0 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit		12,178,355,000	
1066.EBA.962	Lokasi : KAB. MANOKWARI Layanan Umum	1.0 Laporan		218,946,000	
051	Dukungan Manajemen Non Operasional Satker Daerah			218,946,000	
A	Bimbingan Teknis ASN			218,946,000	
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (KPPN.065-Manokwari)			218,946,000	9 RM
	- Bimbingan Teknis ASN	1.0 THN	218,946,000	218,946,000	*
1066.EBA.994	Layanan Perkantoran	1.0 Layanan		11,959,409,000	
001	Gaji dan Tunjangan			10,313,735,000	
A	Pembayaran Gaji dan Tunjangan			10,313,735,000	
511111	Belanja Gaji Pokok PNS (KPPN.065-Manokwari)			1,674,288,000	RM
	- Belanja Gaji Pokok PNS	1.0 THN	1,674,288,200	1,674,288,000	
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS (KPPN.065-Manokwari)			50,000	RM
	- Belanja Pembulatan Gaji PNS	1.0 THN	50,000	50,000	
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (KPPN.065-Manokwari)			167,372,000	RM
	- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	1.0 THN	167,372,280	167,372,000	
511122	Belanja Tunj. Anak PNS (KPPN.065-Manokwari)			100,000,000	RM
	- Belanja Tunj. Anak PNS	1.0 THN	100,000,000	100,000,000	
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS (KPPN.065-Manokwari)			165,520,000	RM
	- Belanja Tunj. Struktural PNS	1.0 THN	165,520,000	165,520,000	
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS (KPPN.065-Manokwari)			5,263,940,000	RM
	- Belanja Tunj. Fungsional PNS	1.0 THN	5,263,940,000	5,263,940,000	
511125	Belanja Tunj. PPh PNS (KPPN.065-Manokwari)			961,604,000	RM
	- Belanja Tunj. PPh PNS	1.0 THN	961,604,974	961,604,000	
511126	Belanja Tunj. Beras PNS (KPPN.065-Manokwari)			70,971,000	RM
	- Belanja Tunj. Beras PNS	1.0 THN	70,971,600	70,971,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORG (01) Badan Urusan Administrasi
UNIT KERJA (526718) Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat
ALOKASI Rp. 12,268,355,000

Halaman : 2

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
511129	<u>Belanja Uang Makan PNS</u> (KPPN.065-Manokwari) - Belanja Uang Makan PNS	1.0 THN	401,190,000	401,190,000	RM
511138	<u>Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS</u> (KPPN.065-Manokwari) - Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS	1.0 THN	100,000,000	100,000,000	RM
511151	<u>Belanja Tunjangan Umum PNS</u> (KPPN.065-Manokwari) - Belanja Tunjangan Umum PNS	1.0 THN	100,000,000	100,000,000	RM
511157	<u>Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim</u> (KPPN.065-Manokwari) - Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim	1.0 THN	1,308,800,000	1,308,800,000	RM
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor			1,645,674,000	
A	<i>Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran</i>			<i>443,814,000</i>	
521111	<u>Belanja Keperluan Perkantoran</u> (KPPN.065-Manokwari) - Honor Pramubakti [4 ORG x 13 BLN] - Honor Satpam [2 ORG x 13 BLN] - Honor Pengemudi [2 ORG x 13 BLN]	52.0 OB 26.0 OB 26.0 OB	3,449,000 3,793,000 3,793,000	179,348,000 98,618,000 98,618,000	RM
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.065-Manokwari) - Keperluan Sehari-hari Perkantoran	1.0 thn	67,230,000	67,230,000	RM
B	<i>Langganan Daya dan Jasa</i>			<i>138,663,000</i>	
521111	<u>Belanja Keperluan Perkantoran</u> (KPPN.065-Manokwari) - Lisensi Zoom	1.0 thn	3,000,000	3,000,000	RM
521114	<u>Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat</u> (KPPN.065-Manokwari) - Pengiriman Surat Pos	12.0 BLN	271,958	3,263,000	RM
522112	<u>Belanja Langganan Telepon</u> (KPPN.065-Manokwari) - Langganan Telpon	12.0 BLN	16,667	200,000	RM
522113	<u>Belanja Langganan Air</u> (KPPN.065-Manokwari) - Langganan Air	12.0 BLN	16,667	200,000	RM
522141	<u>Belanja Sewa</u> (KPPN.065-Manokwari) - Sewa Bandwith Internet	12.0 bln	11,000,000	132,000,000	RM
C	<i>Pemeliharaan kantor</i>			<i>273,556,000</i>	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORG (01) Badan Urusan Administrasi
UNIT KERJA (526718) Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat
ALOKASI Rp. 12,268,355,000

Halaman : 3

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
523111	<u>Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan</u> (KPPN.065-Manokwari)			201,556,000	RM
	- Pemeliharaan Gedung Kantor	596.0 m2	333,115	198,536,000	
	- Pemeliharaan Halaman Gedung Kantor	604.0 m2	5,000	3,020,000	
523121	<u>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.065-Manokwari)			72,000,000	RM
	- Mobil BBM Kendaraan Sewa	3.0 unit	20,000,000	60,000,000	
	- PC/Laptop	21.0 unit	261,905	5,500,000	
	- Printer	21.0 unit	23,810	500,000	
	- AC	8.0 unit	500,000	4,000,000	
	- Inventaris kantor [25 ORG x 1 THN]	25.0 OT	80,000	2,000,000	
D	<i>Koordinasi ke Pusat/Tk. Banding/Tk. Pertama</i>			150,000,000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.065-Manokwari)			150,000,000	RM
	- Perjalanan Dinas	1.0 THN	150,000,000	150,000,000	
E	<i>Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor</i>			178,844,000	
521115	<u>Belanja Honor Operasional Satuan Kerja</u> (KPPN.065-Manokwari)			74,004,000	RM
	- KPA	12.0 BLN	1,813,000	21,756,000	
	- PPK	12.0 BLN	1,764,000	21,168,000	
	- PPSPM	12.0 BLN	990,000	11,880,000	
	- Bendahara	12.0 BLN	700,000	8,400,000	
	- Staf Pengelola Keuangan [2 ORG x 12 BLN]	24.0 OB	450,000	10,800,000	
521119	<u>Belanja Barang Operasional Lainnya</u> (KPPN.065-Manokwari)			104,840,000	RM
	- Keperluan sehari-hari Perkantoran lainnya	1.0 THN	20,000,000	20,000,000	
	- Pakaian Dinas Pegawai	44.0 STEL	1,212,000	53,328,000	
	- Pakaian Dinas Pramubakti	8.0 STEL	782,000	6,256,000	
	- Pakaian Dinas Pengemudi	4.0 STEL	782,000	3,128,000	
	- Pakaian Dinas Satpam	4.0 STEL	2,032,000	8,128,000	
	- Rapat Koordinasi Internal	12.0 BLN	1,166,667	14,000,000	
F	<i>Hak Keuangan dan fasilitas Hakim Ad-Hoc</i>			273,240,000	
522141	<u>Belanja Sewa</u> (KPPN.065-Manokwari)			273,240,000	RM
	- Sewa Rumah Dinas Hakim [11 ORG x 12 BLN]	132.0 OB	2,070,000	273,240,000	
G	<i>KONSUL KE PUSAT DAN PENGAWASAN TK BANDING</i>			187,557,000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.065-Manokwari)			187,557,000	RM
	- KONSUL KE PUSAT DAN PENGAWASAN TK BANDING	1.0 THN	187,557,000	187,557,000	
1071	<u>Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah</u>			90,000,000	

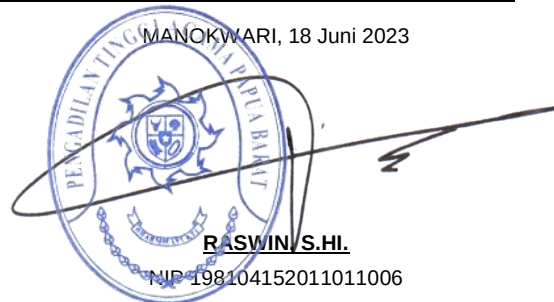
RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (005) MAHKAMAH AGUNG
 UNIT ORG (01) Badan Urusan Administrasi
 UNIT KERJA (526718) Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat
 ALOKASI Rp. 12,268,355,000

Halaman : 4

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1071.EBB	Agung Layanan Sarana dan Prasarana Internal[Base Line]	8.0 Unit, m2, Paket		90,000,000	
1071.EBB.951	Lokasi : KAB. MANOKWARI Layanan Sarana Internal	8.0 Unit		90,000,000	
052	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi			90,000,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			90,000,000	
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin (KPPN.065-Manokwari)			90,000,000	RM
	- PC Kepaniteraan [3 Unit]	3.0 Unit	15,000,000	45,000,000	
	- PC Unit [1 Unit]	1.0 Unit	25,000,000	25,000,000	
	- Printer [4 Unit]	4.0 Unit	5,000,000	20,000,000	

Catatan : 1. U = Komponen Utama
 2. P = Komponen Penunjang
 3. * = Blokir

MANOKWARI, 18 Juni 2023

 RASWIN/S.HI.
 NIP.198104152011011006

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB
UNIT ORG
UNIT KERJA
ALOKASI

(005)
(01)
(526718)
Rp. 12,268,355,000

MAHKAMAH AGUNG
Badan Urusan Administrasi
Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
005.01.WA 1066 1066.EBA	Program Dukungan Manajemen Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi Layanan Dukungan Manajemen Internal[Base Line]	2.0 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit		12,268,355,000 12,178,355,000 12,178,355,000	
1066.EBA.962 051 A 524114	Lokasi : KAB. MANOKWARI Layanan Umum Dukungan Manajemen Non Operasional Satker Daerah Bimbingan Teknis ASN Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (KPPN.065-Manokwari) - Bimbingan Teknis ASN	1.0 Laporan 1.0 THN 1.0 Layanan		218,946,000 218,946,000 218,946,000 218,946,000 218,946,000 218,946,000	9 RM
1066.EBA.994 001 A 511111	Layanan Perkantoran Gaji dan Tunjangan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Belanja Gaji Pokok PNS (KPPN.065-Manokwari) - Belanja Gaji Pokok PNS	1.0 THN	218,946,000	218,946,000 11,959,409,000 10,313,735,000 10,313,735,000 1,674,288,000	*
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS (KPPN.065-Manokwari) - Belanja Pembulatan Gaji PNS	1.0 THN	1,674,288,200	1,674,288,000 50,000	RM
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (KPPN.065-Manokwari) - Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	1.0 THN	50,000	50,000 167,372,000	RM
511122	Belanja Tunj. Anak PNS (KPPN.065-Manokwari) - Belanja Tunj. Anak PNS	1.0 THN	167,372,280	167,372,000 100,000,000	RM
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS (KPPN.065-Manokwari) - Belanja Tunj. Struktural PNS	1.0 THN	100,000,000	100,000,000 165,520,000	RM
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS (KPPN.065-Manokwari) - Belanja Tunj. Fungsional PNS	1.0 THN	165,520,000	165,520,000 5,263,940,000	RM
511125	Belanja Tunj. PPh PNS (KPPN.065-Manokwari) - Belanja Tunj. PPh PNS	1.0 THN	5,263,940,000	5,263,940,000 961,604,000	RM
511126	Belanja Tunj. Beras PNS (KPPN.065-Manokwari) - Belanja Tunj. Beras PNS	1.0 THN	961,604,974	961,604,000 70,971,000 70,971,000	RM

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORG (01) Badan Urusan Administrasi
UNIT KERJA (526718) Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat
ALOKASI Rp. 12,268,355,000

Halaman : 2

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
511129	<u>Belanja Uang Makan PNS</u> (KPPN.065-Manokwari) - Belanja Uang Makan PNS	1.0 THN	401,190,000	401,190,000	RM
511138	<u>Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS</u> (KPPN.065-Manokwari) - Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS	1.0 THN	100,000,000	100,000,000	RM
511151	<u>Belanja Tunjangan Umum PNS</u> (KPPN.065-Manokwari) - Belanja Tunjangan Umum PNS	1.0 THN	100,000,000	100,000,000	RM
511157	<u>Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim</u> (KPPN.065-Manokwari) - Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim	1.0 THN	1,308,800,000	1,308,800,000	RM
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor			1,645,674,000	
A	<i>Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran</i>			<i>443,814,000</i>	
521111	<u>Belanja Keperluan Perkantoran</u> (KPPN.065-Manokwari) - Honor Pramubakti [4 ORG x 13 BLN] - Honor Satpam [2 ORG x 13 BLN] - Honor Pengemudi [2 ORG x 13 BLN]	52.0 OB 26.0 OB 26.0 OB	3,449,000 3,793,000 3,793,000	179,348,000 98,618,000 98,618,000	RM
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.065-Manokwari) - Keperluan Sehari-hari Perkantoran	1.0 thn	67,230,000	67,230,000	RM
B	<i>Langganan Daya dan Jasa</i>			<i>115,163,000</i>	
521111	<u>Belanja Keperluan Perkantoran</u> (KPPN.065-Manokwari) - Lisensi Zoom	1.0 thn	1,500,000	1,500,000	RM
521114	<u>Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat</u> (KPPN.065-Manokwari) - Pengiriman Surat Pos	12.0 BLN	271,958	3,263,000	RM
522112	<u>Belanja Langganan Telepon</u> (KPPN.065-Manokwari) - Langganan Telpon	12.0 BLN	16,667	200,000	RM
522113	<u>Belanja Langganan Air</u> (KPPN.065-Manokwari) - Langganan Air	12.0 BLN	16,667	200,000	RM
522141	<u>Belanja Sewa</u> (KPPN.065-Manokwari) - Sewa Bandwith Internet	12.0 bln	9,166,667	110,000,000	RM
C	<i>Pemeliharaan kantor</i>			<i>273,556,000</i>	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (005) MAHKAMAH AGUNG
 UNIT ORG (01) Badan Urusan Administrasi
 UNIT KERJA (526718) Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat
 ALOKASI Rp. 12,268,355,000

Halaman : 3

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
523111	<u>Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan</u> (KPPN.065-Manokwari)			201,556,000	RM
	- Pemeliharaan Gedung Kantor	596.0 m2	333,115	198,536,000	
	- Pemeliharaan Halaman Gedung Kantor	604.0 m2	5,000	3,020,000	
523121	<u>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.065-Manokwari)			72,000,000	RM
	- Mobil BBM Kendaraan Sewa	3.0 unit	20,000,000	60,000,000	
	- PC/Laptop	21.0 unit	261,905	5,500,000	
	- Printer	21.0 unit	23,810	500,000	
	- AC	8.0 unit	687,500	5,500,000	
	- Inventaris kantor [25 ORG x 1 THN]	25.0 OT	20,000	500,000	
D	<i>Koordinasi ke Pusat/Tk. Banding/Tk. Pertama</i>			150,000,000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.065-Manokwari)			150,000,000	RM
	- Perjalanan Dinas	1.0 THN	150,000,000	150,000,000	
E	<i>Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor</i>			182,344,000	
521115	<u>Belanja Honor Operasional Satuan Kerja</u> (KPPN.065-Manokwari)			74,004,000	RM
	- KPA	12.0 BLN	1,813,000	21,756,000	
	- PPK	12.0 BLN	1,764,000	21,168,000	
	- PPSPM	12.0 BLN	990,000	11,880,000	
	- Bendahara	12.0 BLN	700,000	8,400,000	
	- Staf Pengelola Keuangan [2 ORG x 12 BLN]	24.0 OB	450,000	10,800,000	
521119	<u>Belanja Barang Operasional Lainnya</u> (KPPN.065-Manokwari)			108,340,000	RM
	- Keperluan sehari-hari Perkantoran lainnya	1.0 THN	23,500,000	23,500,000	
	- Pakaian Dinas Pegawai	44.0 STEL	1,212,000	53,328,000	
	- Pakaian Dinas Pramubakti	8.0 STEL	782,000	6,256,000	
	- Pakaian Dinas Pengemudi	4.0 STEL	782,000	3,128,000	
	- Pakaian Dinas Satpam	4.0 STEL	2,032,000	8,128,000	
	- Rapat Koordinasi Internal	12.0 BLN	1,166,667	14,000,000	
F	<i>Hak Keuangan dan fasilitas Hakim Ad-Hoc</i>			273,240,000	
522141	<u>Belanja Sewa</u> (KPPN.065-Manokwari)			273,240,000	RM
	- Sewa Rumah Dinas Hakim [11 ORG x 12 BLN]	132.0 OB	2,070,000	273,240,000	
G	<i>KONSUL KE PUSAT DAN PENGAWASAN TK BANDING</i>			207,557,000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.065-Manokwari)			207,557,000	RM
	- KONSUL KE PUSAT DAN PENGAWASAN TK BANDING	1.0 THN	207,557,000	207,557,000	
1071	<u>Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah</u>			90,000,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (005) MAHKAMAH AGUNG
 UNIT ORG (01) Badan Urusan Administrasi
 UNIT KERJA (526718) Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat
 ALOKASI Rp. 12,268,355,000

Halaman : 4

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1071.EBB	Agung Layanan Sarana dan Prasarana Internal[Base Line]	8.0 Unit, m2, Paket		90,000,000	
1071.EBB.951	Lokasi : KAB. MANOKWARI Layanan Sarana Internal	8.0 Unit		90,000,000	
052	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi			90,000,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			90,000,000	
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin (KPPN.065-Manokwari)			90,000,000	RM
	- PC Kepaniteraan [3 Unit]	3.0 Unit	15,000,000	45,000,000	
	- PC Unit [1 Unit]	1.0 Unit	25,000,000	25,000,000	
	- Printer [4 Unit]	4.0 Unit	5,000,000	20,000,000	

Catatan : 1. U = Komponen Utama
 2. P = Komponen Penunjang
 3. * = Blokir

MANOKWARI, 12 Juli 2023

RASWIN, S.HI
 NIP. 198104152011011006

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB	(005)	MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORG	(01)	Badan Urusan Administrasi
UNIT KERJA	(526718)	Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat
ALOKASI	Rp. 12,158,882,000	

Halaman : 1

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023				SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)
005.01.WA 1066 1066.EBA	Program Dukungan Manajemen Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi Layanan Dukungan Manajemen Internal[Base Line]	2.0 Layanan, Lapóran, Dokumen, Rekomendasi, Unit		12,158,882,000		
				12,068,882,000		
				12,068,882,000		
1066.EBA.962	Lokasi : KAB. MANOKWARI Layanan Umum	1.0 Laporan		109,473,000		
051	Dukungan Manajemen Non Operasional Satker Daerah			109,473,000		
A	Bimbingan Teknis ASN			109,473,000		
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (KPPN.065-Manokwari)			109,473,000	9	RM
	- Bimbingan Teknis ASN	1.0 THN	85,958,000	85,958,000	*	
	- tambahan bimtek ASN	1.0 keg	23,515,000	23,515,000		
1066.EBA.994	Layanan Perkantoran	1.0 Layanan		11,959,409,000		
001	Gaji dan Tunjangan			10,313,735,000		
A	Pembayaran Gaji dan Tunjangan			10,313,735,000		
511111	Belanja Gaji Pokok PNS (KPPN.065-Manokwari)			1,674,288,000		RM
	- Belanja Gaji Pokok PNS	1.0 THN	1,674,288,200	1,674,288,000		
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS (KPPN.065-Manokwari)			50,000		RM
	- Belanja Pembulatan Gaji PNS	1.0 THN	50,000	50,000		
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (KPPN.065-Manokwari)			167,372,000		RM
	- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	1.0 THN	167,372,280	167,372,000		
511122	Belanja Tunj. Anak PNS (KPPN.065-Manokwari)			100,000,000		RM
	- Belanja Tunj. Anak PNS	1.0 THN	100,000,000	100,000,000		
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS (KPPN.065-Manokwari)			165,520,000		RM
	- Belanja Tunj. Struktural PNS	1.0 THN	165,520,000	165,520,000		
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS (KPPN.065-Manokwari)			5,263,940,000		RM
	- Belanja Tunj. Fungsional PNS	1.0 THN	5,263,940,000	5,263,940,000		
511125	Belanja Tunj. PPh PNS (KPPN.065-Manokwari)			961,604,000		RM
	- Belanja Tunj. PPh PNS	1.0 THN	961,604,974	961,604,000		
511126	Belanja Tunj. Beras PNS (KPPN.065-Manokwari)			70,971,000		RM
	- Belanja Tunj. Beras PNS	1.0 THN	70,971,600	70,971,000		

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORG (01) Badan Urusan Administrasi
UNIT KERJA (526718) Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat
ALOKASI Rp. 12,158,882,000

Halaman : 2

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
511129	<u>Belanja Uang Makan PNS</u> (KPPN.065-Manokwari) - Belanja Uang Makan PNS	1.0 THN	401,190,000	401,190,000	RM
511138	<u>Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS</u> (KPPN.065-Manokwari) - Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS	1.0 THN	100,000,000	100,000,000	RM
511151	<u>Belanja Tunjangan Umum PNS</u> (KPPN.065-Manokwari) - Belanja Tunjangan Umum PNS	1.0 THN	100,000,000	100,000,000	RM
511157	<u>Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim</u> (KPPN.065-Manokwari) - Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim	1.0 THN	1,308,800,000	1,308,800,000	RM
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor			1,645,674,000	
A	<i>Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran</i>			<i>443,814,000</i>	
521111	<u>Belanja Keperluan Perkantoran</u> (KPPN.065-Manokwari) - Honor Pramubakti [4 ORG x 13 BLN] - Honor Satpam [2 ORG x 13 BLN] - Honor Pengemudi [2 ORG x 13 BLN]	52.0 OB 26.0 OB 26.0 OB	3,449,000 3,793,000 3,793,000	179,348,000 98,618,000 98,618,000	RM
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.065-Manokwari) - Keperluan Sehari-hari Perkantoran	1.0 thn	67,230,000	67,230,000	RM
B	<i>Langganan Daya dan Jasa</i>			<i>115,163,000</i>	
521111	<u>Belanja Keperluan Perkantoran</u> (KPPN.065-Manokwari) - Lisensi Zoom	1.0 thn	1,500,000	1,500,000	RM
521114	<u>Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat</u> (KPPN.065-Manokwari) - Pengiriman Surat Pos	12.0 BLN	271,958	3,263,000	RM
522112	<u>Belanja Langganan Telepon</u> (KPPN.065-Manokwari) - Langganan Telpon	12.0 BLN	16,667	200,000	RM
522113	<u>Belanja Langganan Air</u> (KPPN.065-Manokwari) - Langganan Air	12.0 BLN	16,667	200,000	RM
522141	<u>Belanja Sewa</u> (KPPN.065-Manokwari) - Sewa Bandwith Internet	12.0 bln	9,166,667	110,000,000	RM
C	<i>Pemeliharaan kantor</i>			<i>273,556,000</i>	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORG (01) Badan Urusan Administrasi
UNIT KERJA (526718) Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat
ALOKASI Rp. 12,158,882,000

Halaman : 3

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
523111	<u>Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan</u> (KPPN.065-Manokwari)			201,556,000	RM
	- Pemeliharaan Gedung Kantor	596.0 m2	333,115	198,536,000	
	- Pemeliharaan Halaman Gedung Kantor	604.0 m2	5,000	3,020,000	
523121	<u>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.065-Manokwari)			72,000,000	RM
	- Mobil BBM Kendaraan Sewa	3.0 unit	20,000,000	60,000,000	
	- PC/Laptop	21.0 unit	261,905	5,500,000	
	- Printer	21.0 unit	23,810	500,000	
	- AC	8.0 unit	687,500	5,500,000	
	- Inventaris kantor [25 ORG x 1 THN]	25.0 OT	20,000	500,000	
D	<i>Koordinasi ke Pusat/Tk. Banding/Tk. Pertama</i>			150,000,000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.065-Manokwari)			150,000,000	RM
	- Perjalanan Dinas	1.0 THN	150,000,000	150,000,000	
E	<i>Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor</i>			182,344,000	
521115	<u>Belanja Honor Operasional Satuan Kerja</u> (KPPN.065-Manokwari)			74,004,000	RM
	- KPA	12.0 BLN	1,813,000	21,756,000	
	- PPK	12.0 BLN	1,764,000	21,168,000	
	- PPSPM	12.0 BLN	990,000	11,880,000	
	- Bendahara	12.0 BLN	700,000	8,400,000	
	- Staf Pengelola Keuangan [2 ORG x 12 BLN]	24.0 OB	450,000	10,800,000	
521119	<u>Belanja Barang Operasional Lainnya</u> (KPPN.065-Manokwari)			108,340,000	RM
	- Keperluan sehari-hari Perkantoran lainnya	1.0 THN	23,500,000	23,500,000	
	- Pakaian Dinas Pegawai	44.0 STEL	1,212,000	53,328,000	
	- Pakaian Dinas Pramubakti	8.0 STEL	782,000	6,256,000	
	- Pakaian Dinas Pengemudi	4.0 STEL	782,000	3,128,000	
	- Pakaian Dinas Satpam	4.0 STEL	2,032,000	8,128,000	
	- Rapat Koordinasi Internal	12.0 BLN	1,166,667	14,000,000	
F	<i>Hak Keuangan dan fasilitas Hakim Ad-Hoc</i>			273,240,000	
522141	<u>Belanja Sewa</u> (KPPN.065-Manokwari)			273,240,000	RM
	- Sewa Rumah Dinas Hakim [11 ORG x 12 BLN]	132.0 OB	2,070,000	273,240,000	
G	<i>KONSUL KE PUSAT DAN PENGAWASAN TK BANDING</i>			207,557,000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.065-Manokwari)			207,557,000	RM
	- KONSUL KE PUSAT DAN PENGAWASAN TK BANDING	1.0 THN	207,557,000	207,557,000	
1071	<u>Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah</u>			90,000,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (005) MAHKAMAH AGUNG
 UNIT ORG (01) Badan Urusan Administrasi
 UNIT KERJA (526718) Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat
 ALOKASI Rp. 12,158,882,000

Halaman : 4

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1071.EBB	Agung Layanan Sarana dan Prasarana Internal[Base Line]	8.0 Unit, m2, Paket		90,000,000	
1071.EBB.951	Lokasi : KAB. MANOKWARI Layanan Sarana Internal	8.0 Unit		90,000,000	
052	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi			90,000,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			90,000,000	
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin (KPPN.065-Manokwari)			90,000,000	RM
	- PC Kepaniteraan [3 Unit]	3.0 Unit	15,000,000	45,000,000	
	- PC Unit [1 Unit]	1.0 Unit	25,000,000	25,000,000	
	- Printer [4 Unit]	4.0 Unit	5,000,000	20,000,000	

Catatan : 1. U = Komponen Utama
 2. P = Komponen Penunjang
 3. * = Blokir

MANOKWARI, 31 Agustus 2023



RASWIN, S.HI

NIP.198104152011011006

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORG (01) Badan Urusan Administrasi
UNIT KERJA (526718) Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat
ALOKASI Rp. 12,207,682,000

Halaman : 1

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
005.01.WA 1066 1066.EBA	Program Dukungan Manajemen Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi Layanan Dukungan Manajemen Internal[Base Line]	2.0 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit		12,207,682,000 12,117,682,000 12,117,682,000	
1066.EBA.962 051 A 524114	Lokasi : KAB. MANOKWARI Layanan Umum Dukungan Manajemen Non Operasional Satker Daerah Bimbingan Teknis ASN Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (KPPN.065-Manokwari) - Bimbingan Teknis ASN - tambahan bimtek ASN	1.0 Laporan 1.0 THN 1.0 keg		109,473,000 109,473,000 109,473,000 109,473,000	9 RM
1066.EBA.994 001 A 511111	Layanan Perkantoran Gaji dan Tunjangan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Belanja Gaji Pokok PNS (KPPN.065-Manokwari) - Belanja Gaji Pokok PNS	1.0 Layanan 1.0 THN		12,008,209,000 10,313,735,000 10,313,735,000 1,674,288,000	* RM
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS (KPPN.065-Manokwari) - Belanja Pembulatan Gaji PNS	1.0 THN	1,674,288,200	1,674,288,000 50,000	RM
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (KPPN.065-Manokwari) - Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	1.0 THN	50,000	50,000 167,372,000	RM
511122	Belanja Tunj. Anak PNS (KPPN.065-Manokwari) - Belanja Tunj. Anak PNS	1.0 THN	167,372,280	167,372,000 100,000,000	RM
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS (KPPN.065-Manokwari) - Belanja Tunj. Struktural PNS	1.0 THN	100,000,000	100,000,000 165,520,000	RM
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS (KPPN.065-Manokwari) - Belanja Tunj. Fungsional PNS	1.0 THN	165,520,000	165,520,000 5,263,940,000	RM
511125	Belanja Tunj. PPh PNS (KPPN.065-Manokwari) - Belanja Tunj. PPh PNS	1.0 THN	5,263,940,000	5,263,940,000 961,604,000	RM
511126	Belanja Tunj. Beras PNS (KPPN.065-Manokwari) - Belanja Tunj. Beras PNS	1.0 THN	961,604,974	961,604,000 70,971,000 70,971,000	RM

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORG (01) Badan Urusan Administrasi
UNIT KERJA (526718) Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat
ALOKASI Rp. 12,207,682,000

Halaman : 2

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
511129	<u>Belanja Uang Makan PNS</u> (KPPN.065-Manokwari) - Belanja Uang Makan PNS	1.0 THN	401,190,000	401,190,000	RM
511138	<u>Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS</u> (KPPN.065-Manokwari) - Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS	1.0 THN	100,000,000	100,000,000	RM
511151	<u>Belanja Tunjangan Umum PNS</u> (KPPN.065-Manokwari) - Belanja Tunjangan Umum PNS	1.0 THN	100,000,000	100,000,000	RM
511157	<u>Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim</u> (KPPN.065-Manokwari) - Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim	1.0 THN	1,308,800,000	1,308,800,000	RM
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor			1,694,474,000	
A	<i>Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran</i>			<i>443,814,000</i>	
521111	<u>Belanja Keperluan Perkantoran</u> (KPPN.065-Manokwari) - Honor Pramubakti [4 ORG x 13 BLN] - Honor Satpam [2 ORG x 13 BLN] - Honor Pengemudi [2 ORG x 13 BLN]	52.0 OB 26.0 OB 26.0 OB	3,449,000 3,793,000 3,793,000	179,348,000 98,618,000 98,618,000	RM
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.065-Manokwari) - Keperluan Sehari-hari Perkantoran	1.0 thn	67,230,000	67,230,000	RM
B	<i>Langganan Daya dan Jasa</i>			<i>115,163,000</i>	
521111	<u>Belanja Keperluan Perkantoran</u> (KPPN.065-Manokwari) - Lisensi Zoom	1.0 thn	1,500,000	1,500,000	RM
521114	<u>Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat</u> (KPPN.065-Manokwari) - Pengiriman Surat Pos	12.0 BLN	271,958	3,263,000	RM
522112	<u>Belanja Langganan Telepon</u> (KPPN.065-Manokwari) - Langanan Telpo	12.0 BLN	16,667	200,000	RM
522113	<u>Belanja Langganan Air</u> (KPPN.065-Manokwari) - Langganan Air	12.0 BLN	16,667	200,000	RM
522141	<u>Belanja Sewa</u> (KPPN.065-Manokwari) - Sewa Bandwith Internet	12.0 bln	9,166,667	110,000,000	RM
C	<i>Pemeliharaan kantor</i>			<i>302,356,000</i>	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORG (01) Badan Urusan Administrasi
UNIT KERJA (526718) Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat
ALOKASI Rp. 12,207,682,000

Halaman : 3

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
523111	<u>Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan</u> (KPPN.065-Manokwari)			201,556,000	RM
	- Pemeliharaan Gedung Kantor	596.0 m2	333,115	198,536,000	
	- Pemeliharaan Halaman Gedung Kantor	604.0 m2	5,000	3,020,000	
523121	<u>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.065-Manokwari)			100,800,000	RM
	- Mobil BBM Kendaraan Sewa	3.0 unit	28,000,000	84,000,000	
	- PC/Laptop	21.0 unit	261,905	5,500,000	
	- Printer	21.0 unit	23,810	500,000	
	- AC	8.0 unit	1,287,500	10,300,000	
	- Inventaris kantor [25 ORG x 1 THN]	25.0 OT	20,000	500,000	
D	<i>Koordinasi ke Pusat/Tk. Banding/Tk. Pertama</i>			150,000,000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.065-Manokwari)			150,000,000	RM
	- Perjalanan Dinas	1.0 THN	150,000,000	150,000,000	
E	<i>Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor</i>			202,344,000	
521115	<u>Belanja Honor Operasional Satuan Kerja</u> (KPPN.065-Manokwari)			74,004,000	RM
	- KPA	12.0 BLN	1,813,000	21,756,000	
	- PPK	12.0 BLN	1,764,000	21,168,000	
	- PPSPM	12.0 BLN	990,000	11,880,000	
	- Bendahara	12.0 BLN	700,000	8,400,000	
	- Staf Pengelola Keuangan [2 ORG x 12 BLN]	24.0 OB	450,000	10,800,000	
521119	<u>Belanja Barang Operasional Lainnya</u> (KPPN.065-Manokwari)			128,340,000	RM
	- Keperluan sehari-hari Perkantoran lainnya	1.0 THN	43,500,000	43,500,000	
	- Pakaian Dinas Pegawai	44.0 STEL	1,212,000	53,328,000	
	- Pakaian Dinas Pramubakti	8.0 STEL	782,000	6,256,000	
	- Pakaian Dinas Pengemudi	4.0 STEL	782,000	3,128,000	
	- Pakaian Dinas Satpam	4.0 STEL	2,032,000	8,128,000	
	- Rapat Koordinasi Internal	12.0 BLN	1,166,667	14,000,000	
F	<i>Hak Keuangan dan fasilitas Hakim Ad-Hoc</i>			273,240,000	
522141	<u>Belanja Sewa</u> (KPPN.065-Manokwari)			273,240,000	RM
	- Sewa Rumah Dinas Hakim [11 ORG x 12 BLN]	132.0 OB	2,070,000	273,240,000	
G	<i>KONSUL KE PUSAT DAN PENGAWASAN TK BANDING</i>			207,557,000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.065-Manokwari)			207,557,000	RM
	- KONSUL KE PUSAT DAN PENGAWASAN TK BANDING	1.0 THN	207,557,000	207,557,000	
1071	<u>Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah</u>			90,000,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

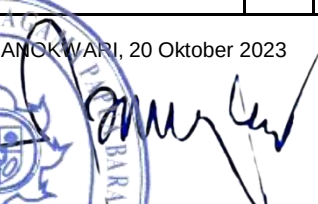
KEMEN/LEMB (005) MAHKAMAH AGUNG
 UNIT ORG (01) Badan Urusan Administrasi
 UNIT KERJA (526718) Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat
 ALOKASI Rp. 12,207,682,000

Halaman : 4

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1071.EBB	Agung Layanan Sarana dan Prasarana Internal[Base Line]	8.0 Unit, m2, Paket		90,000,000	
1071.EBB.951	Lokasi : KAB. MANOKWARI Layanan Sarana Internal	8.0 Unit		90,000,000	
052	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi			90,000,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			90,000,000	
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin (KPPN.065-Manokwari)			90,000,000	RM
	- PC Kepaniteraan [3 Unit]	3.0 Unit	15,000,000	45,000,000	
	- PC Unit [1 Unit]	1.0 Unit	25,000,000	25,000,000	
	- Printer [4 Unit]	4.0 Unit	5,000,000	20,000,000	

Catatan : 1. U = Komponen Utama
 2. P = Komponen Penunjang
 3. * = Blokir

MANOKWARI, 20 Oktober 2023



NURMANSYAH
 NIP 197205101997031003

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB
UNIT ORG
UNIT KERJA
ALOKASI

(005)
(01)
(526718)
Rp. 12,184,167,000

MAHKAMAH AGUNG
Badan Urusan Administrasi
Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
005.01.WA 1066 1066.EBA	Program Dukungan Manajemen Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi Layanan Dukungan Manajemen Internal[Base Line]	2.0 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit		12,184,167,000 12,094,167,000 12,094,167,000	
1066.EBA.962 051 A 524114	Lokasi : KAB. MANOKWARI Layanan Umum Dukungan Manajemen Non Operasional Satker Daerah Bimbingan Teknis ASN Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (KPPN.065-Manokwari) - Bimbingan Teknis ASN - tambahan bimtek ASN	1.0 Laporan 1.0 THN 1.0 keg		85,958,000 85,958,000 85,958,000 85,958,000	RM
1066.EBA.994 001 A 511111	Layanan Perkantoran Gaji dan Tunjangan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Belanja Gaji Pokok PNS (KPPN.065-Manokwari) - Belanja Gaji Pokok PNS	1.0 Layanan 1.0 THN		12,008,209,000 10,313,735,000 10,313,735,000 1,674,288,000	RM
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS (KPPN.065-Manokwari) - Belanja Pembulatan Gaji PNS	1.0 THN	1,674,288,200	1,674,288,000 50,000	RM
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (KPPN.065-Manokwari) - Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	1.0 THN	50,000	50,000 167,372,000	RM
511122	Belanja Tunj. Anak PNS (KPPN.065-Manokwari) - Belanja Tunj. Anak PNS	1.0 THN	167,372,280	167,372,000 100,000,000	RM
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS (KPPN.065-Manokwari) - Belanja Tunj. Struktural PNS	1.0 THN	100,000,000	100,000,000 165,520,000	RM
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS (KPPN.065-Manokwari) - Belanja Tunj. Fungsional PNS	1.0 THN	165,520,000	165,520,000 5,263,940,000	RM
511125	Belanja Tunj. PPh PNS (KPPN.065-Manokwari) - Belanja Tunj. PPh PNS	1.0 THN	5,263,940,000	5,263,940,000 961,604,000	RM
511126	Belanja Tunj. Beras PNS (KPPN.065-Manokwari) - Belanja Tunj. Beras PNS	1.0 THN	961,604,974	961,604,000 70,971,000 70,971,000	RM

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (005) MAHKAMAH AGUNG
 UNIT ORG (01) Badan Urusan Administrasi
 UNIT KERJA (526718) Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat
 ALOKASI Rp. 12,184,167,000

Halaman : 2

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
511129	<u>Belanja Uang Makan PNS</u> (KPPN.065-Manokwari) - Belanja Uang Makan PNS	1.0 THN	401,190,000	401,190,000	RM
511138	<u>Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS</u> (KPPN.065-Manokwari) - Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS	1.0 THN	100,000,000	100,000,000	RM
511151	<u>Belanja Tunjangan Umum PNS</u> (KPPN.065-Manokwari) - Belanja Tunjangan Umum PNS	1.0 THN	100,000,000	100,000,000	RM
511157	<u>Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim</u> (KPPN.065-Manokwari) - Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim	1.0 THN	1,308,800,000	1,308,800,000	RM
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor			1,694,474,000	
A	<i>Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran</i>			<i>443,814,000</i>	
521111	<u>Belanja Keperluan Perkantoran</u> (KPPN.065-Manokwari) - Honor Pramubakti [4 ORG x 13 BLN] - Honor Satpam [2 ORG x 13 BLN] - Honor Pengemudi [2 ORG x 13 BLN]	52.0 OB 26.0 OB 26.0 OB	3,449,000 3,793,000 3,793,000	179,348,000 98,618,000 98,618,000	RM
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.065-Manokwari) - Keperluan Sehari-hari Perkantoran	1.0 thn	67,230,000	67,230,000	RM
B	<i>Langganan Daya dan Jasa</i>			<i>115,163,000</i>	
521111	<u>Belanja Keperluan Perkantoran</u> (KPPN.065-Manokwari) - Lisensi Zoom	1.0 thn	1,500,000	1,500,000	RM
521114	<u>Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat</u> (KPPN.065-Manokwari) - Pengiriman Surat Pos	12.0 BLN	271,958	3,263,000	RM
522112	<u>Belanja Langganan Telepon</u> (KPPN.065-Manokwari) - Langganan Telpon	12.0 BLN	16,667	200,000	RM
522113	<u>Belanja Langganan Air</u> (KPPN.065-Manokwari) - Langganan Air	12.0 BLN	16,667	200,000	RM
522141	<u>Belanja Sewa</u> (KPPN.065-Manokwari) - Sewa Bandwith Internet	12.0 bln	9,166,667	110,000,000	RM
C	<i>Pemeliharaan kantor</i>			<i>302,356,000</i>	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORG (01) Badan Urusan Administrasi
UNIT KERJA (526718) Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat
ALOKASI Rp. 12,184,167,000

Halaman : 3

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
523111	<u>Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan</u> (KPPN.065-Manokwari)			201,556,000	RM
	- Pemeliharaan Gedung Kantor	596.0 m2	333,115	198,536,000	
	- Pemeliharaan Halaman Gedung Kantor	604.0 m2	5,000	3,020,000	
523121	<u>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.065-Manokwari)			100,800,000	RM
	- Mobil BBM Kendaraan Sewa	3.0 unit	28,000,000	84,000,000	
	- PC/Laptop	21.0 unit	261,905	5,500,000	
	- Printer	21.0 unit	23,810	500,000	
	- AC	8.0 unit	1,287,500	10,300,000	
	- Inventaris kantor [25 ORG x 1 THN]	25.0 OT	20,000	500,000	
D	<i>Koordinasi ke Pusat/Tk. Banding/Tk. Pertama</i>			150,000,000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.065-Manokwari)			150,000,000	RM
	- Perjalanan Dinas	1.0 THN	150,000,000	150,000,000	
E	<i>Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor</i>			202,344,000	
521115	<u>Belanja Honor Operasional Satuan Kerja</u> (KPPN.065-Manokwari)			74,004,000	RM
	- KPA	12.0 BLN	1,813,000	21,756,000	
	- PPK	12.0 BLN	1,764,000	21,168,000	
	- PPSPM	12.0 BLN	990,000	11,880,000	
	- Bendahara	12.0 BLN	700,000	8,400,000	
	- Staf Pengelola Keuangan [2 ORG x 12 BLN]	24.0 OB	450,000	10,800,000	
521119	<u>Belanja Barang Operasional Lainnya</u> (KPPN.065-Manokwari)			128,340,000	RM
	- Keperluan sehari-hari Perkantoran lainnya	1.0 THN	43,500,000	43,500,000	
	- Pakaian Dinas Pegawai	44.0 STEL	1,212,000	53,328,000	
	- Pakaian Dinas Pramubakti	8.0 STEL	782,000	6,256,000	
	- Pakaian Dinas Pengemudi	4.0 STEL	782,000	3,128,000	
	- Pakaian Dinas Satpam	4.0 STEL	2,032,000	8,128,000	
	- Rapat Koordinasi Internal	12.0 BLN	1,166,667	14,000,000	
F	<i>Hak Keuangan dan fasilitas Hakim Ad-Hoc</i>			273,240,000	
522141	<u>Belanja Sewa</u> (KPPN.065-Manokwari)			273,240,000	RM
	- Sewa Rumah Dinas Hakim [11 ORG x 12 BLN]	132.0 OB	2,070,000	273,240,000	
G	<i>KONSUL KE PUSAT DAN PENGAWASAN TK BANDING</i>			207,557,000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.065-Manokwari)			207,557,000	RM
	- KONSUL KE PUSAT DAN PENGAWASAN TK BANDING	1.0 THN	207,557,000	207,557,000	
1071	<u>Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah</u>			90,000,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (005) MAHKAMAH AGUNG
 UNIT ORG (01) Badan Urusan Administrasi
 UNIT KERJA (526718) Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat
 ALOKASI Rp. 12,184,167,000

Halaman : 4

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1071.EBB	Agung Layanan Sarana dan Prasarana Internal[Base Line]	8.0 Unit, m2, Paket		90,000,000	
1071.EBB.951	Lokasi : KAB. MANOKWARI Layanan Sarana Internal	8.0 Unit		90,000,000	
052	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi			90,000,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			90,000,000	
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin (KPPN.065-Manokwari)			90,000,000	RM
	- PC Kepaniteraan [3 Unit]	3.0 Unit	15,000,000	45,000,000	
	- PC Unit [1 Unit]	1.0 Unit	25,000,000	25,000,000	
	- Printer [4 Unit]	4.0 Unit	5,000,000	20,000,000	

Catatan : 1. U = Komponen Utama
 2. P = Komponen Penunjang
 3. * = Blokir

MANOKWARI, 25 Oktober 2023



NURMANSYAH
 NIP 197205101997031003

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (005) MAHKAMAH AGUNG
 UNIT ORG (01) Badan Urusan Administrasi
 UNIT KERJA (526718) Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat
 ALOKASI Rp. 13,184,137,000

Halaman : 1

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
005.01.WA 1066 1066.EBA	Program Dukungan Manajemen Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi Layanan Dukungan Manajemen Internal[Base Line]	2.0 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit		13,184,137,000 12,094,167,000 12,094,167,000	
1066.EBA.962 051 A 524114	Lokasi : KAB. MANOKWARI Layanan Umum Dukungan Manajemen Non Operasional Satker Daerah Bimbingan Teknis ASN Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (KPPN.065-Manokwari) - Bimbingan Teknis ASN - tambahan bimtek ASN	1.0 Laporan 1.0 THN 1.0 keg		85,958,000 85,958,000 85,958,000 85,958,000 62,443,000 23,515,000	RM
1066.EBA.994 001 A 511111	Layanan Perkantoran Gaji dan Tunjangan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Belanja Gaji Pokok PNS (KPPN.065-Manokwari) - Belanja Gaji Pokok PNS	1.0 Layanan 1.0 THN		12,008,209,000 10,313,735,000 10,313,735,000 1,674,288,000	RM
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS (KPPN.065-Manokwari) - Belanja Pembulatan Gaji PNS	1.0 THN	1,674,288,200	1,674,288,000 50,000	RM
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (KPPN.065-Manokwari) - Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	1.0 THN	50,000	50,000	RM
511122	Belanja Tunj. Anak PNS (KPPN.065-Manokwari) - Belanja Tunj. Anak PNS	1.0 THN	167,372,280	167,372,000 100,000,000	RM
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS (KPPN.065-Manokwari) - Belanja Tunj. Struktural PNS	1.0 THN	100,000,000	165,520,000 165,520,000	RM
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS (KPPN.065-Manokwari) - Belanja Tunj. Fungsional PNS	1.0 THN	165,520,000	5,263,940,000 5,263,940,000	RM
511125	Belanja Tunj. PPh PNS (KPPN.065-Manokwari) - Belanja Tunj. PPh PNS	1.0 THN	5,263,940,000	961,604,000 961,604,000	RM
511126	Belanja Tunj. Beras PNS (KPPN.065-Manokwari) - Belanja Tunj. Beras PNS	1.0 THN	961,604,974	70,971,000 70,971,000	RM

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORG (01) Badan Urusan Administrasi
UNIT KERJA (526718) Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat
ALOKASI Rp. 13,184,137,000

Halaman : 2

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
511129	<u>Belanja Uang Makan PNS</u> (KPPN.065-Manokwari)			401,190,000	RM
	- Belanja Uang Makan PNS	1.0 THN	401,190,000	401,190,000	
511138	<u>Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS</u> (KPPN.065-Manokwari)			100,000,000	RM
	- Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS	1.0 THN	100,000,000	100,000,000	
511151	<u>Belanja Tunjangan Umum PNS</u> (KPPN.065-Manokwari)			100,000,000	RM
	- Belanja Tunjangan Umum PNS	1.0 THN	100,000,000	100,000,000	
511157	<u>Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim</u> (KPPN.065-Manokwari)			1,308,800,000	RM
	- Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim	1.0 THN	1,308,800,000	1,308,800,000	
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor			1,694,474,000	
A	<i>Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran</i>			<i>443,814,000</i>	
521111	<u>Belanja Keperluan Perkantoran</u> (KPPN.065-Manokwari)			376,584,000	RM
	- Honor Pramubakti [4 ORG x 13 BLN]	52.0 OB	3,449,000	179,348,000	
	- Honor Satpam [2 ORG x 13 BLN]	26.0 OB	3,793,000	98,618,000	
	- Honor Pengemudi [2 ORG x 13 BLN]	26.0 OB	3,793,000	98,618,000	
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.065-Manokwari)			67,230,000	RM
	- Keperluan Sehari-hari Perkantoran	1.0 thn	67,230,000	67,230,000	
B	<i>Langganan Daya dan Jasa</i>			<i>115,163,000</i>	
521111	<u>Belanja Keperluan Perkantoran</u> (KPPN.065-Manokwari)			1,500,000	RM
	- Lisensi Zoom	1.0 thn	1,500,000	1,500,000	
521114	<u>Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat</u> (KPPN.065-Manokwari)			3,263,000	RM
	- Pengiriman Surat Pos	12.0 BLN	271,958	3,263,000	
522112	<u>Belanja Langganan Telepon</u> (KPPN.065-Manokwari)			200,000	RM
	- Langganan Telpon	12.0 BLN	16,667	200,000	
522113	<u>Belanja Langganan Air</u> (KPPN.065-Manokwari)			200,000	RM
	- Langganan Air	12.0 BLN	16,667	200,000	
522141	<u>Belanja Sewa</u> (KPPN.065-Manokwari)			110,000,000	RM
	- Sewa Bandwith Internet	12.0 bln	9,166,667	110,000,000	
C	<i>Pemeliharaan kantor</i>			<i>302,356,000</i>	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORG (01) Badan Urusan Administrasi
UNIT KERJA (526718) Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat
ALOKASI Rp. 13,184,137,000

Halaman : 3

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
523111	<u>Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan</u> (KPPN.065-Manokwari)			201,556,000	RM
	- Pemeliharaan Gedung Kantor	596.0 m2	333,115	198,536,000	
	- Pemeliharaan Halaman Gedung Kantor	604.0 m2	5,000	3,020,000	
523121	<u>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.065-Manokwari)			100,800,000	RM
	- Mobil BBM Kendaraan Sewa	3.0 unit	28,000,000	84,000,000	
	- PC/Laptop	21.0 unit	261,905	5,500,000	
	- Printer	21.0 unit	23,810	500,000	
	- AC	8.0 unit	1,287,500	10,300,000	
	- Inventaris kantor [25 ORG x 1 THN]	25.0 OT	20,000	500,000	
D	<i>Koordinasi ke Pusat/Tk. Banding/Tk. Pertama</i>			150,000,000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.065-Manokwari)			150,000,000	RM
	- Perjalanan Dinas	1.0 THN	150,000,000	150,000,000	
E	<i>Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor</i>			202,344,000	
521115	<u>Belanja Honor Operasional Satuan Kerja</u> (KPPN.065-Manokwari)			74,004,000	RM
	- KPA	12.0 BLN	1,813,000	21,756,000	
	- PPK	12.0 BLN	1,764,000	21,168,000	
	- PPSPM	12.0 BLN	990,000	11,880,000	
	- Bendahara	12.0 BLN	700,000	8,400,000	
	- Staf Pengelola Keuangan [2 ORG x 12 BLN]	24.0 OB	450,000	10,800,000	
521119	<u>Belanja Barang Operasional Lainnya</u> (KPPN.065-Manokwari)			128,340,000	RM
	- Keperluan sehari-hari Perkantoran lainnya	1.0 THN	43,500,000	43,500,000	
	- Pakaian Dinas Pegawai	44.0 STEL	1,212,000	53,328,000	
	- Pakaian Dinas Pramubakti	8.0 STEL	782,000	6,256,000	
	- Pakaian Dinas Pengemudi	4.0 STEL	782,000	3,128,000	
	- Pakaian Dinas Satpam	4.0 STEL	2,032,000	8,128,000	
	- Rapat Koordinasi Internal	12.0 BLN	1,166,667	14,000,000	
F	<i>Hak Keuangan dan fasilitas Hakim Ad-Hoc</i>			273,240,000	
522141	<u>Belanja Sewa</u> (KPPN.065-Manokwari)			273,240,000	RM
	- Sewa Rumah Dinas Hakim [11 ORG x 12 BLN]	132.0 OB	2,070,000	273,240,000	
G	<i>KONSUL KE PUSAT DAN PENGAWASAN TK BANDING</i>			207,557,000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.065-Manokwari)			207,557,000	RM
	- KONSUL KE PUSAT DAN PENGAWASAN TK BANDING	1.0 THN	207,557,000	207,557,000	
1071	<u>Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah</u>			1,089,970,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (005) MAHKAMAH AGUNG
 UNIT ORG (01) Badan Urusan Administrasi
 UNIT KERJA (526718) Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat
 ALOKASI Rp. 13,184,137,000

Halaman : 4

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1071.EBB	Agung Layanan Sarana dan Prasarana Internal[Base Line]	8.0 Unit, m2, Paket		1,089,970,000	
1071.EBB.951	Lokasi : KAB. MANOKWARI Layanan Sarana Internal	8.0 Unit		1,089,970,000	
051	Pengadaan kendaraan bermotor			999,970,000	U
A	Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda 4			870,700,000	
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin (KPPN.065-Manokwari / Reg. 28USM7TA)			870,700,000	HLD
	- Kendaraan Operasional Roda 4	1.0 unit	327,100,000	327,100,000	
	- Kendaraan Operasional Roda 4	2.0 unit	271,800,000	543,600,000	
B	Pengadaan Kendaraan Roda 2			76,500,000	
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin (KPPN.065-Manokwari / Reg. 28USM7TA)			76,500,000	HLD
	- Kendaraan Operasional Roda 2	3.0 Unit	25,500,000	76,500,000	
C	Peralatan Kantor dan Perlengkapan Rumah Dinas Pimpinan			52,770,000	
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin (KPPN.065-Manokwari / Reg. 28USM7TA)			52,770,000	HLD
	- Sofa	2.0 unit	5,600,000	11,200,000	
	- Kulkas Ketua	1.0 Unit	3,550,000	3,550,000	
	- Kulkas	3.0 Unit	2,500,000	7,500,000	
	- Sprind Bed	2.0 Unit	5,000,000	10,000,000	
	- Mesin Cuci	2.0 Unit	1,880,000	3,760,000	
	- Lemari Ketua	1.0 Unit	3,000,000	3,000,000	
	- Lemari	3.0 Unit	2,500,000	7,500,000	
	- Mesin Babat Rumput	1.0 Unit	2,500,000	2,500,000	
	- Meja Rapat	2.0 Unit	1,880,000	3,760,000	
052	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi			90,000,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			90,000,000	
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin (KPPN.065-Manokwari)			90,000,000	RM
	- PC Kepaniteraan [3 Unit]	3.0 Unit	15,000,000	45,000,000	
	- PC Unit [1 Unit]	1.0 Unit	25,000,000	25,000,000	
	- Printer [4 Unit]	4.0 Unit	5,000,000	20,000,000	

Catatan : 1. U = Komponen Utama
 2. P = Komponen Penunjang
 3. * = Blokir

MANOKWARI, 5 November 2023


NURMANSYAH
 NIP 197205101997031003

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORG (01) Badan Urusan Administrasi
UNIT KERJA (526718) Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat
ALOKASI Rp. 13,279,289,000

Halaman : 1

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
005.01.WA 1066 1066.EBA	Program Dukungan Manajemen Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi Layanan Dukungan Manajemen Internal[Base Line]	2.0 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit		13,279,289,000 12,154,319,000 12,154,319,000	
1066.EBA.962 051 A 524114	Lokasi : KAB. MANOKWARI Layanan Umum Dukungan Manajemen Non Operasional Satker Daerah Bimbingan Teknis ASN Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (KPPN.065-Manokwari) - Bimbingan Teknis ASN - tambahan bimtek ASN	1.0 Laporan 1.0 THN 1.0 keg		85,958,000 85,958,000 85,958,000 85,958,000 62,443,000 23,515,000	RM
1066.EBA.994 001 A 511111	Layanan Perkantoran Gaji dan Tunjangan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Belanja Gaji Pokok PNS (KPPN.065-Manokwari) - Belanja Gaji Pokok PNS	1.0 Layanan 1.0 THN		12,068,361,000 10,313,731,000 10,313,731,000 1,674,288,000	RM
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS (KPPN.065-Manokwari) - Belanja Pembulatan Gaji PNS	1.0 THN	1,674,288,200	1,674,288,000 50,000	RM
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (KPPN.065-Manokwari) - Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	1.0 THN	50,000	50,000 167,372,000	RM
511122	Belanja Tunj. Anak PNS (KPPN.065-Manokwari) - Belanja Tunj. Anak PNS	1.0 THN	167,372,280	167,372,000 100,000,000	RM
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS (KPPN.065-Manokwari) - Belanja Tunj. Struktural PNS	1.0 THN	100,000,000	100,000,000 165,520,000	RM
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS (KPPN.065-Manokwari) - Belanja Tunj. Fungsional PNS	1.0 THN	165,520,000	165,520,000 5,263,940,000	RM
511125	Belanja Tunj. PPh PNS (KPPN.065-Manokwari) - Belanja Tunj. PPh PNS	1.0 THN	5,263,940,000	5,263,940,000 1,363,658,000	RM
511126	Belanja Tunj. Beras PNS (KPPN.065-Manokwari) - Belanja Tunj. Beras PNS	1.0 THN	1,363,658,743	1,363,658,000 70,971,000 70,971,000	RM

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORG (01) Badan Urusan Administrasi
UNIT KERJA (526718) Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat
ALOKASI Rp. 13,279,289,000

Halaman : 2

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
511129	<u>Belanja Uang Makan PNS</u> (KPPN.065-Manokwari) - Belanja Uang Makan PNS	1.0 THN	401,190,000	401,190,000	RM
511138	<u>Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS</u> (KPPN.065-Manokwari) - Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS	1.0 THN	333,580,000	333,580,000	RM
511151	<u>Belanja Tunjangan Umum PNS</u> (KPPN.065-Manokwari) - Belanja Tunjangan Umum PNS	1.0 THN	100,000,000	100,000,000	RM
511157	<u>Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim</u> (KPPN.065-Manokwari) - Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim	1.0 THN	673,162,257	673,162,000	RM
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor			1,754,630,000	
A	<i>Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran</i>			<i>443,814,000</i>	
521111	<u>Belanja Keperluan Perkantoran</u> (KPPN.065-Manokwari) - Honor Pramubakti [4 ORG x 13 BLN] - Honor Satpam [2 ORG x 13 BLN] - Honor Pengemudi [2 ORG x 13 BLN]	52.0 OB 26.0 OB 26.0 OB	3,449,000 3,793,000 3,793,000	179,348,000 98,618,000 98,618,000	RM
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.065-Manokwari) - Keperluan Sehari-hari Perkantoran	1.0 thn	67,230,000	67,230,000	RM
B	<i>Langganan Daya dan Jasa</i>			<i>133,189,000</i>	
521111	<u>Belanja Keperluan Perkantoran</u> (KPPN.065-Manokwari) - Lisensi Zoom	1.0 thn	1,000,000	1,000,000	RM
521114	<u>Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat</u> (KPPN.065-Manokwari) - Pengiriman Surat Pos	12.0 BLN	105,250	1,263,000	RM
522112	<u>Belanja Langganan Telepon</u> (KPPN.065-Manokwari) - Langganan Telpon	12.0 BLN	4,167	50,000	RM
522113	<u>Belanja Langganan Air</u> (KPPN.065-Manokwari) - Langganan Air	12.0 BLN	4,167	50,000	RM
522141	<u>Belanja Sewa</u> (KPPN.065-Manokwari) - Sewa Bandwith Internet	12.0 bln	10,902,167	130,826,000	RM
C	<i>Pemeliharaan kantor</i>			<i>301,476,000</i>	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORG (01) Badan Urusan Administrasi
UNIT KERJA (526718) Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat
ALOKASI Rp. 13,279,289,000

Halaman : 3

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
523111	<u>Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan</u> (KPPN.065-Manokwari)			205,356,000	RM
	- Pemeliharaan Gedung Kantor	596.0 m2	339,490	202,336,000	
	- Pemeliharaan Halaman Gedung Kantor	604.0 m2	5,000	3,020,000	
523121	<u>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.065-Manokwari)			96,120,000	RM
	- Mobil BBM Kendaraan Sewa	3.0 unit	26,733,334	80,200,000	
	- PC/Laptop	21.0 unit	238,096	5,000,000	
	- Printer	21.0 unit	5,715	120,000	
	- AC	8.0 unit	1,287,500	10,300,000	
	- Inventaris kantor [25 ORG x 1 THN]	25.0 OT	20,000	500,000	
D	<i>Koordinasi ke Pusat/Tk. Banding/Tk. Pertama</i>			150,000,000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.065-Manokwari)			150,000,000	RM
	- Perjalanan Dinas	1.0 THN	150,000,000	150,000,000	
E	<i>Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor</i>			206,024,000	
521115	<u>Belanja Honor Operasional Satuan Kerja</u> (KPPN.065-Manokwari)			74,004,000	RM
	- KPA	12.0 BLN	1,813,000	21,756,000	
	- PPK	12.0 BLN	1,764,000	21,168,000	
	- PPSPM	12.0 BLN	990,000	11,880,000	
	- Bendahara	12.0 BLN	700,000	8,400,000	
	- Staf Pengelola Keuangan [2 ORG x 12 BLN]	24.0 OB	450,000	10,800,000	
521119	<u>Belanja Barang Operasional Lainnya</u> (KPPN.065-Manokwari)			132,020,000	RM
	- Keperluan sehari-hari Perkantoran lainnya	1.0 THN	47,180,000	47,180,000	
	- Pakaian Dinas Pegawai	44.0 STEL	1,212,000	53,328,000	
	- Pakaian Dinas Pramubakti	8.0 STEL	782,000	6,256,000	
	- Pakaian Dinas Pengemudi	4.0 STEL	782,000	3,128,000	
	- Pakaian Dinas Satpam	4.0 STEL	2,032,000	8,128,000	
	- Rapat Koordinasi Internal	12.0 BLN	1,166,667	14,000,000	
F	<i>Hak Keuangan dan fasilitas Hakim Ad-Hoc</i>			312,570,000	
522141	<u>Belanja Sewa</u> (KPPN.065-Manokwari)			312,570,000	RM
	- Sewa Rumah Dinas Hakim	19.0 OB	2,070,000	39,330,000	
	- Sewa Rumah Dinas Hakim [11 ORG x 12 BLN]	132.0 OB	2,070,000	273,240,000	
G	<i>KONSUL KE PUSAT DAN PENGAWASAN TK BANDING</i>			207,557,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (005) MAHKAMAH AGUNG
 UNIT ORG (01) Badan Urusan Administrasi
 UNIT KERJA (526718) Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat
 ALOKASI Rp. 13,279,289,000

Halaman : 4

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.065-Manokwari)			207,557,000	RM
	- KONSUL KE PUSAT DAN PENGAWASAN TK BANDING	1.0 THN	207,557,000	207,557,000	
1071	<u>Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung</u>			1,124,970,000	
1071.EBB	<u>Layanan Sarana dan Prasarana Internal[Base Line]</u>	13.0 Unit, m2, Paket		1,124,970,000	
	Lokasi : KAB. MANOKWARI				
1071.EBB.951	<u>Layanan Sarana Internal</u>	13.0 Unit		1,124,970,000	U
051	<u>Pengadaan kendaraan bermotor</u>			943,910,000	
A	<u>Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda 4</u>			870,500,000	
532111	<u>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.065-Manokwari / Reg. 28USM7TA)			870,500,000	HLD
	- Kendaraan Operasional Roda 4	1.0 unit	327,000,000	327,000,000	
	- Kendaraan Operasional Roda 4	2.0 unit	271,750,000	543,500,000	
B	<u>Pengadaan Kendaraan Roda 2</u>			73,410,000	
532111	<u>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.065-Manokwari / Reg. 28USM7TA)			73,410,000	HLD
	- Kendaraan Operasional Roda 2	3.0 Unit	24,470,000	73,410,000	
052	<u>Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi</u>			90,000,000	
A	<u>TANPA SUB KOMPONEN</u>			90,000,000	
532111	<u>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.065-Manokwari)			90,000,000	RM
	- PC Kepaniteraan [3 Unit]	3.0 Unit	15,000,000	45,000,000	
	- PC Unit [1 Unit]	1.0 Unit	25,000,000	25,000,000	
	- Printer [4 Unit]	4.0 Unit	5,000,000	20,000,000	
053	<u>Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran</u>			91,060,000	HLD
A	<u>Pengadaan Fasilitas Perkantoran</u>			91,060,000	
532111	<u>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.065-Manokwari / Reg. 28USM7TA)			56,060,000	
	- Sofa	2.0 unit	6,100,000	12,200,000	
	- Kulkas Ketua	1.0 Unit	3,441,000	3,441,000	
	- Kulkas	3.0 Unit	3,059,000	9,177,000	
	- Sprind Bed	2.0 Unit	6,100,000	12,200,000	
	- Mesin Cuci	2.0 Unit	2,318,000	4,636,000	
	- Lemari Ketua	1.0 Unit	2,136,750	2,136,000	
	- Lemari	3.0 Unit	2,560,250	7,680,000	
	- Mesin Babat Rumput	1.0 Unit	2,516,500	2,516,000	
	- Meja Rapat	2.0 Unit	1,037,000	2,074,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

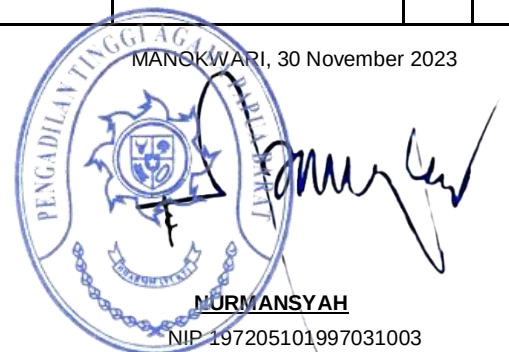
KEMEN/LEMB (005) MAHKAMAH AGUNG
 UNIT ORG (01) Badan Urusan Administrasi
 UNIT KERJA (526718) Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat
 ALOKASI Rp. 13,279,289,000

Halaman : 5

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin (KPPN.065-Manokwari) - AC	5.0 unit	7,000,000	35,000,000 35,000,000	RM

Catatan : 1. U = Komponen Utama
 2. P = Komponen Penunjang
 3. * = Blokir

MANOKWARI, 30 November 2023



NORMANSYAH
 NIP 197205101997031003

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB
UNIT ORG
UNIT KERJA
ALOKASI

(005)
(01)
(526718)
Rp. 13,213,773,000

MAHKAMAH AGUNG
Badan Urusan Administrasi
Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
005.01.WA 1066 1066.EBA	Program Dukungan Manajemen Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi Layanan Dukungan Manajemen Internal[Base Line]	2.0 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit		13,213,773,000 12,088,803,000 12,088,803,000	
1066.EBA.962 051 A 524114	Lokasi : KAB. MANOKWARI Layanan Umum Dukungan Manajemen Non Operasional Satker Daerah Bimbingan Teknis ASN Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (KPPN.065-Manokwari) - Bimbingan Teknis ASN - tambahan bimtek ASN	1.0 Laporan 1.0 THN 1.0 keg		85,958,000 85,958,000 85,958,000 85,958,000	RM
1066.EBA.994 001 A 511111	Layanan Perkantoran Gaji dan Tunjangan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Belanja Gaji Pokok PNS (KPPN.065-Manokwari) - Belanja Gaji Pokok PNS	1.0 Layanan 1.0 THN		12,002,845,000 10,248,215,000 10,248,215,000 1,674,288,000	RM
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS (KPPN.065-Manokwari) - Belanja Pembulatan Gaji PNS	1.0 THN	1,674,288,200	1,674,288,000 50,000	RM
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (KPPN.065-Manokwari) - Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	1.0 THN	50,000	50,000 167,372,000	RM
511122	Belanja Tunj. Anak PNS (KPPN.065-Manokwari) - Belanja Tunj. Anak PNS	1.0 THN	167,372,280	167,372,000 100,000,000	RM
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS (KPPN.065-Manokwari) - Belanja Tunj. Struktural PNS	1.0 THN	100,000,000	100,000,000 165,520,000	RM
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS (KPPN.065-Manokwari) - Belanja Tunj. Fungsional PNS	1.0 THN	165,520,000	165,520,000 5,263,940,000	RM
511125	Belanja Tunj. PPh PNS (KPPN.065-Manokwari) - Belanja Tunj. PPh PNS	1.0 THN	5,263,940,000	5,263,940,000 1,363,659,000	RM
511126	Belanja Tunj. Beras PNS (KPPN.065-Manokwari) - Belanja Tunj. Beras PNS	1.0 THN	1,363,659,000	1,363,659,000 70,971,000 70,971,000	RM

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORG (01) Badan Urusan Administrasi
UNIT KERJA (526718) Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat
ALOKASI Rp. 13,213,773,000

Halaman : 2

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
511129	<u>Belanja Uang Makan PNS</u> (KPPN.065-Manokwari) - Belanja Uang Makan PNS	1.0 THN	401,190,000	401,190,000	RM
511138	<u>Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS</u> (KPPN.065-Manokwari) - Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS	1.0 THN	333,580,000	333,580,000	RM
511151	<u>Belanja Tunjangan Umum PNS</u> (KPPN.065-Manokwari) - Belanja Tunjangan Umum PNS	1.0 THN	100,000,000	100,000,000	RM
511157	<u>Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim</u> (KPPN.065-Manokwari) - Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim	1.0 THN	607,645,514	607,645,000	RM
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor			1,754,630,000	
A	<i>Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran</i>			<i>443,814,000</i>	
521111	<u>Belanja Keperluan Perkantoran</u> (KPPN.065-Manokwari) - Honor Pramubakti [4 ORG x 13 BLN] - Honor Satpam [2 ORG x 13 BLN] - Honor Pengemudi [2 ORG x 13 BLN]	52.0 OB 26.0 OB 26.0 OB	3,449,000 3,793,000 3,793,000	179,348,000 98,618,000 98,618,000	RM
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.065-Manokwari) - Keperluan Sehari-hari Perkantoran	1.0 thn	67,230,000	67,230,000	RM
B	<i>Langganan Daya dan Jasa</i>			<i>133,189,000</i>	
521111	<u>Belanja Keperluan Perkantoran</u> (KPPN.065-Manokwari) - Lisensi Zoom	1.0 thn	1,000,000	1,000,000	RM
521114	<u>Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat</u> (KPPN.065-Manokwari) - Pengiriman Surat Pos	12.0 BLN	105,250	1,263,000	RM
522112	<u>Belanja Langganan Telepon</u> (KPPN.065-Manokwari) - Langganan Telpon	12.0 BLN	4,167	50,000	RM
522113	<u>Belanja Langganan Air</u> (KPPN.065-Manokwari) - Langganan Air	12.0 BLN	4,167	50,000	RM
522141	<u>Belanja Sewa</u> (KPPN.065-Manokwari) - Sewa Bandwith Internet	12.0 bln	10,902,167	130,826,000	RM
C	<i>Pemeliharaan kantor</i>			<i>301,476,000</i>	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORG (01) Badan Urusan Administrasi
UNIT KERJA (526718) Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat
ALOKASI Rp. 13,213,773,000

Halaman : 3

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
523111	<u>Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan</u> (KPPN.065-Manokwari) - Pemeliharaan Gedung Kantor - Pemeliharaan Halaman Gedung Kantor	596.0 m2 604.0 m2	339,490 5,000	205,356,000 202,336,000 3,020,000	RM
523121	<u>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.065-Manokwari) - Mobil BBM Kendaraan Sewa - PC/Laptop - Printer - AC - Inventaris kantor [25 ORG x 1 THN]	3.0 unit 21.0 unit 21.0 unit 8.0 unit 25.0 OT	26,733,334 238,096 5,715 1,287,500 20,000	96,120,000 80,200,000 5,000,000 120,000 10,300,000 500,000	RM
D	<i>Koordinasi ke Pusat/Tk. Banding/Tk. Pertama</i>			150,000,000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.065-Manokwari) - Perjalanan Dinas	1.0 THN	150,000,000	150,000,000	RM
E	<i>Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor</i>			206,024,000	
521115	<u>Belanja Honor Operasional Satuan Kerja</u> (KPPN.065-Manokwari) - KPA - PPK - PPSPM - Bendahara - Staf Pengelola Keuangan [2 ORG x 12 BLN]	12.0 BLN 12.0 BLN 12.0 BLN 12.0 BLN 24.0 OB	1,813,000 1,764,000 990,000 700,000 450,000	74,004,000 21,756,000 21,168,000 11,880,000 8,400,000 10,800,000	RM
521119	<u>Belanja Barang Operasional Lainnya</u> (KPPN.065-Manokwari) - Keperluan sehari-hari Perkantoran lainnya - Pakaian Dinas Pegawai - Pakaian Dinas Pramubakti - Pakaian Dinas Pengemudi - Pakaian Dinas Satpam - Rapat Koordinasi Internal	1.0 THN 44.0 STEL 8.0 STEL 4.0 STEL 4.0 STEL 12.0 BLN	47,180,000 1,212,000 782,000 782,000 2,032,000 1,166,667	132,020,000 47,180,000 53,328,000 6,256,000 3,128,000 8,128,000 14,000,000	RM
F	<i>Hak Keuangan dan fasilitas Hakim Ad-Hoc</i>			312,570,000	
522141	<u>Belanja Sewa</u> (KPPN.065-Manokwari) - Sewa Rumah Dinas Hakim - Sewa Rumah Dinas Hakim [11 ORG x 12 BLN]	19.0 OB 132.0 OB	2,070,000 2,070,000	312,570,000 39,330,000 273,240,000	RM
G	<i>KONSUL KE PUSAT DAN PENGAWASAN TK BANDING</i>			207,557,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORG (01) Badan Urusan Administrasi
UNIT KERJA (526718) Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat
ALOKASI Rp. 13,213,773,000

Halaman : 4

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.065-Manokwari)			207,557,000	RM
	- KONSUL KE PUSAT DAN PENGAWASAN TK BANDING	1.0 THN	207,557,000	207,557,000	
1071	<u>Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung</u>			1,124,970,000	
1071.EBB	<u>Layanan Sarana dan Prasarana Internal[Base Line]</u>	13.0 Unit, m2, Paket		1,124,970,000	
	Lokasi : KAB. MANOKWARI				
1071.EBB.951	<u>Layanan Sarana Internal</u>	13.0 Unit		1,124,970,000	U
051	<u>Pengadaan kendaraan bermotor</u>			943,910,000	
A	<u>Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda 4</u>			870,500,000	
532111	<u>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.065-Manokwari / Reg. 28USM7TA)			870,500,000	HLD
	- Kendaraan Operasional Roda 4	1.0 unit	327,000,000	327,000,000	
	- Kendaraan Operasional Roda 4	2.0 unit	271,750,000	543,500,000	
B	<u>Pengadaan Kendaraan Roda 2</u>			73,410,000	
532111	<u>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.065-Manokwari / Reg. 28USM7TA)			73,410,000	HLD
	- Kendaraan Operasional Roda 2	3.0 Unit	24,470,000	73,410,000	U
052	<u>Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi</u>			90,000,000	
A	<u>TANPA SUB KOMPONEN</u>			90,000,000	
532111	<u>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.065-Manokwari)			90,000,000	RM
	- PC Kepaniteraan [3 Unit]	3.0 Unit	15,000,000	45,000,000	
	- PC Unit [1 Unit]	1.0 Unit	25,000,000	25,000,000	
	- Printer [4 Unit]	4.0 Unit	5,000,000	20,000,000	
053	<u>Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran</u>			91,060,000	
A	<u>Pengadaan Fasilitas Perkantoran</u>			91,060,000	
532111	<u>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.065-Manokwari / Reg. 28USM7TA)			56,060,000	HLD
	- Sofa	2.0 unit	6,100,000	12,200,000	
	- Kulkas Ketua	1.0 Unit	3,441,000	3,441,000	
	- Kulkas	3.0 Unit	3,059,000	9,177,000	
	- Sprind Bed	2.0 Unit	6,100,000	12,200,000	
	- Mesin Cuci	2.0 Unit	2,318,000	4,636,000	
	- Lemari Ketua	1.0 Unit	2,136,750	2,136,000	
	- Lemari	3.0 Unit	2,560,250	7,680,000	
	- Mesin Babat Rumput	1.0 Unit	2,516,500	2,516,000	
	- Meja Rapat	2.0 Unit	1,037,000	2,074,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

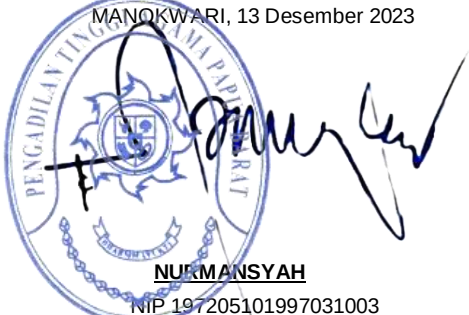
KEMEN/LEMB (005) MAHKAMAH AGUNG
 UNIT ORG (01) Badan Urusan Administrasi
 UNIT KERJA (526718) Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat
 ALOKASI Rp. 13,213,773,000

Halaman : 5

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
532111	<u>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.065-Manokwari) - AC	5.0 unit	7,000,000	35,000,000 35,000,000	RM

Catatan : 1. U = Komponen Utama
 2. P = Komponen Penunjang
 3. * = Blokir

MANOKWARI, 13 Desember 2023



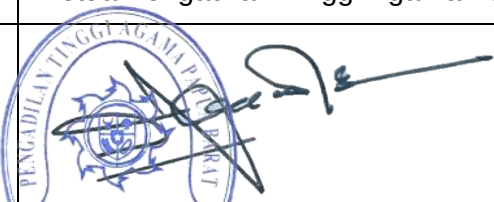
NUK MANSYAH
 NIP 197205101997031003



PENGADILAN TINGGI AGAMA PAPUA BARAT

Jalan Brawijaya, Kelurahan Manokwari Timur, Distrik Manokwari
Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat, Kode pos : 98311
Website : <https://pta-papua Barat.go.id> Email : ptapapua Barat@gmail.com

S O P PENGUMPULAN DATA KINERJA DAN PENYUSUNAN LAPORAN TRIWULAN REALISASI PERJANJIAN KINERJA

Nomor	SOP/AS/33
Tanggal Pembuatan	1 Februari 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	1 Februari 2023
Disahkan oleh	Ketua Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat
	 Drs. H. M. Nahrudin, S.H., M.H. NIP. 19560805.198403.1.004

DOKUMEN MASTER	:	✓					
DOKUMEN TERKENDALI	:		NO. SALINAN : <table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:						
DOKUMEN KADALUARSA	:						

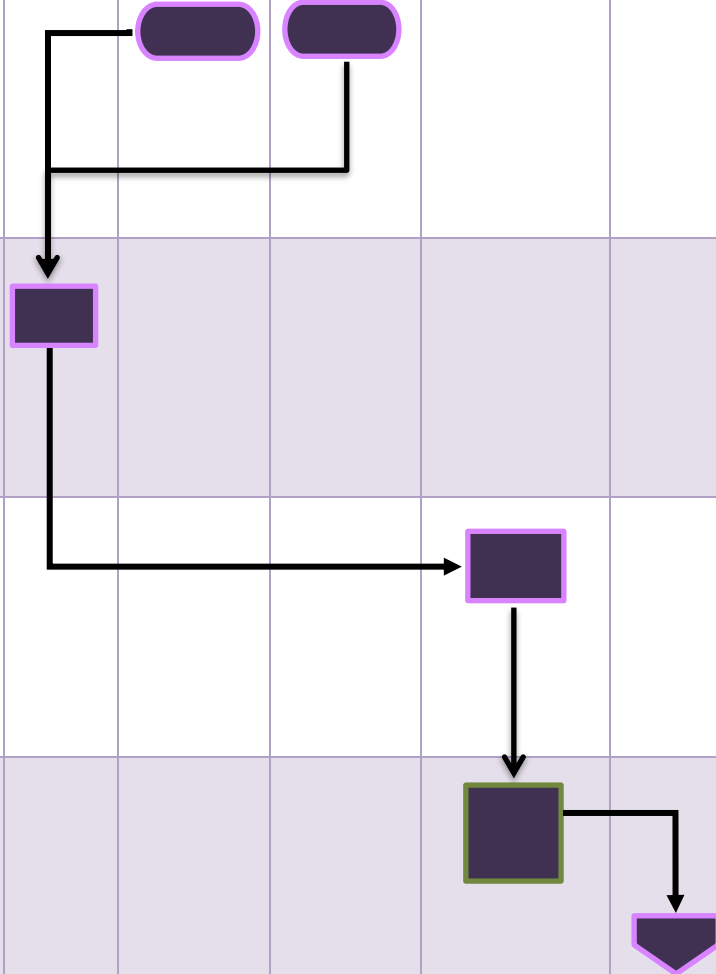
**Dokumen ini adalah milik Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat
Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun
Tanpa seijin Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat**

DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
1.	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan	1. Memahami tentang proses penyusunan indikator kebutuhan unit (IKU)
2.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional	2. Memiliki kemampuan dalam penyusunan indikator kebutuhan unit (IKU)
3.	Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP)	3. Mampu berkoordinasi dengan semua pihak terkait
4.	Peraturan Men-PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis	

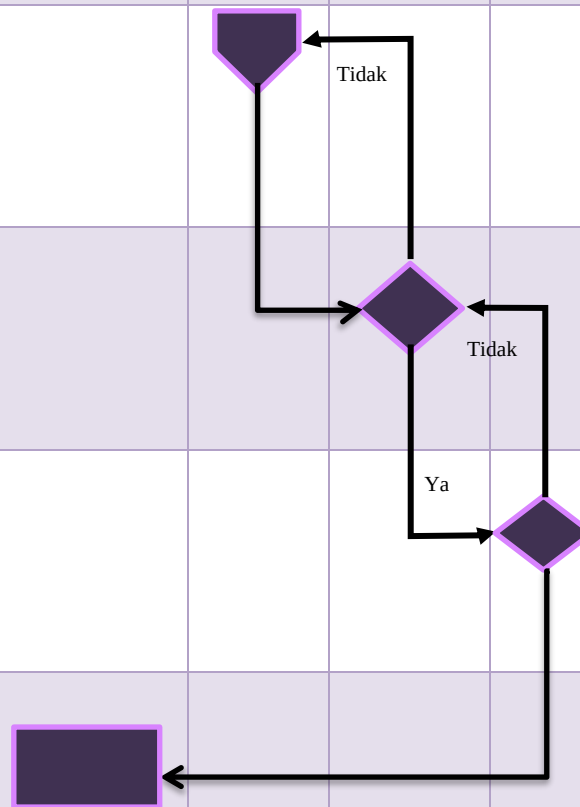
	Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	
5	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan belanja negara	
6	Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 2049/SEK/XII/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya	
7	Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya	
8	Peraturan Men-PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan	

KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGAPAN
1.	SOP Penyusunan SAKIP	1. Data-data pendukung 2. Komputer / printer / scanner / Alat Tulis Kantor 3. Jaringan internet
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka laporan akuntabilitas kinerja tahunan tidak akan sepenuhnya sesuai dengan apa yang di harapkan organisasi		1. Laporan Indikator Kebutuhan Unit 2. SK Tim Penyusun Laporan 3. Undangan Tim

**PROSEDUR PENGUMPULAN DATA KINERJA DAN
PENYUSUNAN LAPORAN TRIWULAN REALISASI PERJANJIAN KINERJA**

No	Kegiatan	Pelaksana							Mutu Baku		Ket		
		Oprt	Panmud Hukum	Kasubag Renprog	Kabag Kepeg & Perencanaan	Tim Sakip	Panitera / Sekretaris	Ketua	Kelengkapan	Waktu		Output	
1	Menyiapkan data laporan bulanan perkara dan umum yang menjadi bahan laporan realisasi PK untuk diinput dalam e-Sakip Komdanas								Memo instruksi Panitera/Sekretaris	90 menit	Data laporan bulanan Perkara dan Kesekretariatan	Setiap awal bulan	
2	Mengklasifikasi dan menginput data laporan bulanan ke dalam e-Sakip Komdanas									Data laporan bulanan perkara dan Kesekretariatan	45 menit	Hasil input data laporan dalam e-Sakip Komdanas	Setiap awal bulan
3	Memeriksa dan menelaah laporan bulanan realisasi PK yang telah diinput dalam e-Sakip Komdanas									E-Sakip Komdanas	15 menit	Laporan bulanan dalam e-Sakip Komdanas terperiksa	
4	Menyiapkan bahan Laporan Evaluasi Triwulanan Realisasi PK dari data yang telah terinput bulanan dalam e-Sakip									E-Sakip Komdanas dan data laporan bulanan	60 menit	Disposisi	

	Komdanas											
4	Menyusun Laporan Evaluasi Triwulanan Realisasi PK								Data laporan bulanan e-Sakip Komdanas	16 Jam	Konsep Laporan Triwulanan Realisasi PK	
5	Memeriksa dan menelaah laporan Triwulanan Realisasi PK								Konsep Laporan Triwulanan Realisasi PK	30 menit	Konsep Laporan Triwulanan yang telah diparaf	
6	Meneliti dan Menandatangani laporan Evaluasi triwulanan realisasi PK PTA Papua Barat								Konsep Laporan Triwulanan Realisasi PK	15 menit	Laporan Triwulanan Realisasi PK	
7	Menyimpan laporan evaluasi triwulan untuk dijadikan bahan laporan tahunan (LKjIP)								Konsep SK Tim	10 menit	Arsip Laporan Triwulanan PK	
Waktu yang diperlukan kurang lebih : 1.225 menit / 2 hari 4 jam												





SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PAPUA BARAT
NOMOR : 56/KPTA.W31-A/OT.01.6/I/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
DOKUMEN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(SAKIP) PENGADILAN TINGGI AGAMA PAPUA BARAT TAHUN 2024

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PAPUA BARAT

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 4107/SEK/OT1.6/12/2023 tanggal 19 Desember 2023, tentang Penyampaian Dokumen SAKIP, maka dipandang perlu membentuk Tim Penyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat Tahun 2024

b. bahwa nama-nama yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk menjalankan tugas tersebut;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Diktum Ketiga Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja Utama Masing-masing;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/09/ M.PAN/ 05/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja dilingkungan Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PAPUA BARAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PENGADILAN TINGGI AGAMA PAPUA BARAT TAHUN 2024.

KESATU : Tim Penyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat Tahun 2024 bertugas :

1. Mengkoordinir dan melaksanakan kegiatan Rapat, Asistensi, dan kegiatan-kegiatan lain dalam rangka pengumpulan bahan dan data untuk penyusunan Dokumen SAKIP Tahun 2024;
2. Menghimpun bahan-bahan laporan dan menyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat;
3. Melaporkan hasil penyusunan SAKIP dan segala bentuk kegiatan dalam penyusunannya kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat.

KEDUA Tim Penyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat Tahun 2024 mulai bekerja sejak diterbitkannya Surat Keputusan ini dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat Tahun Anggaran 2024.

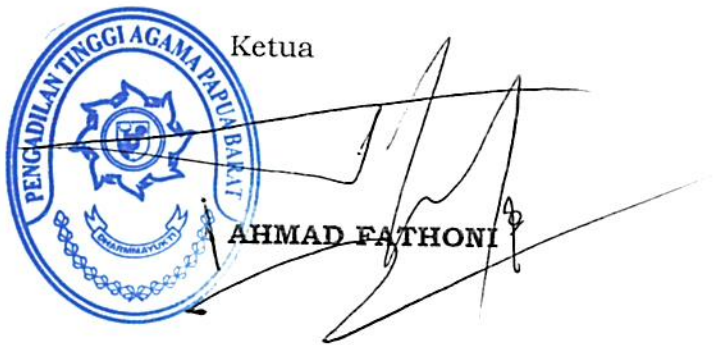
Ditetapkan di : Manokwari
Pada Tanggal : 08 Januari 2024
Ketua

AHMAD FATHONI

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat
Nomor : 56/KPTA.W31-A/OT.01.6/I/2024
Tanggal : 08 Januari 2024
Tentang : Tim Penyusun Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah(SAKIP) Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat
Tahun 2024

No	NAMA	JABATAN	
		DINAS	TIM
1.	Dr. H. Ahmad Fathoni, S.H, M.Hum	Ketua	Pembina
2.	Dr.Drs.H.Abdul Ghofur, S.H.,M.H.	Wakil Ketua	Pengarah
3.	Drs. Makmur, M.H.	Hakim Tinggi	Ketua
4.	Nurmansyah, S.Ag., M.H	Sekretaris	Sekretaris I
5.	Drs. Fakhrurazi, M.H.	Panitera	Sekretaris II
6.	Syamsul Bahri, S.H.I.	Kabag. Renpeg	Anggota
7.	Raswin, S.H.I.	Kabag. Um.Keuangan	Anggota
8.	Hj. Khoiriyah, S.Ag., M.H.	Panmud. Hukum	Anggota
9.	Musa Sholawat, S.H.I	Panmud. Banding	Anggota
10.	Muh. Nur Hasjim	Ksb. Kepeg.dan IT	Anggota
11.	Manik Rochmani, S.H.	Ksb. Renprog Anggaran	Anggota
12.	Suriakencana, S.E.	Ksb. Keu dan Pelaporan	Anggota
13.	Ummu Mukhlisa, S.H., M.H.	Ksb. TURT	Anggota

Ketua



AHMAD FATHONI

REVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA

PENGADILAN TINGGI AGAMA
PAPUA BARAT
TAHUN 2024



MAHKAMAH AGUNG





PENGADILAN TINGGI AGAMA PAPUA BARAT
SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PAPUA BARAT
NOMOR 17/KPTA.W31-A/RA1.10/I/2024
TENTANG
PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PAPUA BARAT

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PAPUA BARAT

- Menimbang : 1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
2. bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015 – 2019, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2020 – 2024 maka Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang - undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan;

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja;
7. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : 173/SEK/SK/ I/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama pada Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan : Hasil Rapat Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat tanggal 8 Januari 2024 tentang Pembahasan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PAPUA BARAT TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI AGAMA PAPUA BARAT

PERTAMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat untuk menetapkan Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

KEDUA : Bahwa dalam melakukan Reviu Indikator Kinerja Utama bertujuan untuk lebih menyelaraskan isu-isu strategis di Lingkungan MA RI dan Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat agar tetap memiliki IKU yang valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Manokwari
pada tanggal : 8 Januari 2024



AHMAD FATHONI

**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PAPUA BARAT**

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	a. Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100$ Catatan : • SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan. • Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. • Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Banding paling lambat 3 (tiga) bulan. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100$ Catatan : • Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi dari upaya hukum banding. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. • Upaya hukum kasasi dinyatakan mulai adanya akta pemyataan kasasi.		
		c. Indeks persepsi <i>stakeholder</i> yang puas terhadap layanan peradilan	Indeks Persepsi Kepuasan <i>Stakholder</i> Catatan :	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			• PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Sekretaris Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. • Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus > 80. • Stakeholder adalah semua pemangku kepentingan yang menerima layanan.		
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan yang dikirim tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan yang dikirim}} \times 100$ Catatan : • Jumlah salinan putusan yang dikirim tepat waktu adalah jumlah Salinan putusan/penetapan yang dikirim ke pengadilan pengaju sesuai dengan ketentuan. • Jumlah putusan yang dikirim adalah jumlah putusan/penetapan banding yang sudah diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Manokwari, 8 Januari 2024
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat

AHMAD FATHONI



PENGADILAN TINGGI AGAMA PAPUA BARAT

Jalan Brawijaya, Manokwari Provinsi Papua Barat





PENGADILAN TINGGI AGAMA PAPUA BARAT

Jalan Brawijaya, Manokwari Provinsi Papua Barat

Website : www.pta-papuabarat.go.id

Email : pta.papuabarat@gmail.com

